

JELAJAH LITERASI (DI) PULAU BURU

Nama Namlea dan penulungan minyak kayu putih salah satunya dikenal berkat sebuah novel lawas Sebuah Rumah Nun di Sana. Novel otobiografis Beb Vuyk itu berlatar Pulau Buru, terutama Namlea, dengan komoditi minyak kayu putih, menghadirkan lanskap alam dan khazanah budaya Bumi Bupolo secara detail dan menggugah. Itulah yang membuat saya sejak lama jatuh cinta pada Namlea, Batuboi, Teluk Kayeli, dan seluruh Pulau Buru.

Seiring waktu, dunia literasi saya tentang Buru bertambah. Mulai catatan Pigaffeta dan Alferd Russel Wallace, penjelajah asing yang pernah mendarat di Teluk Kayeli hingga novel-novel Pramoedya Ananta Toer dan karya penulis lain yang ditulis semasa mereka menjadi tapol di lembah Waeapo. Karya-karya tersebut kemudian coba ditelusuri dengan menjelajah langsung Bumi Kayu Putih.



Raudal Tanjung Banua lahir di Lansano, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, 19 Januari 1975. Bukunya yang sudah terbit Pualu Cinta di Peta Buta, Ziarah bagi yang Hidup, Parang tak Berulu, Gugusan Mata Ibu dan Api Bawah Tanah. Ia pernah mengelola sejumlah event sastra seperti Kongres Cerpen Indonesia, Festival Kesenian Yogyakarta (FKY), dan Temu Sastrawan Indonesia. Ia juga diundang di berbagai event sastra, diantaranya Festival Winternachten sesi Indonesia, Festival Puisi Internasional DKJ, Cakrawala Sastra Indonesia, Ubud Writers and Readers Festival, Aruh Sastra Kalsel, dan KAPLF II di Pekanbaru. Memperoleh Anugerah Sastra Horison 2005, Sih Award, nomine KLA, dan MASTERA 2007 di Kualalumpur. Menetap di Yogyakarta mengelola Komunitas Rumahlebah, dan menerbitkan rumahlebah ruangpuisi.

Raudal Tanjung Banua

JELAJAH LITERASI
(DI) PULAU BURU

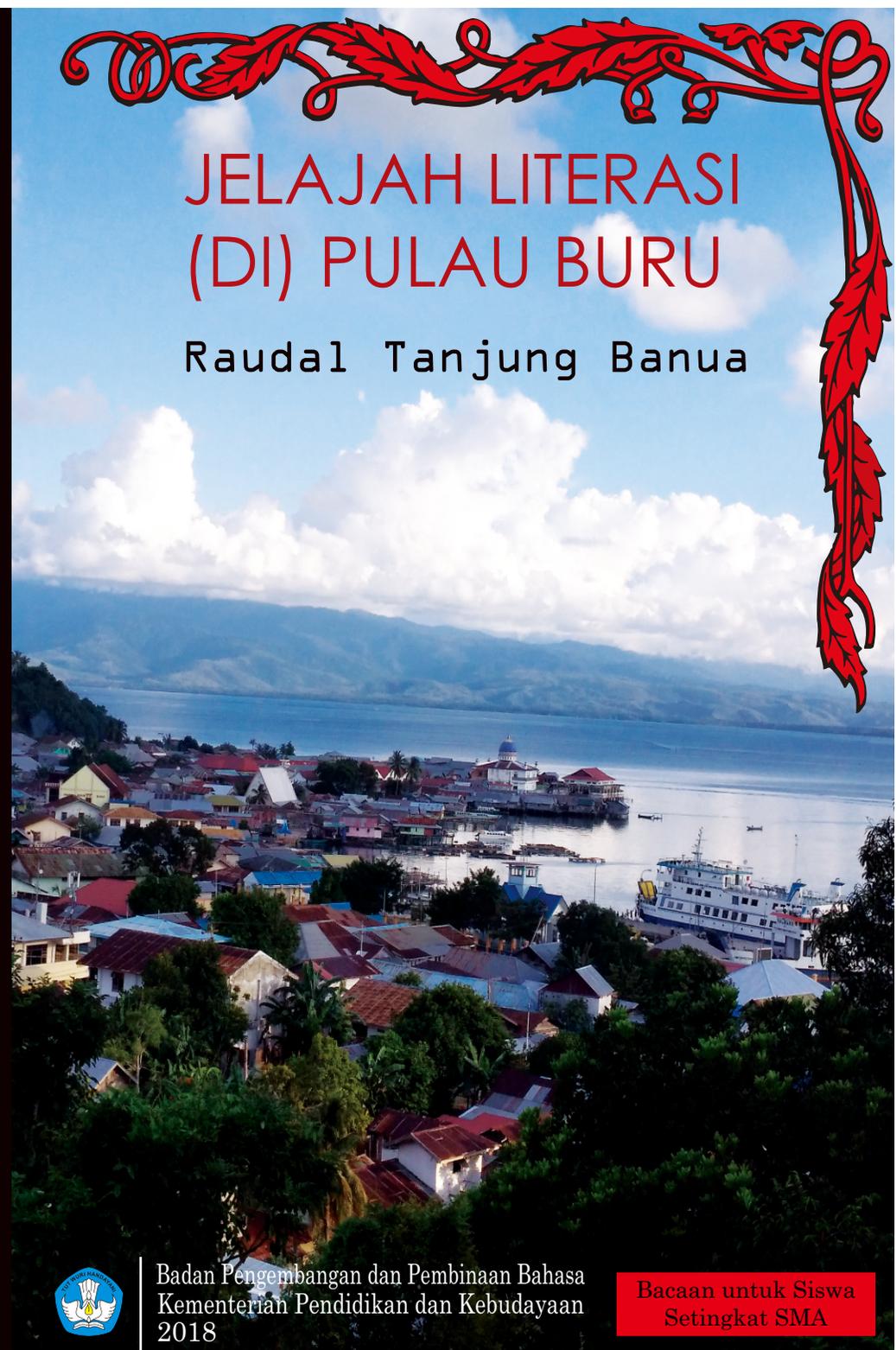


Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2018

Bacaan untuk Siswa
Setingkat SMA

JELAJAH LITERASI (DI) PULAU BURU

Raudal Tanjung Banua



Jelajah Literasi (di) Pulau Buru

Raudal Tanjung Banua

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2018

Jelajah Literasi (di) Pulau Buru

Copyright ©Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Cetakan Pertama, September 2018

ISBN
978-602-437-544-7

Diterbitkan oleh
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis

*Karya ini merupakan tulisan
Sastrawan Berkarya di Kabupaten Buru*

Mengirim Sastrawan ke Daerah 3T Menjaga NKRI

Pada dasarnya, sastra dapat dijadikan sebagai sarana diplomasi lunak (soft diplomacy) untuk memartabatkan bangsa dalam pergaulan global. Selain itu, sastra juga dapat memperteguh jati diri bangsa, memperkuat solidaritas kemanusiaan, dan mencerdaskan bangsa. Sastra yang memotret peradaban masyarakat bahkan dapat memberikan pemahaman lintas budaya dan lintas generasi.

Sayangnya, masyarakat dunia kurang mengenal karya sastra dan sastrawan Indonesia. Hal itu mungkin terjadi karena sastra belum menjadi kebutuhan hidup sebagian besar masyarakat Indonesia. Karya sastra belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana strategis pembangunan bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah merasa perlu memfasilitasi sastrawan untuk berpartisipasi nyata dalam pembangunan bangsa secara paripurna. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyelenggarakan program Pengiriman Sastrawan Berkarya pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Pada tahun 2016 satu orang sastrawan dikirim ke luar negeri (Meksiko) dan lima orang sastrawan ke daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal), yaitu Sabang, Aceh; Nunukan, Kalimantan Utara; Halmahera Barat,

Maluku Utara; Belu, Nusa Tenggara Timur; dan Merauke, Papua. Pada tahun 2017 enam orang sastrawan dikirim ke daerah 3T, yaitu Natuna, Kepulauan Riau; Bengkayang, Kalimantan Barat; Talaud, Sulawesi Utara; Dompu, Nusa Tenggara Barat; Morotai, Maluku Utara; dan Raja Ampat, Papua Barat. Pada tahun 2018 enam orang sastrawan telah melaksanakan program tersebut ke enam daerah 3T, yaitu Kepulauan Meranti, Riau; Nias, Sumatra Utara; Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah; Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara; Buru, Maluku; dan Seram Bagian Barat, Maluku.

Ada tiga alasan penting pengiriman sastrawan Indonesia ke luar negeri. Pertama, sastrawan Indonesia yang dikirim ke luar negeri merupakan bagian penting dari penginternasionalisasian bahasa Indonesia yang sedang digiatkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, pengiriman sastrawan Indonesia ke luar negeri adalah bagian dari diplomasi budaya melalui pengenalan dan pemberian pengalaman kepada sastrawan ke dunia luar untuk berinteraksi dengan sastrawan dan komunitas pegiat sastra mancanegara secara lebih luas. Ketiga, pengiriman sastrawan ke luar negeri merupakan salah satu cara memperkenalkan karya-karya sastrawan Indonesia kepada dunia yang lebih luas.

Adapun alasan pengiriman sastrawan ke lima daerah 3T di Indonesia adalah untuk memenuhi salah satu Nawacita Presiden Republik Indonesia, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sastrawan yang dikirim ke daerah-daerah tersebut diharapkan dapat mengangkat warna lokal

daerah dan memperkenalkannya ke dunia yang lebih luas melalui sastra.

Buku ini merupakan karya para sastrawan yang diperoleh dari hasil residensi selama kurang lebih dua puluh hari. Buku karya sastrawan ini mengangkat potensi, kondisi, dan kearifan lokal daerah 3T. Semoga buku ini dapat memperkaya khazanah sastra Indonesia dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra Indonesia.

Jakarta, Oktober 2018

Dadang Sunendar

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dari Pinggiran Kita Mengenal Kebinekaan Indonesia

Ada dua frasa penting dalam Nawacita ketiga dan kesembilan program pembangunan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran” dan “memperteguh kebinekaan”. Nawacita ketiga memastikan perlunya kebijakan afirmatif dalam membangun daerah pinggiran, sedangkan Nawacita kesembilan menyebut perlunya menjaga kebinekaan Indonesia.

Dalam kerangka penyediaan bahan bacaan tentang sosial budaya daerah pinggiran untuk mengenalkan kebinekaan Indonesia, Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program Pengiriman Sastrawan Berkarya ke Daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal). Dalam program tersebut, sastrawan menulis cerita, puisi, prosa, dan/atau esai tentang daerah 3T. Program tersebut merupakan salah satu program penguatan kemitraan kebahasaan dan kesastraan, khususnya kemitraan dengan sastrawan.

Program pengiriman sastrawan ke daerah 3T sudah dimulai sejak tahun 2016. Artinya, tahun ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan program ini. Program ini masih menggunakan model yang sama dengan tahun-

tahun sebelumnya, yakni model residensi. Para sastrawan bermukim selama kurang lebih dua puluh hari di daerah 3T. Mereka bersilaturahmi, bersosialisasi, berkomunikasi, berinteraksi, dan berdiskusi dengan berbagai lapisan masyarakat, komunitas, dan pemerintah daerah setempat untuk memperoleh informasi yang terkait dengan budaya, adat istiadat, tradisi, modal sosial, perubahan masyarakat, dan masalah-masalah terkini yang sedang terjadi. Sekembali dari daerah penugasan, selama kurang lebih dua bulan, para sastrawan menuliskan pengamatan, pengalaman, dan pengetahuannya ke dalam buku yang diberi tajuk “Catatan Jurnalisme Sastrawi” dari daerah pinggiran. Para sastrawan yang dikirim ke daerah 3T dipilih oleh tim juri yang terdiri atas sastrawan terkemuka, akademisi, dan peneliti sastra Badan Bahasa dengan mekanisme, syarat, dan ketentuan yang diatur dalam panduan seleksi.

Enam daerah 3T yang menjadi lokasi program Pengiriman Sastrawan Berkarya 2018, yaitu Kepulauan Meranti (Sungging Raga yang menghasilkan karya berjudul Tual Rindu di Kota Sagu); Nias (Raedhu Basha yang menghasilkan karya berjudul Ya’ahowu); Banggai Kepulauan (Norman Erikson Pasaribu yang menghasilkan karya berjudul Tak Ada yang Hilang di Banggai); Konawe Kepulauan (R. Toto Sugiharto yang menghasilkan karya berjudul Kasih Tak Sampai di Tumburano); Buru (Raudal Tanjung Banua yang menghasilkan karya berjudul Jelajah Literasi di Pulau Buru), dan Seram Bagian Barat (Benny Arnas yang menghasilkan karya berjudul Berburu Suami).

Dengan demikian, sampai tahun 2018 sudah ada tujuh belas buku catatan jurnalisme sastrawi tentang daerah

3T—dari Sabang hingga Merauke dan dari Belu hingga Talaud. Hal itu sesungguhnya telah merentang kebinekaan Indonesia yang nyaris sempurna. Dari daerah pinggiran, kita menemukan betapa masyarakatnya merawat tradisi, bergotong-royong, guyub, dan senantiasa menjaga keharmonisan antara manusia dan alam lingkungannya. Kehebatan masyarakat pinggiran, terutama daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain juga dapat kita temukan. Mereka mampu menyiasati tekanan ekonomi tanpa kehilangan nasionalismenya. Meski kadang-kadang terabaikan dalam ikhtiar pembangunan, masyarakat perbatasan ini senantiasa terus merawat jiwa dan pikirannya sebagai orang Indonesia menjadi “penjaga republik”.

Catatan jurnalisme sastra dalam tujuh belas buku ini sesungguhnya telah menampilkan lanskap tradisi, keyakinan terhadap cara mengelola alam sekitar, cara merawat nilai-nilai baik, dan cara masyarakat 3T menghadapi perubahan sosial. Semua makna ini ditulis dengan begitu sublim oleh sastrawan, suatu cara lain mengabarkan informasi demografi dengan mengandalkan kekuatan kata-kata, tidak sekadar angka-angka numerik, sebagaimana laporan sensus pembangunan yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik. Pula, catatan jurnalisme sastra tentang daerah 3T ini sesungguhnya telah memberi sisi lain dari penggambaran perubahan masyarakat.

Dengan membaca buku ini kita seakan telah pergi berjumpa dengan masyarakat di daerah yang jauh dari pusat kemajuan di kota-kota besar di Indonesia. Dari sini, kita mendapatkan pengetahuan dan kesadaran, tidak saja mengenai ketangguhan masyarakat, ketimpangan

antarwilayah di Indonesia, tetapi juga yang amat sangat penting adalah kita semakin menemukan Indonesia begitu beragam. Dari pinggiran kita menemukan keragaman dan catatan atas keberagaman itu tersublimasi melalui kata-kata.

Pemerintah, terutama pemerintah daerah, yang wilayahnya ditulis oleh sastrawan berkarya ini sejatinya dapat menjadikan catatan jurnalisme sastrawi sebelas buku ini sebagai sumber, hikmah, dan bahan bagi perancangan pembangunan daerah yang meletakkan manusia sebagai titik edar pemajuan daerah.

Selamat membaca daerah 3T dalam lanskap kata dan gambar. Temukanlah makna terdalam di balik kata dan gambar ini untuk tetap menjaga keindonesiaan kita yang beragam.

Jakarta, Oktober 2018

Gufran A. Ibrahim

Kepala Pusat Pembinaan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Sekapur Sirih

Karya ini ditulis setelah saya mendapat kesempatan berkarya di Pulau Buru melalui program Sastrawan Berkarya di Daerah 3T. Ini merupakan program dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang menyinergikan kreativitas sastrawan dengan potensi suatu daerah.

Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan staf Badan Bahasa yang membuka kesempatan baik ini. Terima kasih kepada para kurator yang telah mengabulkan hasrat lama saya untuk berjumpa dengan Namlea dan Pulau Buru. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemda Kabupaten Buru, masyarakat, dan pihak terkait lain yang telah menerima dan membantu saya selama di Buru.

Saya sangat berbesar hati ditempatkan ke Pulau Buru terutama karena persinggungan saya dengan dunia literasinya di masa lalu. Ketika saya masih berseragam putih biru, saya sudah mengenal Namlea dan seluk-beluk penyulingan minyak kayu putih berkat sebuah novel lawas yang menggugah, *Sebuah Rumah Nun di Sana*. Novel otobiografis Beb Vuyk tersebut tidak hanya berlatar Pulau Buru dengan komoditi minyak kayu putihnya, tetapi juga menghadirkan lanskap alam dan khazanah budaya Bumi Bupolo dengan detail dan utuh. Itulah yang membuat saya jatuh cinta pada Namlea, yang nyaris menjadi cinta tak sampai seumur hidup jika saya tidak bergabung dalam program yang cukup menantang dari Badan Bahasa.

Seiring dengan waktu, dunia literasi saya tentang Pulau Buru terus bertambah. Terbitnya karya kanon pencetus “Wallace Line”, Alfred Russel Wallace, beberapa tahun lalu oleh sebuah penerbit progresif di Jakarta, *Kepulauan Nusantara*, menambah minat saya pada Pulau Buru. Kayeli dengan teluknya yang luas menjadi pintu masuk naturalis Inggris itu ke Bumi Bupolo sampai ke Waeapo. Waeapo membawa saya kepada novel-novel Pramoedya Ananta Toer yang banyak digubah selama ia menjadi tahanan politik (tapol) di sana. Para penulis dan sastrawan lain yang senasib dengan Pram juga melahirkan banyak karya selama mereka menjadi tapol.

Bertolak dari keadaan tersebut, tidak bisa lain, kedatangan saya ke Pulau Buru bersinggungan erat dengan tempat dan alamat yang diguratkan dalam karya-karya yang pernah dilahirkan. Itulah sebabnya saya memberi judul buku ini *Jelajah Literasi (di) Pulau Buru*. Artinya, penjelajahan saya bisa berdasarkan literasi yang berkaitan dengan Pulau Buru, tetapi bisa juga dimaknai dengan penjelajahan literasi yang saya lakukan di Pulau Buru.

Sengaja pola penulisannya tidak memakai subjudul seperti yang biasa dilakukan dalam catatan perjalanan karena hal itu akan berbau “brosur” serta unsur jelajahnya akan hilang dan maknanya mudah ditangkap dan diikuti. Kata “jelajah” itu termasuk kata kunci pada judul yang saya berikan. Seseorang harus bersabar membacanya untuk mendapatkan kompleksitas teks—maaf, itu pun jika memang ada—bukan dengan cara praktis ala panduan wisata. Judul bab diambil dari beberapa kota atau wilayah yang memiliki keutamaan tertentu, sejarah, status, posisi,

dan lain-lain. Sementara itu, tempat-tempat lain dipantau atau dijelajah dari kota/wilayah dimaksud: Namlea, Kayeli, dan Waeapo.

Pola penulisan semacam ini, dalam bentuk yang mungkin minimal, merujuk setidaknya kepada catatan antropologis Clifford Geertz, *After the Fact, Dua Negeri, Empat Dasawarsa, Satu Antropologi* (LKIS, 1999). Catatan Geertz tersebut dibuat saat ia mengunjungi dan mengenang dua kota di dua negara, Fez di Maroko dan Pare di Indonesia. Selain itu, saya juga mencoba belajar pada penyajian laporan kehancuran Hiroshima oleh bom Sekutu, dalam buku karya John Hersy, Hiroshima, *Ketika Bom Dijatuhkan* (Komunitas Bambu, 2008). Apakah upaya ini bisa mendekati usaha penyajian yang mengandung unsur “jelajah”. Hanya pembaca yang berhak menilai. Akan tetapi, setidaknya saya sudah memperoleh rujukan yang baik dan menarik untuk dicoba.

Demikianlah, selamat membaca!

Namlea-Yogyakarta, Mei 2018
Raudal Tanjung Benua

Daftar Isi

Mengirim Sastrawan ke Daerah 3T Menjaga NKRI	iv
Dari Pinggiran Kita Mengenal Kebinekaan Indonesia	vii
Sekapur Sirih	ix
Namlea	1
Namlea II.....	51
Kayeli.....	120
Waeapo	162
Tentang Penulis	203

Namlea

Saya mengenal Namlea pertama kali ketika duduk di bangku sekolah menengah pertama di pantai barat Sumatra. Sebuah novel tentang penyulingan minyak kayu putih telah membawa saya mengembara ke kota kecil jauh di Pulau Buru, nun di timur tanah air.

Novel tersebut ditulis oleh sastrawan Indo-Belanda, Beb Vuyk, *Het Laatste Huis van de Wereld* (1938). Gadis Rasjid menerjemahkannya dengan indah, *Sebuah Rumah Nun di Sana* (Pustaka Jaya, 1975).

Dari situ saya bayangkan Namlea sebuah negeri antah-barantah. Bukan. Sebuah rumah ajaib yang hanya ada di sebuah pulau masa lampau. Tidak heran, terjemahan langsung judul novel ini sebenarnya adalah “Rumah Terakhir di Dunia”; dicuplik dari sajak penyair Rilke. Namun, Gadis Rasjid, rekan Vuyk, membuat judul dengan versi lain yang sama menggugah.

Apa pun, Namlea yang semula antah-barantah kemudian terasa akrab. Lantaran barangkali ia serupa rumah ajaib yang menakjubkan. Setidaknya dunia remaja saya yang rasa-rasanya juga tak kalah ajaib. Betapa tidak. Saya mengenang keajaiban itu dari perjumpaan yang mendebarkan dengan perpustakaan sekolah. Aroma buku-buku, deretan meja-kursi, dan rak demi rak tempat buku-buku ditata. Rak-rak itu bukanlah sekat yang memisahkan kita dengan dunia, tetapi ruang tempat kita berjumpa

dengan sebuah dunia yang membawa siapa pun menjelajah ke tempat-tempat yang tidak terduga.



Buku Beb Vuyk

Seperti saya yang dibawa bertandang ke “rumah” Beb Vuyk yang damai di Namlea. Oh, bukan. Rumahnya adalah Namlea itu sendiri! Dengar, dari beranda dan jendelanya yang terbuka, angin laut berhembus masuk, gelucak teluk, terompet kapal di pelabuhan, dan ketel-ketel yang berdentang. Tercium pula amis pantai, karang-ganggang, ikan-ikan di perahu, bunga semak liar, keringat para kuli, dan aroma minyak kayu putih. Semua membaur membubungkan aroma yang memabukkan.

Rasanya saya akan menamatkan novel tipis itu dengan sekali duduk, tetapi intensitas kalimat dan kedalaman bahasanya menghempang saya untuk lekas. Hampir di setiap paragraf saya berhenti membayangkan pohon kayu putih, ketel yang berasap, uap penyulingan atau Teluk Kayeli yang tenang-tenang bergelora, bentangan bukit-bukit

hijau Batuboi, atau orang-orang segala bangsa—dengan bahasa ibu yang berbeda—bercakap dalam satu bahasa, bahasa Indonesia, di jalan, pantai, dan dermaga. Bukankah itu menakjubkan?

Akan tetapi, di luar itu, nyaringnya lonceng sekolah kerap melerai penjelajahan saya. Saya meletakkan novel itu di tempat yang agak tersembunyi dengan harapan besok saya akan mudah menemukannya kembali. Tidak ada yang memindahkannya sehingga setiap kali jam istirahat tiba, saya leluasa berjumpa dengan halaman-halaman putih kekuningan itu.

Suatu hari, guru olahraga kami yang sekaligus bertugas menjaga perpustakaan, Pak Ben Tanzil namanya, menyarankan saya meminjam saja buku-buku perpustakaan yang disukai. Rupanya ia telah melihat diam-diam kelakuan saya. Sejak itu, saya rajin meminjam buku untuk dibawa pulang. Beb Vuyk dapat giliran pertama yang saya ajak ke rumah, ke sebuah pondok bertiang tinggi di kaki Bukit Barisan—waktu itu kami sekeluarga tinggal di ladang. Sebaliknya, pada malam hari, saat mulai asyik membaca, sayalah yang dibawa Beb Vuyk ke rumah kerangnya di Namlea. Ya, semalaman saya menamatkannya, lalu ingin mengulangi lagi seolah dengan begitu saya hendak memintas jarak hingga tinggal sehasta di depan mata.

“Di sini kedua belah pantai menjorok ke dalam. Di belakang pantai yang semakin meninggi, sebelum tiba di bukit, di suatu tanah datar yang sempit, terletaklah Kota Namlea...” tulis Beb, memesona.

“....Tempat ini menjadi semacam surga untuk anak-anak. Rumahnya yang sederhana dan pekarangan yang baru saja dirambah dari hutan pantai lebih menyerupai sebuah perkemahan daripada kediaman yang tetap. Di belakang rumah ada sebuah kebun kecil yang ditanami sayuran dan jagung. Kijang-kijang yang pergi ke pinggir pantai untuk mandi memasuki kebun itu dan mencicipi sayuran dari kebun, lalu mereka ditembak mati di sana. Kadang-kadang anjing-anjing menyalak mengejar celeng yang menerobos masuk persemaian.”

Kemudian, lanjutnya: “Kampung Namlea terdiri dari lima atau enam rumah dan jalanan menuju kampung tersebut melintasi rawa-rawa berbahaya karena penuh buaya. Tidak ada pasar yang tetap. Makanan sehari-hari yang paling biasa pun seperti beras, pisang, dan kelapa tidak dapat diperoleh secara teratur. Ikan harus dikail sendiri dan untuk mendapatkan daging, orang harus memburu rusa dan celeng di bukit-bukit yang panas.”

Remaja manakah yang tidak tergoda dengan suasana itu? Hasrat siapakah yang tidak terpikat dengan kalimat-kalimatnya yang menggambarkan “kemurnian” sebuah dunia?

Jika mungkin, saya tambahkan untuk Anda sajak Rilke yang menginspirasi Vuyk untuk “meratap indah” di Namlea. Anggaplah ini interteks yang tidak bisa ditolak oleh teori sastra yang paling kritis sekali pun: saya terinspirasi Vuyk, Vuyk terinspirasi Rilke, dan Rilke terinspirasi kemurnian alam yang kepolosannya identik jika bukan kembar siam dengan sepotong tanah timur beraroma kayu putih.

Begini sajak itu dan bayangkan Vuyk, seperti pengakuannya, membaca dengan keras di tengah keheningan malam terang bulan:

*Di dusun ini, rumah yang terakhir
begitu sepi seperti rumah terakhir di dunia.
Sebuah jalan, yang tak berhenti di dusun ini,
pelan-pelan menuju ke malam panjang.*

*Dusun kecil ini hanya tempat persinggahan
antara dua dunia: penuh firasat dan kekuatan,
sebuah jalan dengan sebuah titian
di belakang rumah.
Dan mereka yang meninggalkan dusun ini,
harus berkelana jauh,
dan mungkin banyak yang meninggal
dalam perjalanan.*

Apa pun dan dari mana pun sumber inspirasi Vuyk, saya sudah cukup beruntung bisa begitu dekat dengan Namlea setelah membaca hasil buah penanya. Saya merasa perahu-perahu Namlea dapat kusentuh, kupungut kerang pantainya, dan kulemparkan di dermaga tua, seperti adegan “Sinyo” melemparkan sebatang karang ke laut dan mengatakan dengan gembira, ”Seperti inilah Kota Namlea!”



Kota lama Namlea

Teriakan akrab itu, seakrab saya dengan tokoh-tokohnya: sepasang suami istri yang dipanggil “Sinyo Broertje” dan “Nonnie” (atau “Aku” yang notabene Beb Vuyk sendiri), dan anak mereka, Hans Christian yang sama dengan nama pengarang anak terkenal, Anderson. Saya serasa mengenal de Willigen dan Nyonya Tua, sang mertua yang sudah lama meninggal dan mendapat gelar “Tuan Tanjung” dan “Nyonya Tanjung” dari penduduk setempat pada masa jayanya. Pun Nonnie Marie dan Sinyo Frank, saudara “Sinyo Broertje” yang sudah hidup berpencar.

Tentu saja tidak terlupakan Heintje Limba, seorang Ambon yang setia, “pemburu ulung, peminum hebat, dan petualang berani mati” serta banyak tokoh dengan watak yang, sebagaimana di bagian bumi manapun, menggemaskan: bekerja dengan pengawasan, berhutang

tiap ada kesempatan, tetapi umumnya mereka pekerja keras.

Akan tetapi, kedekatan saya dengan semua itu sebatas imajinasi, bahkan makin mendekat, makin ada yang menjauh dan tidak tersentuh. Pada akhirnya, jarak yang saya kira dekat itu ternyata memang masih jauh, teramat jauh. Misteri waktu? Tentu. Ada kalanya apa yang kita anggap dekat sebenarnya jauh, apa yang dirasa jauh sebenarnya begitu dekat.

Demikianlah, dalam perjalanan waktu, saya lupa pada Namlea, bahkan bertahun-tahun kemudian, ketika saya sendiri memilih hidup jadi penulis seperti Beb “E. de Willigen” Vuyk, lalu meneroka seri kisah kota-kota kecil, Namlea tak pernah kusebut. Mengapa? Saya hanya bisa heran bin takjub.

Telah kutulis berbagai kisah kota kecil di tanah air yang dijelang dan yang kubayangkan. Kusebut Barus, Singkel, Tidore, Malifut, Tiku, dan Bandar Sepuluh dalam deretan kota-kota hikayat; kutulis Siak Sri Indrapura, Banda Neira, Kudus, dan Demak dalam kota-kota yang tetap tegak; kujelajah Belinyu, Kapuas, dan Nangabulik bagi kota-kota kini di era otonomi, bahkan Pleihari, kota lain yang berkecambah dalam kepala melalui novel *Orang-Orang Trans* N.H. Dini, hidup kembali saat saya menulis hal-ihwal kota-kota kecil.

Aneh, mengapa Namlea luput? Nama yang pernah dekat di ujung lidah, tetapi tak muncul saat saya menggubah kota-kota jadi cerita. Kota, yang dulu sering saya sebut lebih daripada sekadar kata-kata, raib, dan terlupa.

Untunglah nasib tak kalah ajaib.

Jika ia bisa memisahkan seseorang dengan kota kelahiran dan membuat orang lupa dengan kota yang diimpikan, ia juga bisa mempertemukan orang dengan tempat yang lama terlupakan. Begitulah kiranya nasib baik mendatangi saya. Saya baru saja mengakhiri seri cerpen kota-kota kecil yang dimuat selama lebih dari lima tahun di *Jawa Pos*. Edisi bukunya sedang saya siapkan, yakni *Kota-Kota Kecil yang Diangan dan Kujumpai*. Tiba-tiba nasib mempertemukan saya dengan Namlea, kota yang hilang itu!

Melalui program cukup menantang dari Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, saya ditempatkan selama dua puluh hari di Pulau Buru, tepatnya Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Tempat pertama yang memburu dan mengharu biru tidak lain tidak bukan adalah Namlea!

Akan tetapi, bacaan dan referensi saya bertambah dan imajinasi berkembang. Apa yang saya bayangkan tentang Pulau Buru hari ini berbeda dengan apa yang saya bayangkan 30 tahun lalu. Dulu saya hanya mengenal Pulau Buru, khususnya Namlea, dari pena Beb Vuyk yang heroik dan romantik. Belakangan, saya mengenal Pulau Buru, tidak melalui Namlea, tetapi Waeapo, terutama lewat *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu*, catatan seorang tapol bernama Pramoedya Ananta Toer. Di luar itu tak terhitung lagi tulisan tentang Pulau Buru yang identik dengan “Pulau Pembuangan”, baik melalui karya Pramoedya yang lain,

kawan senasib seperti Hersri Setiawan, Mars Noersmono, maupun liputan wartawan sebagaimana ditulis Rosihan Anwar, Mochtar Lubis, dan Sindhunata.

Melihat di daftar pengumuman, nama saya tercantum ke Pulau Buru, bukannya ke Nias, Seram, Konawe, Meranti, atau Banggai. Saya sempat tercekot. Apa yang mula-mula muncul memang tak terpungkiri, kesan seram. Mas Toto Sugiharto, sejawat saya di Yogyakarta yang ditempatkan di Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, sempat berkirim WA, "Tempatmu paling 'horor', ya?"

Meskipun bermaksud bercanda, jujur saya katakan, saya membenarkan dalam hati. Bayangkan: pulau pembuangan. Ke sanalah para tahanan politik (tapol) '65 dikirim oleh rezim Soeharto. Saya teringat kehidupan tapol/napol yang getir, terpisah ribuan kilometer dari keluarga tanpa kabar berita, dan sebagian menemui ajal dengan makam tanpa nisan. Sejenak saya berpikir, dari segi nama—secara harfiah—Pulau Buru lebih pantas disebut "Pulau Seram". Tunggu. "Buru" itu sendiri secara etimologis terdengar tidak netral dari kesan "keras, cepat, dan genting" yang menambah gawat keadaan.

Namun, di sisi lain, saya sudah memiliki modal memori yang tak mungkin terhapus, yakni Namlea sebagai "nukleus" Pulau Buru. Meskipun Waeapo dengan instalasi rehabilitasi (inrehab) tapolnya muncul melebihi memori personal saya dan hal itu jauh lebih emosional—memori kolektif, bukankah ia tak melulu kesakitan?



Buku-buku tentang Buru

Ya, Waeapo juga ialah cerita tentang para transmigran yang sukses dan berhasil, sawah-sawah luas membentang, irigasi dari sungai-sungai di gunung, capaian lumbung pangan di Maluku, bahkan di Indonesia timur. Mereka hidup sejahtera secara ekonomis. Anak-anak mereka rata-rata menempuh pendidikan tinggi di Makassar, Ambon, dan kota-kota di Pulau Jawa.

Para tapol yang memilih menetap di Waeapo bersama para transmigran pun berhasil mengangkat harkat dan martabat hidupnya. Mereka dihormati warga sebagai perintis kawasan, *babat alas* membuat jalan, dan pembuka sawah. Anak-anak mereka banyak yang berhasil dalam dunia pendidikan bekerja di berbagai profesi yang dulu seolah “haram” dimasuki keluarga tapol, seperti tentara, polisi, guru, bahkan ada yang menjadi ketua DPRD Buru.

Bukankah semua itu lebih dari cukup untuk mengimbangi kesan Pulau Buru yang emosional?

Ya, begitulah seharusnya. Namun, bagaimana pun tetap ada degub dan getar di dada ketika saya bersiap terbang ke Pulau Buru. Meskipun menganggap diri sebagai pejalan (dalam catatan perjalanan, saya selalu menulis status saya sebagai “penikmat perjalanan”). Akan tetapi, tetap saja setiap perjalanan terasa baru, terlebih saat menuju suatu tempat atau alamat yang belum pernah dijelang yang selama bertahun-tahun hanya tersimpan dalam ingatan. Betapa bergandanya perasaan.

Ke Pulau Buru, ke Namlea!

Pada tahap begini, sebenarnya saya sedang dibawa ke halaman-halaman *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu*.

Tidak! *Nyanyi Sunyi* lebih banyak membawa saya ke lembah Waeapo, ke unit-unit, ke barak-barak, atau sekalian ke Jawa dan Jakarta, ke alamat di tempat Pram menyampaikan gugatan untuk penguasa. Surat-surat kepada anak-istri yang tidak terkirim atau tidak sampai. Jika pun Pram menyebut Namlea, kota kecil yang agak semarak di utara, itu lebih merujuk pada hidup para komandan tapol yang menghabiskan waktu bersenang-senang setelah menjual kayu atau padi yang disetor para tapol dari unitnya.

Namlea dalam kenangan Pram lebih kental aroma dendam. Kenangan saat ia pertama kali tiba dan dilempar dari kapal ke perahu. Dia menyusuri sungai Waeapo yang sebagian melalui Pantai Sanleko. Selebihnya, ia lebih banyak menyebut Jiku Kecil ketimbang Namlea—meskipun

Jiku hanya sebuah kampung kecil di Namlea. Namun, di sanalah tempat penjara orang buangan. Ya, Jiku Kecil, penjara di atas penjara. Bayangkan, para pesakitan yang notabene sudah diasingkan di lembah Waeapo jika dianggap bermasalah akan dikirim ke Jiku Kecil, di kawasan atas Namlea yang memiliki penjara khusus.

Ah, *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu*, akan saya buka nanti di Waeapo. Biarlah saya buka lebih dulu halaman-halaman kenangan di Namlea, yakni di beranda *Sebuah Rumah*.

Dari Jakarta ke Pulau Buru, saya ditemani oleh dua orang staf Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bang Arie Andrasyah Isa dan Mas Octa serta ditambah seorang staf lagi dari Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Mas Rumihin. Mereka bertugas mengantar dan memperkenalkan saya kepada pejabat daerah setempat terkait program Sastrawan Berkarya di Daerah 3T.

Pengantaran dan perkenalan tersebut sangatlah penting karena menyangkut kelancaran dan kenyamanan sastrawan bekerja di daerah tujuan, sekaligus memberi tahu pejabat atau instansi terkait tentang kegiatan sang sastrawan. Sastrawan tidak hanya bekerja di belakang meja, tetapi juga bisa “turba” (meminjam istilah Lekra); tidak hanya menghasilkan kisah-kisah imajinatif dalam berbagai genre sastra, tetapi juga bisa menjajal karya yang bersifat lebih “fleksibel”, misalnya jurnalisme sastrawi yang akan mengangkat potensi daerah.

Kami terbang dengan sebuah pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 00.30 WIB dan tiba pukul 06.00 WIT di Bandara Pattimura Ambon. Jarak Jakarta—Ambon ditempuh dalam waktu tiga jam tiga puluh menit. Setelah tiba di Ambon, kami transit 30 menit untuk berpindah pesawat kecil rute Ambon—Namlea untuk melintasi Laut Banda selama 30 menit.

Bersama pancaran matahari pagi di ufuk timur, pesawat kecil yang berkapasitas 78 penumpang itu mulai merendah ke Bumi Bupolo atau Bumi Kayu Putih. Cahaya yang layah di jendela tidak membuat saya berkedip menatap keindahan di bawah sana. Bukit-bukit hijau kayu putih tertelungkup seperti piring porselen di pencucian. Batang dan dahannya yang putih serupa lelehan busa pada piring porselen itu. Kali lain tampak serupa deretan topi baja di kepala tentara yang sedang tiarap, sedangkan warna putih serupa tirai kabut, tipis kelabu.

Makin ke bawah ukuran bukit-bukit itu, makin kelihatan membesar dan akhirnya perbukitan itu mengingatkan saya pada latar film seri anak-anak di televisi, *Teletubbies*. Yang terakhir memberi kesan kepolosan kanak-kanak dan kemurnian Pulau Buru. Sementara laut yang biru, pantai putih dan deretan nyiur melambai, tampak sangat natural, seolah remaja tanpa lipstik. Sebuah danau kecil, lebih berupa telaga, tenang, tiada beriak, terlihat di sebelah kiri jendela. Cahaya pagi menyepuh permukaannya jadi berkilau emas suasa. Itulah Danau Namniwel yang juga digunakan sebagai nama Bandara Namlea, tempat kami akhirnya mendarat.



Bandara Namniwel

Pesawat mendarat sudah. Dua baling-baling di sayap meronta untuk yang terakhir kali. Pintu terbuka, tangga terulur dari atas ke bawah, dan para penumpang turun dengan wajah cerah seperti pagi yang cerah. Mereka pun berswafoto. Seorang di antaranya adalah tentara muda dengan seragam lengkap. Mungkin ia dari daerah lain di Indonesia dan memenuhi panggilan ibu pertiwi di Bumi Kayu Putih.

Saya sendiri tidak biasa berswafoto. Saya hanya mengabadikan pemandangan sekitar bandara yang cukup unik. Landasannya berada di bawah, seolah-olah sengaja digali dan diratakan, sedangkan terminal bandara berada di atas tebing. Di tebing yang diberi dua tangga simetris itu, tertera logo Dinas Perhubungan dan nama Bandara Namniwel berlatar putih biru. Sementara itu, sepuluh tiang terminal berada jauh di atas berwarna merah kesumba.

Begitu masuk terminal bandara, kami langsung disambut gadis dan bujang Buru dengan ramah. Mereka mengenakan pakaian adat yang elegan. Sekilas mengingatkan saya pada pakaian adat Jawa atau Sunda. Apalagi yang laki-laki memakai *blangkon*. Tidak ada kalungan bunga, bahkan tidak ada jabatan tangan karena mereka tercetak di sebuah *banner* bersama informasi wisata Buru.



Banner Promosi Wisata di Bandara Namniwel

Sambil menunggu barang bagasi, saya membaca promosi dengan kalimat menggoda yang dihiasi dengan keindahan Pantai Jikumerasa itu. “*Come and Explore Buru*”, “*Mahi Maptomi Nge Bupolo*”, “*Ayo Main ke Buru*”, demikian ajakannya. Tagarnya #ayomainkeburu, #amazingburu, dan #ranamenyapadunia. Selain gambar Pantai Jikumerasa, ada gambar ikan hias, terumbu karang, dan bintang laut

yang menunjukkan kekayaan biota bawah laut Buru. Ada juga foto orang memacu *jetboat* yang menandakan bahwa pantai Buru punya fasilitas wisata. Sayang, tidak ada pohon kayu putih.

Setelah mengambil barang bagasi, kami naik ke mobil carteran yang menunggu di pelataran parkir bandara. Ada banyak mobil serupa menunggu penumpang. Selain itu, jurusan Bandara Namniwel-Kota Namlea atau sebaliknya, dapat juga dilayani oleh bus Damri. Tarifnya Rp30.000/orang. Di atas mobil, saya merasa tuntaslah segala yang saya pendam dalam tahun-tahun diam. Saya hanya perlu menahan kurang setengah jam lagi untuk benar-benar berjumpa Namlea karena saya mesti menempuh perjalanan 20 km ke pusat Kota Namlea.

Dulu, pesawat mendarat lebih dekat ke Namlea, yakni di sebuah lapangan terbang peninggalan militer Jepang di batas kota. Akan tetapi, lapangan terbang tersebut hanya bisa didarati oleh pesawat jenis capung (*twin otter*) bermuatan 12—17 orang. Baru pada tahun 2006 dibangun Bandara Namniwel dengan landasan pacu (*run way*) sepanjang 1.290 meter yang bisa didarati pesawat berukuran sedang.

Bandara Namniwel terletak di Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, sebuah kecamatan pemekaran di barat Namlea. Menariknya, Desa Sawa pernah menjadi markas tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua, tetapi lapangan terbangnya berada di dekat Namlea. Sebaliknya, kini bandaranya ada di Sawa, tetapi “markas besar” pemerintahan ada di Namlea.

Saya mulai menikmati pemandangan Pulau Buru yang memikat. Sepanjang jalan, pohon kelapa berderet teratur di kebun-kebun yang luas. Tidak lama kemudian saya menemukan apa yang tidak ada pada informasi pariwisata bandara tersebut: pohon kayu putih. Ya, pohon-pohon itu berderet memenuhi bukit-bukit yang telungkup hijau. Di beberapa titik terlihat tempat penyulingan dengan pondok dan ketel di atas tungku. Hal ini membangkitkan lagi ingatan saya pada Beb Vuyk, petualang romantik itu.

Bang Mus (47 tahun), sopir mobil carteran kami yang berasal dari Ternate, menawarkan kepada saya untuk singgah di tempat penyulingan. Saya dengan halus menolak. Selain masih terlalu pagi dan belum ada aktivitas, saya juga ingin menikmatinya nanti dalam momen yang lebih khusus. Sekalian dengan cara itu, perjumpaan pertama saya dengan Namlea bisa lebih cepat terlaksana dan perjumpaan saya dengan penyulingan minyak kayu putih bisa lebih khidmat.

Laju mobil putih Bang Mus terbilang pelan jika dibandingkan dengan beberapa kendaraan yang berpapasan atau menyalip kami. Rata-rata kendaraan melaju kencang. Jalan yang mulus dan lengang menjadi faktor orang terpacu untuk *ngebut* sekalipun ia belum tentu buru-buru.

Namun, di bagian-bagian tertentu, di pusat kampung yang ramai seperti Waimiting, Jikumerasa, Ubung, dan Lala, mobil harus berjalan pelan-pelan karena rumah penduduk merapat ke sisi jalan dan jalan pun ikut mengecil seperti ujung ikat pinggang. Dari pohon jambu yang sedang berbuah lebat di halaman sebuah rumah, buah-buahannya berjatuh sampai ke aspal. Sebagian orang menjualnya dengan mengonggoknya di atas meja yang rapat ke tepi jalan.

Badan jalan bertambah sempit saja, seperti di kompleks perumahan, bahkan sekilas seperti di studio. Unik juga. Di sejumlah kampung, seperti Ubung (namanya mengingatkan saya pada Terminal Bus Ubung di Denpasar) tampak berderet pagar dengan bentuk dan tinggi seragam. Saya menduga itu dibangun oleh dinas perhubungan atau dinas pekerjaan umum untuk pengamanan.

Warga sendiri melintang tali kapal di tengah jalan sebagai polisi tidur yang “ramah lingkungan” karena tali kapal yang kadang digabung menjadi dua utas itu tidak terlalu tebal, tetap saja laju kendaraan hanya berkurang sedikit. Mobil baru benar-benar pelan ketika melewati di depan Markas Kodim 1506/Pattimura di Jikumerasa.

Di mana-mana sama saja. Saya teringat pintu masuk Kota Padang yang harus melewati dua kompleks militer—Brimob di utara dan Angkatan Laut di selatan—membuat setiap kendaraan harus beringsut serupa siput. Apalagi masa Orde Baru, tentara sangat ditakuti. Begitu juga di Kartasura, Solo, di depan Markas Kopassus Kandang Menjangan. Deretan polisi tidur tidak saja membuat pelan kendaraan kecil, tetapi juga bus-bus cepat Yogya—Surabaya, seperti Eka atau Sumber Kencono yang terkenal nekad dengan kecil hati harus turut melambat.

Keasyikan mengamati situasi sambil membayangkan tempat lain membuat saya hampir tidak menyadari bahwa kami telah memasuki kota Namlea. Sebuah tugu tegak menjulang di tengah sebuah bundaran membuat saya tersadar.

“Itu Tugu Pemekaran,” kata Bang Mus. Tugu tersebut merupakan simbol terbentuknya Kabupaten Buru pada tahun 1999, yang lepas dari Kabupaten Maluku Tengah.

Di luar itu, saya tidak melihat ada gerbang selamat datang sebagaimana lazimnya sebuah kota. Jika dibandingkan dengan Gerbang Selamat Datang di Piru, ibu kota Kabupaten Seram Bagian Barat yang sempat saya lihat di Google, megah nian. Seolah hendak mengalahkan Arc de Triomphe, Paris. Gerbang kebebasan Kota Limboto di Gorontalo yang pernah saya kunjungi menyerupai Menara Eiffel. Jadi, Namlea tampak tidak punya urusan dengan gerbang yang megah. Cukup Tugu Pemekaran yang sejatinya juga sangat sederhana.



Tugu Pemekaran

Sekitar 10 menit, saya memang sempat melihat sebuah gerbang di tepi pantai, tetapi itu gerbang selamat datang di Kawasan Wisata Jikumerasa. Jika begitu, pikir saya, Namlea adalah kota yang ingin tampil apa adanya

dan semua yang ada padanya akan mengucapkan selamat datang meskipun tidak harus lewat kata dan tulisan: tugu sederhana itu, bundaran itu, pohon-pohon kayu putih yang berderet sebagai pembatas jalan, orang-orang yang tersenyum, rumah-rumah berhalaman luas, toko-toko, dan warung makan. Semua. Seolah mengucapkan selamat datang. Lalu, saya mengangguk sambil menatap kaca jendela di mobil yang terus melaju.



Pagi di Teluk Kayeli

Kemudian kami berhenti untuk sarapan nasi kuning di sebuah kedai tepi teluk. Lauknya telur dan ikan tongkol dan diberi sambal dan sangrai kelapa. Teh hangat membuat tenggorokan lega. Saya menyempatkan diri melongok ke belakang kedai untuk melihat Teluk Kayeli yang pagi itu masih teramat tenang. Saya menyapanya dengan gumam selamat pagi, dalam hati, sebelum akhirnya tubuh kami

yang lelah terantar ke Hotel Grand Sarah di bukit yang datar di atas teluk.

Hari kedua di Pulau Buru, kami berkunjung ke instansi terkait untuk melapor secara resmi mengenai Program Sastrawan Berkarya. Supaya tidak terlalu formal, kami menganggapnya sekalian silaturahmi. Segelas kopi hitam yang kami tandaskan di gazebo menandai dimulainya anjangsana dari kantor ke kantor.

Bang Mus yang bertubuh besar berdegap, sudah siap dengan mobil putihnya yang *full music*. Ia juga siap bercerita tentang Namlea dan lain-lain jika ditanya.

“Ke mana dulu, Bos?” kali ini dia yang bertanya.

“Ke Dinas Pariwisata Kabupaten Buru,” jawab Mas Rumihin dari belakang. “Soalnya kita masih menunggu kabar dari kantor bupati.”

Mobil melaju menuju kawasan perkantoran Pemda Buru, tak jauh dari Tugu Pemekaran. Tata ruang kompleks perkantoran Pemda Buru sudah tertata sedemikian rupa. Meskipun masih banyak lahan kosong dan jalan yang belum semua beraspal, perencanaan tata ruang tampak matang. Dinas Pariwisata Kabupaten Buru terletak di ujung Jalan Sultan Nuku, tanpa bernomor, dan berbatasan dengan tanah kosong padang sabana. Kami menunggu kepala dinas pariwisata yang sedang rapat.



Kantor Dinas Pariwisata Buru

Sambil menunggu, saya mengamati foto-foto pariwisata yang dipajang di dinding ruang tamu sehingga tampak semarak. Ada foto penari sawat pesisir sedang beraksi, tarian kuda lumping, penyelam dan alam bawah laut, para perenang di sebuah kompetisi, dan lain-lain. Sekali lagi, saya tidak melihat pohon kayu putih. Apakah hal itu disebabkan oleh wisata bahari menjadi prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Buru atau saya terlalu terobsesi pada kayu putih? Boleh jadi atau entahlah.

Akan tetapi, ketika petugas penerima tamu memberi kami majalah *Burumagz*, barulah saya lihat bahwa konsentrasi pengembangan wisata Buru cukup kompleks, baik destinasi, atraksi, ritual, produk, fasilitas, maupun even. Majalah berukuran lebar tersebut menampilkan keindahan Danau Rana di pedalaman, Danau Namniwel, air terjun Wae Ura dan Waprea, pesona sawah Waeapo dengan bendungan Waeleman, dan Benteng Kayeli yang bersejarah.

Pantai memang dominan menjadi liputan, kecuali Pantai Jikumerasa yang sudah menjadi ikon wisata Pulau Buru. Ada juga liputan Pantai Ubung, Waeperang, Batu Layar, Tanjung Pena, Pantai Merah Putih, dan Teluk Bara. Banyaknya destinasi pantai merupakan konsekuensi logis dari Buru sebagai bagian dari wilayah Kepulauan Maluku. Lagi pula, masing-masing pantai punya corak dan potensinya sendiri. Meskipun demikian, dalam hal informasi dan promosi setiap destinasi saya kira perlu dimunculkan.

Saya senang melihat penyulingan minyak kayu putih yang mendapat liputan khusus di majalah *full colour* edisi 2015—2016 itu (saya belum melihat edisi 2017—2018). Selain itu ditampilkan pula kerajinan batu akik dari Gunung Botak. Atraksi kesenian umumnya berupa tari-tarian. Selain tari sawat, ada pertunjukan kuda lumping—buah akulturasi budaya Jawa di Waeapo—serta tari *cakalele* yang terkenal di Maluku. Tidak ketinggalan ritual mandi safar di Pantai Waprea.

Ada pun kuliner Pulau Buru yang disajikan meliputi nasi kuning, ikan bakar, lalapan, dan rujak Jikumerasa. Sayangnya, tidak ada liputan tentang kuliner khas Pulau Buru yang bisa dijadikan oleh-oleh. Kuliner yang diliput pun sebenarnya bukan sesuatu yang khas karena kuliner tersebut ada di mana-mana. Akan tetapi, info itu cukup kuat memberi pesan untuk penggemar bertamasya selera. Menu boleh sama, tetapi soal rasa dan suasana, Buru punya cerita! Begitulah kira-kira.

Ikan laut bakar yang lazim menjadi andalan daerah pantai bisa ditemukan di banyak warung makan dan restoran di Namlea serta tempat lain di Pulau Buru. Salah

satu yang “nikmatnya tak tertandingi”—meminjam istilah *Burumagz*—adalah Restoran Citrawangi di Mako. Restoran dengan gazebo di atas kolam itu seakan keluar pakem: Sedia ikan bakar air tawar! Selain ikan laut, ada juga ayam bakar.

Selain restoran, ada hotel yang jumlahnya cukup banyak, tetapi penyebarannya masih belum merata. Kebanyakan hotel terdapat di Namlea. *Burumagz* juga menampilkan sebuah resor, yakni Waspait Resort, tetapi hanya berupa foto tanpa keterangan.



Pantai Jikumerasa

Selanjutnya, saya mendapat penjelasan dari Kepala Dinas Pariwisata Buru, Istanto Setyahadi tentang acara wisata dan budaya. Setelah menunggu hampir setengah jam, kami diterima di ruangannya yang bersih. Sambutannya terkesan dingin dengan tetap duduk di belakang meja. Setelah Bang Arie menjelaskan program kami, kepala dinas yang tampak awet muda itu, mulai tertarik.

Ia menjelaskan kalender kegiatan di Pulau Buru serta program pengembangan pariwisata Bupolo. Ia menyatakan “siap 24 jam membantu sastrawan untuk informasi dan segala sesuatunya”.

Salah satu informasi awal yang cukup membantu adalah Event Pesona Bupolo. Acara itu ditujukan untuk memperkenalkan Pulau Buru kepada seluruh masyarakat Indonesia dan mancanegara. Ada sekitar 70 agenda kegiatan yang diselenggarakan dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember, di antaranya Semarak Ramadan, Festival Anak Bupolo, Gebyar Merah Putih, Bupolo Agro Festival, Bupolo Marine Festival, dan Mandi Safar. “Kalender Event Pesona Bupolo 2018 baru saja diluncurkan Bapak Bupati Ramly Umasugi pada tanggal 18 April lalu,” katanya.

Tentu saja, saya tidak merasa terlambat karena kalender itu menyebar tiap bulan, termasuk bulan Mei saat saya berdomisili. Pada bulan Mei kalender acara baru dimulai dengan agenda Bupolo Spekta. Agenda sebulan penuh itu ditujukan sebagai syukuran atas setahun kepemimpinan Bupati Ramly Umasugi dan Wakil Bupati Amustofa Besan.

Sekilas acara syukuran itu agak “beraroma” politik, tetapi jika hal itu bisa disubsitisi untuk masyarakat banyak. Kenapa tidak? Bagi Ramly sendiri ini adalah jabatan periode kedua setelah periode 2012—2017 dengan Wakil Bupati Juhana Soedrajat. Untuk diketahui, sebagai daerah pemekaran baru Kabupaten Buru sudah menyelenggarakan empat kali pilkada yang memunculkan dua sosok bupati terpilih, Drs. H.M. Husnie Hentihu (dua periode) dan Ramly Umasugi sendiri (juga dua periode). Tahun 1999 merupakan

tahun awal pemekaran daerah. Pejabat daerah tersebut adalah pelaksana tugas yang dipercayakan kepada R.S. Sangadji, S.H.

Saat kami keluar dari kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Buru, Mas Rumihin yang sejak tadi gelisah kembali memantau gawainya, kalau-kalau ada kabar dari kantor bupati. Urusan “protokoler” ke kantor yang akan dikunjungi memang dipercayakan kepada putra Maluku asal Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang berbatasan dengan Timor Leste itu.

“Masih senyap,” katanya lesu. Matanya seperti meminta pendapat.



Kantor Bupati Buru

Bang Arie, “sesepuh” kami, menganjurkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Buru dulu. Bang Mus segera melaju. Belum jauh berjalan, telepon Mas Rumihin mengumandangkan bunyi suling dan tifa. Ia angkat dan wajahnya mendadak cerah. “Kantor Bupati memanggil,” katanya. Bang Mus pun memutar haluan.

Kantor Bupati Buru terletak di Jalan Danau Rana No. 1. Saat tiba, kami diberi tahu oleh petugas bahwa yang akan menerima kami adalah Wakil Bupati Amustofa Besan, S.H. karena Bupati Buru, Ramly I. Umasugi, S.Pi., M.M., sedang berada di Jakarta.

Untuk mencapai ruang wakil bupati ada pintu belakang yang simetris dengan pintu bagian depan. Hal itu memberi kesan tidak ada pintu depan atau pintu belakang sebenarnya. Keduanya bisa dicapai dari gerbang yang serupa bentuknya di jalan yang melingkar. Hal itu mencerminkan pola kepemimpinan yang bersatu dan kompak. Jadinya, arsitektur dan suasana Kantor Bupati Buru terasa sejuk di tengah cuaca Bumi Kayu Putih yang panas.

Rasanya bertambah sejuk ketika kami disambut senyum dan jabat tangan hangat oleh Pak Amus. Orangnya masih muda, lahir 2 Juni 1973 di sebuah *soa* tua bernama Kubalahin. Perawakannya tegap. Maklum, sebelum memutuskan maju sebagai wakil bupati periode 2017—2022 mendampingi petahana Ramly Umasugi, dia tercatat sebagai anggota Polri yang menguasai olahraga menembak dan bela diri. Dia memperoleh gelar sarjana hukum dari UMI Makassar.

Pertemuan itu diawali dengan perkenalan diri oleh Bang Arie, Mas Octa, Mas Rumihin, dan sang sastrawan. Selanjutnya, kami menjelaskan perihal program Sastrawan Berkarya ke Daerah 3T, apa yang akan dilakukan sastrawan, dan apa hasil yang hendak dicapai. Wakil bupati menyimak dan menyatakan apresiasinya. Ia mengakui bahwa sebagai daerah 3T, Kabupaten Buru memerlukan perhatian dari berbagai kalangan, termasuk sastrawan yang dipercaya bisa menggugah orang untuk peka akan kebenaran.

“Tulislah daerah kami dengan segala plus minusnya. Kabarkan kepada dunia bahwa kami di Pulau Buru baik-baik saja,” katanya berfalsafah, bahkan ia menawarkan salah satu kamar di rumah dinasnya untuk saya tempati.

Saya merasa tersanjung seraya merasakan ada beban dan harapan tergantung di pundak.



Guru bantu di halaman Kantor Dinas Pendidikan

Kami tidak lama bertemu. Setelah berfoto bersama, kami pamit. Tamu-tamu di luar sudah antre menunggu. Kami harus tahu diri. Kami bersiap ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Buru. Kebetulan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Hamzah K., sedang berada di kantor bupati. Wakil bupati memanggilnya. Lalu, bersama sekretaris, kami menuju Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Buru di Jiku Kecil. Kantor tersebut agak masuk ke dalam melewati jalan berbatu, tetapi tidak ada papan petunjuk di tepi jalan. Bagi orang yang belum tahu persis, letak kantornya pasti akan terlewat.

Tidak semua kantor dinas merupakan kantor yang baru. Pemkab Buru dengan baik memfungsikan beberapa gedung lama. Kantor Dinas Pendidikan yang kami datangi sebelumnya adalah kantor Kegiatan Sanggar Belajar (SKB) dan SKB sendiri dipindahkan ke bekas SD Tionghoa di kawasan kota lama. Meskipun demikian, hal itu tidak mengurangi aktivitas dan pekerjaan di kantor tersebut. Pada hari kami datang, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Buru sedang sibuk-sibuknya menerima kedatangan puluhan guru bantu yang akan ditempatkan di seluruh Kabupaten Buru.

Ternyata, kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru definitif belum dilantik. “Pelantikannya sepekan lagi,” kata Pak Sekretaris. Ia kemudian memperkenalkan kami dengan Kepala Sesi Nilai Budaya, Pak Sulaiman Masbait yang akan mendampingi saya selama di Kabupaten Buru. Pak Sulaiman juga sudah sering berkontak dengan Kantor Bahasa Maluku, khususnya dengan Mas Rumihin untuk beberapa kegiatan. Akan tetapi, uniknya, Mas Rumihin dan Pak Man belum pernah bertemu, kecuali melalui percakapan di telepon.

“Wah, ini toh Pak Man,” kata Mas Rumihin.

“Ha ha, ini, ya, yang namanya Pak Arie,” jawab Pak Man.

Mereka beranggukan. Saya cukup bersalaman.

Pak Sulaiman Masbait termasuk pendiam. Ia putra Buru kelahiran Ilat, Kecamatan Batubual. Dia berjanji bahwa malamnya dia akan mengunjungi saya di hotel untuk berdiskusi tentang apa saja yang saya perlukan.

Di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Buru terdapat sebatang pohon ketapang besar. Kami duduk berteduh di bawahnya. Tiba-tiba, ingatan saya melayang pada catatan Pram dalam *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu*. Jiku Kecil! Cukup sering Pram menyebut nama itu dalam catatannya, bahkan ada satu bab khusus tentang Jiku Kecil karena di sinilah dulu penjara bagi tapol yang dianggap bermasalah di inrehab atau unit-unit Waeapo. Mereka yang akan dikirim ke Jiku Kecil menjalani “pembinaan”. Kadang-kadang, konotasi “dijikukecilkan” sama dengan ungkapan “disukabumikan” pada masa Orde Baru.

“Di mana penjara Jiku Kecil, Pak?” tanya saya secara tiba-tiba kepada Pak Man.

“Ya, di sini,” jawabnya menunjuk tapak kantornya. “*Tapi* bangunannya sudah tidak ada. O, ya, Jiku itu artinya pojok atau sudut. Jadi, ini pojok kecil.”

Saya tercengang. Pak Man yang pendiam, kali ini malah bercerita tanpa beban bahwa ia dan stafnya sudah biasa mendengar suara-suara aneh di kantor. Apabila ujian

nasional akan diselenggarakan, ada staf yang bertugas malam di kantor menjaga soal supaya kerahasiaan soal tidak bocor atau hal-hal lain yang tak diinginkan. “Nah, saat itulah sering terdengar suara dan bayangan berkelabat,” katanya tenang.

“Apakah suara para pesakitan atau roh-roh yang penasaran, *wallahualam*,” katanya kalem.

Di atas mobil yang kemudian bergerak meninggalkan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Buru, saya saksikan masa lalu Jiku Kecil telah ditelan oleh pertumbuhan kota baru.

“Ke mana sekarang, Pak?” tanya Bang Mus memecah lamunan.

“Cari warung ikan bakar yang enak,” jawab Bang Arie.

Soal warung ikan bakar yang enak, Bang Mus tidak bertanya lagi. Delapan tahun jadi sopir travel di Namlea, ia tahu tempat paling pas untuk goyang lidah: Warung Angin Mamiri di Jalan Dermaga. Menilik namanya, mungkin pemiliknya orang Makassar dan lokasi jalan menunjukkan dekat pelabuhan. Pekerja warung ini berasal dari beberapa daerah. Seorang di antaranya gadis manis asal Banyuwangi. Ia tertarik melihat majalah *Burumagz* yang saya bawa. Saya berpikir Dinas Pariwisata Kabupaten Buru perlu membagikan majalah semacam ini ke warung makan untuk dibaca pelanggan ketika pelanggan menunggu pesanan. Informasi tentang lokasi-lokasi hotel kabarnya sudah dibagikan.



Warung makan Angin Mamiri

Warung Angin Mamiri terlihat sederhana. Dindingnya terbuat dari bambu beratap rumbia. Meja dan kursinya dari kayu biasa. Di sampingnya ada dua gazebo. Meskipun demikian, berbagai ikan segar tersedia lengkap. Ada kakap, baronang, sapu-sapu, tuna, tongkol, kerapu, dan entah apa lagi. O, ya, ada juga kerang, udang, dan cumi-cumi. Tinggal dipilih dan minta diolah sesuai dengan selera: bakar, goreng, atau kuah kuning. Sayurnya kangkung yang dicampur dengan bunga pepaya. Minuman es buah, kelapa muda, dan jus, terasa segar belaka di tengah terik cuaca.

Papeda, olahan sagu khas Maluku, juga ada. Yang tak terbiasa memakannya akan merasa sedikit “aneh” karena keencerannya di bawah bubur, tetapi lengketnya seperti lem. Jangankan memakannya, mengambilnya saja saya kesulitan, tetapi saya ingin mencoba. Bang Arie membantu saya. Ternyata, ada caranya, yakni melilitkan papeda pada

sendok. Lalu, papeda diangkat pelan-pelan ke piring. Papeda disantap dengan kuah kuning ternyata mantap nian.



Hotel Grand Sarah

“Sewaktu Presiden SBY berkunjung ke Pulau Buru, beliau juga menginap di sini,” begitu kata Bang Mus, saat mengantar kami ke Hotel Grand Sarah. Saya merasa hotel ini memang cukup megah apabila dibandingkan dengan beberapa hotel yang sempat kami pantau. Hanya saja, kesannya kurang terawat, tanaman pagar mulai merimba, penyejuk udara berdengung, dan keran rusak. Ketika kami datang, beberapa tukang sedang melakukan perbaikan.

Apa pun namanya, menginap di sini adalah bonus menatap kota lama Namlea dari ketinggian. Kubah masjid di kejauhan. Rumah-rumah yang padat sampai ke tepian teluk.

Di dermaga tampak sebuah kapal sandar yang menunggu keberangkatannya besok atau lusa. Rumah-rumah tidak hanya merapat ke sisi teluk dengan tiang-tiang penyangga di atas air, tetapi juga merapat ke sisi bukit. Di sekitar Hotel Grand Sarah, di tepi jurang, terlihat beberapa rumah yang mempunyai jalan setapak di lereng dengan tangga yang panjang. Hal itu mengingatkan saya kepada kampung Bung Hatta di Bukittinggi.

Segelas kopi menghangatkan saya. Rasanya malas beranjak dari gazebo, kecuali untuk mandi dan beristirahat siang. Sore menjelang malam kami sudah kembali *nongkrong* di situ, sampai lampu-lampu dinyalakan dan kota lama Namlea bermandi cahaya.

Karena tuntutan makan mamlah, kami mesti berjalan kaki ke Simpang Lima. Kami melewati pemakaman umum yang luas dan bersih di kiri dan kanan jalan. Sebuah rumah besar bercat putih cerlang—rumah ketua DPRD, tunjuk Mas Rumihin—saya bayangkan seperti rumah Pablo Neruda di Cili sana, dalam film *Il'Pastino* yang *ciamik*. Pasti enak juga tinggal di situ untuk menulis, pikir saya.

Kami sampai di Simpang Lima dan disambut penjual durian, langsung, dan manggis di tepi jalan. Dalam bulan-bulan ini, Pulau Buru sedang merayakan musim buah. Kedatangan yang tepat saya rasa.

”Mari mampir! Murah, murah!”

“Tiga buah, lima belas ribu!”

“Yang kecil, tiga sepuluh ribu!”

Kami pun tergoda. Tanpa aba-aba kami jongkok bersama-sama di depan durian yang menguarkan aroma harum sengak.

“Ini durian dari Pulau Manipa, Pak, baru tiba,” kata seorang ibu di depan seongkok besar duriannya.

“Ini dari Namrole, Buru Selatan, tidak asin kena air laut,” kata penjual lain, seorang bapak sambil menyipitkan mata, menggoda si ibu yang barusan menyebut Manipa.

Dari mana pun, bagi saya sama saja. Ukuran duriannya terbilang kecil, tetapi isinya padat dan bijinya lonjong. Dagingnya cukup tebal. Rasanya manis dan kenyal serupa mentega. Dalam *nongkrong* yang sebentar kami sudah menggasak enam durian, bayarnya hanya dua puluh lima ribu rupiah.

“Wah, kalau di Jakarta bisa bangkrut kita,” kata Bang Arie. Doktor linguistik lulusan Universitas Indonesia itu lumayan menggandrungi durian. Ia kemudian cerita tentang durian bangkok yang buahnya besar-besar, tetapi soal rasa belum tentu lebih “paten” daripada durian lokal kita. Maklum, ia pernah mengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di Thailand Tengah dan Thailand Selatan selama beberapa semester.

“Bagaimana dengan gadis-gadisnya, Bang?” sela saya.

“Ah, ya, sama saja! Salah-salah malah dapat waria,” jawab Bang Arie.

Kami semua tertawa seolah kandungan alkohol pada durian mulai bekerja dalam darah. Namun, kandungan alkoholnya tidak bakal memabukkan. Oleh karena itu, saya

tuang air mineral ke dalam kulit durian dan saya minum. Begitulah perintah orang-orang tua dulu di kampung saya supaya perut tetap *adem*. Memang terbukti perut kami *adem* semua. Sehabis menyantap durian, kami berhasil menenangkannya dengan ayam bakar di sebuah warung makan.

Ketika kembali ke hotel, saat saya naik ke kamar di lantai atas, terdengar suara tawa dari “pasukan” saya di lobi. Rupanya, Pak Man yang datang mencari saya disambut Bang Arie yang dengan yakin bilang, “Berkas kami tolong siapkan, ya, Pak.”

Pak Man mengira berkas itu brosur dan bahan-bahan untuk sastrawan. Dengan niat baik ia anggukkan kepala sambil *bilang*, “Oke, Pak, saya siapkan!”

“Jangan lupa stempel, kalau ada. Oh, ya, berapa sudah total biaya selama beberapa hari ini?”

Pak Man mulai merasa tak *nyambung*. Mas Rumihin pun tampak bingung melihat reaksi Pak Man. *Oala*, ternyata Mas Rumihin menganggap Pak Man itu Bang Mus! Postur tubuh mereka yang mirip, membuat anak buah Dr. Asrif—Lepala Kantor Bahasa Maluku—itu masuk dalam sinetron singkat “Bapak yang Tertukar”!

Suatu sore kami diantar Bang Mus ke Pantai Merah Putih di kota lama Namlea. Ia tertawa terbahak-bahak diceritakan perihal ia yang tertukar dengan Pak Man. “*Kenapa bisa begitu?*” katanya.

“Efek makan durian mungkin,” jawab Mas Octa. Mas Rumihin garuk-garuk kepala.

“Itu pertanda bahwa sesama orang Maluku kalian harus sering-sering kumpul, supaya tidak lupa,” kata saya membuat tips kecil.

“Betul!” sambut Mas Rumihin. “*Kitorang basudara; mangan ora mangan ngumpul...*”

Semua tertawa. Suasana *gayeng* berlangsung sampai ke pantai. Jika disambut segelas *saraba*, pasti tambah *gayeng*. Sesore itu belum satu pun warung yang buka meskipun meja dan kursi sudah tertata di sepanjang pantai.



Pantai Merah Putih

Seorang pemilik warung, Pak Taslim, menjelaskan bahwa warung akan buka selepas Magrib, demi menghormati program Pemda Buru, Gerakan Magrib Bupolo Mengaji (Gelora). Gerakan ini diluncurkan pada tanggal 10 Juni 2015 saat Ramly Umasugi menjabat sebagai bupati pada periode pertama. Ini program yang bagus. Jadi, layak dipertahankan untuk periode kedua, bahkan menurut saya pantas dipertahankan oleh siapa pun pemimpin Buru.

Kami memutuskan untuk berjalan-jalan saja di tepi pantai. Apalagi suasana senja di Pantai Merah Putih benar-benar menggoda. Cahaya keemasan matahari menyepuh permukaan teluk yang tenang. Sesekali ketika angin senja bertiup, permukaan teluk beriak dan berkecipak halus di bebatuan karang.

Pantai Merah Putih terletak di sebelah Pelabuhan Namlea. Kawasanya sudah ditata dengan jalur pedestrian, bangku-bangku, dan taman. Hanya saja karena masih baru mengalami penataan, pepohonan belum tumbuh tinggi sehingga terkesan gersang. Warung-warung penjual makanan dan minuman berderet di seberang jalan yang terbentang di garis pantai.

Di sini tersedia panganan roti bakar, pisang goreng, dan makanan berat, seperti nasi goreng dan lalapan. Harganya cukup terjangkau, yakni rata-rata Rp10.000 untuk minuman, kecuali bila *guraka* dan *saraba* ditambah telur ayam kampung harga menjadi Rp20.000. Harga makanan rata-rata Rp20.000. Pengunjung tidak harus antre memesan. Anda cukup memilih pesanan di daftar menu. Petugas warung akan mengantarkannya buat Anda.

Apa yang disebut warung sebenarnya adalah rumah-rumah penduduk di sepanjang jalan pantai yang memfungsikan depan rumahnya sebagai dapur untuk mengolah berbagai kuliner. Hal ini membuat keuntungan tersendiri. Pemda tidak perlu repot menata bangunan tambahan di sepanjang pantai. Pemilik rumah tidak perlu repot mengangkut barang dagangan dengan gerobak. Nilai ekonomis destinasi wisata dirasakan langsung oleh warga setempat.

Begitu azan Magrib berkumandang dari menara masjid di ujung pantai, terdengar pula raungan serine dari arah kota. Semula kami tidak tahu apa yang terjadi. Ternyata, itu mobil satpol pamong praja. Salah seorang petugas satpol pamong praja mendekati saya dengan simpatik.

“Mohon maaf, Bapak, waktu Magrib kami minta untuk tidak bermain di pantai dulu. Persoalan Bapak ke masjid atau tidak, itu urusan pribadi, yang penting buat contoh bagi anak-anak kita.”



Gerakan Bupolo Magrib Mengaji

Dari situlah saya kemudian mengerti bahwa satpol pamong praja akan berpatroli setiap Magrib menertibkan masyarakat yang masih ada di tempat-tempat umum. Gerakan Bupolo Magrib Mengaji (Gelora) mengharuskan warga setiap pukul 18.00—19.00 tidak berada di tempat-tempat umum. Anak-anak berangkat ke masjid untuk salat berjemaah dan mengaji. Ini tak hanya berlaku di Kota Namlea, tetapi seluruh Kabupaten Buru. Hal ini mengingatkan saya pada program Jam Belajar Masyarakat di tempat saya tinggal, Yogyakarta. Sangat efektif untuk melawan godaan televisi pada jam-jam *prime time*.

“Maaf, Pak, saya orang baru di sini, jadi belum tahu,” kata saya yang disambut senyum ramah petugas.

Saya kemudian melangkah menuju masjid, sambil membayangkan Perda Syariat di Nanggroe Aceh Darussalam. Saya tidak ingin aturan begini masuk ke tataran perdebatan apalagi bersifat kontroversial—katakanlah atas nama kebebasan dan hak pribadi—sebab saya melihat kemaslahatannya sangat besar bagi masyarakat, terutama generasi muda.

Saat sampai di masjid, saya mencari tempat sarung dan mukena yang biasanya tersedia bagi orang yang sedang di dalam perjalanan (musafir). Hal ini lazim disediakan di dalam masjid-masjid di Jawa sehingga saya melenggang santai ke masjid meskipun dengan celana pendek. Maklum, tadinya saya mau ke pantai. Sayang sekali, masjid tidak menyediakan sarung dan mukena apalagi masjidnya di kawasan wisata pantai yang banyak pengunjungnya. Saya kira ini perlu diwujudkan oleh pengurus masjid.

Apa akal? Saya dekati seorang jemaah untuk meminjam sarung. Orang itu segera berbalik pulang untuk mengambilkan pinjaman saya. Cukup lama ia baru datang kembali, mungkin rumahnya cukup jauh. Saat ikamah, barulah ia datang dengan memberikan selebar sarung kepada saya, "Ini saya berikan untuk Bapak," katanya. Oh, mungkin karena ia agak lama tadi, dia mesti mencari atau memilih barang yang dengan ikhlas ia sedekahkan. Saya ucapkan terima kasih dengan haru.

Saat kembali ke pantai dengan memesan makan dan minuman, Pak Man menelepon saya. Ia mengundang saya untuk datang ke rumahnya. "Ada selamatan khitanan anak," katanya. Pak Man mempunyai lima anak: empat anak laki-laki dan satu anak perempuan. Rumahnya berada di belakang Kampus Iqra.

Saya dijemput adik Pak Man. Akibatnya, nasi goreng dan *saraba* (minuman rempah) yang saya pesan terpaksa saya tinggal. "Tak apa. Toh di tempat kenduri nanti akan ada makan besar," pikir saya. Di rumah Pak Man para tamu sudah datang. Pemimpin doa adalah ayahnya sendiri yang baru tiba dari kampungnya di Ilath.

Saya terbayang kenduri di tempat saya di Yogya. Biasanya, tuan rumah mengundang orang se-RT. Berdoa lalu makan. Pulangnya membawa bingkisan dalam besek yang lazim disebut *slametan*. Namun, di sini hanya beberapa orang saja yang datang, tidak lebih dari sepuluh orang. Saya tidak tahu apakah Pak Man membatasi undangan atau lantaran sistem sosial yang bergeser. Ini mengingatkan saya pada Namlea, bagaimana pun, adalah sebuah "kota" yang wataknya bisa berubah. Entahlah.



Selamatan khitanan anak

Selesai berdoa, para tamu minum teh sebentar. Saya kira akan ada acara makan-makan. Akan tetapi, hidangan yang ditunggu tidak datang, kecuali piring-piring penganan ditaruh di depan undangan. Kemudian, masing-masing orang memasukkan sendiri makanan yang terhidang di depannya itu ke dalam kantong plastik yang sudah tersedia di balik piring. Lantas, pulang! *Lha*, makannya kapan? Tidak ada acara makan-makan ternyata! Saya kembali diantar ke Pantai Merah-Putih dan melanjutkan menyantap nasi goreng dan *saraba* yang sudah dingin.



Universitas Iqra Buru

Silaturahmi kami berikutnya adalah ke Rektor Universitas Iqra. Boleh dikatakan kunjungan ini di luar agenda dinas. Berawal dari telepon Dr. Asrif, kepala Kantor Bahasa Maluku. Ia memberi tahu bahwa di Namlea terdapat sebuah universitas yang memiliki Fakultas Sastra.

Informasi itu cukup mengejutkan, sekaligus menggembirakan bagi saya. Saya minta nomor kontak siapa yang bisa dihubungi di sana karena kami ingin berkunjung. Ia memberi nomor kontak Dr. Muhammad Sehol, mantan rektor, yang berlatar ilmu kimia, tetapi berkiprah aktif dalam dunia kebudayaan Buru.

Saat berkontak dengan Pak Sehol, disepakati kami akan dijemput di hotel oleh sopir yang dikirim pihak rektorat. Lokasi kampus di Jalan Prof. Dr. A.R. Bassalamah

yang tidak jauh dari tempat kami menginap. Tidak sampai seperempat jam, kami sudah sampai di tujuan. Bangunan kampus terbilang sederhana, sekilas seperti kompleks sekolah satu atap. Lokasi lahan yang luas memungkinkan bangunan itu bertambah atau diperbesar. Salah satu bangunan cukup besar tampak sedang dikerjakan di sudut lahan.

Saat kami datang, malah Pak Sehol tidak bisa datang karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ia ditinggalkan. Kami disambut ramah oleh Pak Mudakhir, Rektor Universitas Iqra yang masih muda. Dia lama tinggal di Gresik dan menikah dengan perempuan Lamongan. Dalam hitungan bulan ia akan diwisuda untuk memperoleh gelar doktornya di UIN Syarif Hidayatullah.

Universitas Iqra' merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Sastra (Sastra Indonesia dan Sastra Inggris) di lingkungan Kopertis XII/Maluku. Ada Fakultas Sastra di Universitas Khairan Ternate yang masuk lingkungan Kopertis XII/Maluku Utara. Sementara itu, Universitas Pattimura Ambon tidak mempunyai Fakultas Sastra. Sewaktu universitas pertama di kawasan timur tanah air didirikan, yakni Universitas Udayana Denpasar, Presiden Soekarno memerintahkan Fakultas Sastra yang harus dibangun terlebih dahulu. Secara maknawi, ini jelas filosofis dan interpretatif bahwa modal utama membangun suatu kawasan adalah nilai-nilai budaya, seni, dan humaniora. Jika SDM kuat, SDA akan terkelola dengan baik dan bijaksana.

Pak Mudakhir kemudian bercerita tentang sejarah kampus. Waktu konflik Maluku meletus tahun 1999, banyak mahasiswa asal Buru dan sekitarnya tidak dapat melanjutkan pendidikan. Melihat situasi menyedihkan itu, pihak Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar berinisiatif membuat kelas jauh di Namlea. Kelas tersebut sangat diminati. Ketika konflik Maluku berakhir, pihak UMI “mengikhlaskan” kelas jauh itu dikelola Yayasan Muslim Buru untuk memperjuangkan terbentuknya Universitas Iqra’ secara otonom di Bumi Kayu Putih.

Sampai sekarang Universitas Iqra memiliki delapan fakultas dan tujuh belas program studi, yakni, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Sastra, Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Agama Islam, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

“Sebagai universitas di daerah, kami memiliki banyak keterbatasan. *Tapi* potensinya kami yakini juga besar,” kata Pak Mudakhir berbicara realitas. Ia mengaku sangat terbantu oleh Pemda Buru yang sangat respek dengan keberadaan kampus satu-satunya di Bumi Bupolo ini.

“Tahun depan, Kabupaten Buru akan menjadi tuan rumah MTQ Tingkat Provinsi Maluku. Sebagai kampus yang memiliki kompetensi di bidang agama Islam, saya minta Uniqra dilibatkan. Alhamdulillah, bupati merespon dengan mendirikan gedung baru yang nanti dijadikan salah satu titik pelaksanaan perhelatan MTQ.”



Pembangunan gedung baru di Uniqra

Pak Mudakhir juga menyatakan bahwa mahasiswa Fakultas Sastra saat ini sedang gamang. Penyebabnya adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan baru saja membuka Program Studi Sastra Indonesia dan Sastra Inggris. Nah, mahasiswa Fakultas Sastra merasa prodi baru itu lebih menjanjikan karena membayangkan lulusannya bisa terjun menjadi guru.

Untuk menjawab sedikit kegamangan itu, kami sepakat mengadakan acara pertemuan dengan mahasiswa dan dosen sastra. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian kegiatan itu terselenggara dan dibuka Dekan Fakultas Sastra, Bapak Ali Masudin, S.Pd. Hadir juga Dr. Sehol yang memantik diskusi.



Diskusi sastra di Uniqra

Saya mencoba menjelaskan tentang “dikotomi” sastra yang menjadi sumber kegamangan mereka. Sastra sebagai “ilmu murni” dan pendidikan sastra sebagai “ilmu terapan” memiliki ruang masing-masing yang tidak saling mengancam. Hal itu justru harus bekerja sama. Alhamdulillah, mahasiswa dan para dosen yang hadir segera mengerti. Banyak pertanyaan menarik muncul dalam acara itu, sebagaimana menariknya mereka menampilkan musikalisasi puisi “Selamat Pagi Indonesia” karya Sapardi Djoko Damono.

“Musikalisasi puisi kalian bagus,” puji saya karena memang itu yang saya rasakan. Standar sederhana saya menilai bagus tidaknya musikalisasi puisi salah satunya,” puisinya sampai, musik tidak menjajah puisi.”

“Artinya, saya ingin mengatakan bahwa kalian punya potensi besar dalam musikalisasi puisi, setidaknya sebagai *wong Ambon*, Maluku, musik makanan keseharian kalian. Tinggal bagaimana kalian memadukannya dengan puisi.”

Saya terus berusaha memunculkan potensi yang mereka miliki dan kemungkinan untuk dikembangkan. Satu potensi lagi yang menarik adalah “Jelajah Literasi” di Buru dan sekitarnya sebab dalam dunia sastra, Pulau Buru sudah dikenal luas sebagai tempat lahirnya karya-karya Pramoedya Ananta Toer. Selain Pram, banyak sastrawan dan penulis lain yang juga pernah tinggal di Buru, seperti Rivai Apin, Hersi Setiawan, Amarzan Lubis, Hasjim Rachman, Joesoef Isak, dan lain-lain.

“Ini potensi luar biasa yang tak dimiliki Fakultas Sastra di tempat lain. Kalian bisa menjelajahi lembah Waeapo tempat Pram melahirkan karya besarnya; bisa mencari tempat-tempat yang disebut *Beb Vuyk* dalam novelnya, yang disebut *Pigaffeta* dalam catatannya atau *Wallace* dalam bukunya, dan lain-lain.”

Saya juga menganjurkan kampus bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Buru atau Dinas Pendidikan Kabupaten Buru untuk membuat program Jelajah Literasi yang akan menyambangi “*tempat-tempat imajiner*” di Pulau Buru. Mahasiswa Fakultas Sastra Uniqra bisa memetakan tempat-tempat tersebut, sebagaimana Michael Pearson memetakan tempat berkarya sastrawan Amerika dalam bukunya, *Tempat-Tempat Imajiner* (2006). Mahasiswa Fakultas Sastra pula yang saya bayangkan jadi pendamping bagi tamu-tamu yang berminat.

“Jika bekas tempat *shooting* Laskar Pelangi di Belitung saja ramai pengunjung, masa tanah kelahiran *Bumi Manusia* tidak?”

Untuk diketahui, pemerintah sekarang mulai memperhatikan situs sastra sebagai destinasi wisata dan sejarah. Belum lama ini ada berita bahwa rumah kelahiran Pramoedya di Blora akan dipugar dan dijadikan sebagai situs literasi tanah air. Uniqra bisa menjalin kerja sama dengan pengelola rumah Pram.

“Nama Iqra’ yang melekat pada kampus ini sudah menyiratkan dunia literasi. Kata *iqra’* berarti ‘bacalah’. Nah, hal itu bisa diwujudkan sebagai konsepsi literasi di Buru. Saya bayangkan, Fakultas Sastra Uniqra suatu waktu bisa jadi perantara rekonsiliasi di antara ideologi-ideologi sastra yang pernah ada.”

Saya juga menyarankan mahasiswa di kampus atau di luar kampus mendirikan sanggar atau komunitas sastra dan teater. Di dalam kampus bisa diwadahi oleh UKM (unit kegiatan mahasiswa) dan di luar bisa dilakukan mahasiswa bersama masyarakat. Saya mencontohkan ada Sanggar Fantastic di Kota Baubau yang digerakkan oleh mahasiswa Universitas Dayanu Ikhsanuddin. Komunitas tersebut sangat hidup dengan aktivitas sastra dan teater di ruang-ruang publik kota Baubau.

Tidak kalah pentingnya adalah dirintisnya taman bacaan di sejumlah tempat di Namlea dan sekitarnya. Dewasa ini, gerakan literasi nasional menjadikan taman bacaan sebagai ujung tombak literasi di pelosok tanah air. Ada gerakan Pustaka Bergerak dengan berbagai moda

transportasi modern dan tradisional. Pulau Buru yang punya sejarah literasi panjang harus ikut ambil bagian, terutama dimulai oleh para mahasiswa yang telah tercerahkan.

Apa yang saya kemukakan sebenarnya lebih bersifat dorongan. Universitas Iqra Buru sendiri sudah mengupayakan beberapa hal yang mengantar mereka meraih sejumlah prestasi seperti Pemenang Debat Bahasa Inggris Tingkat Nasional dan Pertukaran Mahasiswa Indonesia-Kanada (2008).

Demikian pula Pemda Buru di sisi lain sedang merancang Gerakan Gemar Membaca. Gerakan ini terutama menyasar sekolah dengan lebih dulu melengkapi koleksi perpustakaanannya. Pemda Buru juga ikut mendorong Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku (LKDM) menyusun Kamus Bahasa Buru yang menghimpun sedikitnya 4.000 kata. Semua upaya tersebut menjanjikan harapan yang lebih baik bagi dunia literasi Pulau Buru.

Namlea II

Setelah semua urusan “formal kenegaraan” selesai—para pendamping juga sudah bertolak pulang—barulah saya punya waktu lebih intens mengamati geliat Kota Namlea.

Sekilas, tidak ada yang istimewa dari Namlea. Setidaknya, suasana yang sama—kecuali pohon kayu putihnya—pernah saya temukan di sebuah kota lain yang juga jauh di pulau, di utara tanah air: Melonguane.

Kota tersebut terletak di Pulau Karakelang, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara. Saya berkunjung ke Talaud ketika daerah itu belum lama berpisah dengan saudara kembarnya, Sangihe, yang berpuluh tahun mewarnai nama geografis di peta nasional kita: Sangihe-Talaud. Ibu kotanya ketika itu adalah Tahuna, yang terletak di Sangihe atau Sangir.

Tahun 2000 atau setahun sesudah Buru, Talaud resmi menjadi kabupaten pula sehingga Talaud mesti membangun ibu kotanya sendiri, atau lebih tepat, membangun kota sendiri. Meskipun di pinggang Karakelang ada sebuah kota tua peninggalan Portugis, yakni Beo, tempat jalanan ditata berjejer lurus dengan galur-galur air yang teratur, pelabuhan, dan sebuah sekolah paling awal di Talaud. Hal itu dianggap kurang memadai dari sisi pengembangan dan pembangunan infrastruktur kekotaan. Maklum Beo berhadapan langsung dengan laut di satu sisi dan bukit-bukit ladang cengkih di sisi yang lain.

Sementara itu, di Pulau Salibabu ada kota kecil lain yang menggeliat hidup, Kota Lirung. Pelabuhanya adalah yang pertama disinggahi jika kita naik kapal dari Manado. Sejumlah bank berdiri meyakinkan di sini. Pasar yang ramai dan menara masjid yang indah serupa pagoda juga hadir di sini. Namun, tampaknya secara politis bukan pilihan karena bangunan-bangunan itu tidak terletak di “pulau induk”.

Oleh karena itu, Melonguane dianggap pilihan tepat karena ia terletak di titik “tengah” kabupaten dan mudah dijangkau dari segala jurusan dan punya lahan yang luas. Saat saya datang, suasananya benar-benar sedang menggeliat: jalan-jalan diaspal, rumah-rumah dan kompleks perkantoran ditata, tata ruang dirumuskan, bandara dibangun, pelabuhan laut dikembangkan, dan lain-lain.

Nah, sebagai ibu kota kabupaten baru, Namlea saya rasakan sama seperti Melonguane. Bertahun-tahun lalu, Namlea dan keseluruhan Pulau Buru, termasuk Pulau Ambalau di selatan, masuk ke dalam Kabupaten Maluku Tengah yang beribu kota Masohi di Pulau Seram. Namlea hanyalah ibu kota kecamatan bagi Kecamatan Buru Utara Timur. Sisanya, Buru Utara Barat memiliki ibu kota Air Buaya dan Kecamatan Buru Selatan memiliki ibu kota Leksula.

Bertahun-tahun Pulau Buru hanya mempunyai tiga kecamatan semata wayang dan pada waktu yang sama Maluku Utara pun masih berupa kabupaten. Jadi, luas Provinsi Maluku waktu itu mencapai 77.871 km² dan 12.655,58 km² di antaranya adalah Kabupaten Buru yang luasnya hampir dua kali lipat Pulau Bali.

Dengan situasi seperti itu, dapat dibayangkan betapa jauhnya jarak dan rentang kendali. Dari Namlea ke Ambon, ibu kota provinsi, kita menumpang kapal cepat atau feri yang memerlukan waktu enam hingga tujuh jam karena pada masa itu, jumlah pesawat masih terbatas. Lalu, perjalanan dilanjutkan ke Masohi sekian jam lagi. Perjalanan itu tentu saja melelahkan. Namun, lapisan masyarakat dan pemerintah daerah yang saya bayangkan juga tak kalah lelah (ah, sebenarnya bergairah!). Ketika tahun 1999, rentang kendali itu dipapas berkat Buru diresmikan sebagai daerah otonom baru. Pada tahun 2008 wilayah Kabupaten Buru berkurang menjadi 4.932 km² karena 3.781 km² di antaranya disahkan sebagai Kabupaten Buru Selatan yang memiliki ibu kota di Namrole.



Kapal ke Ambon

Apa pun, untuk memenuhi syarat otonomi, ibu kota kabupaten harus dibangun. Dalam banyak kasus, pembangunan ibu kota kabupaten baru seiring terbukanya keran otonomi, tidak selalu berjalan mulus. Ada perkara lahan yang tidak mudah diperoleh atau jadi *bancakan*, yakni rebutan daerah mana yang layak jadi ibu kota dan sebagainya.

Kita tahu ibu kota Kabupaten Buton Utara misalnya memicu kontroversi antara Buranga, Ereke, atau Kalisusu. Sama halnya seperti Solok Selatan yang berebut kota kabupaten antara Muarolabuh dan Padang Aro. Semua harus dimulai dari nol: membuka lahan, membangun infrastruktur, membuka sebuah kota baru, seperti yang saya temukan di Kelok Buai, calon ibu kota Kabupaten Renah Indojati, Sumatra Barat, yang sudah disetujui, tetapi belum diresmikan sampai saat ini.

Untunglah, Namlea, kota lama yang sudah teruji waktu yang disebut berpuluh tahun lalu dalam novel, catatan penjelajah, dan kronik kolonial, tetapi tetap “aktual”. Secara “politis” dan historis, Namlea sudah kuat jika bukan kanonik dalam lintasan sejarah Buru. Selain menjadi ibu kota pemerintahan sejak 1919, letak Namlea juga strategis.

Berada tak jauh dari pintu masuk Teluk Kayeli, ke Laut Banda, dengan jalur-jalur Ambon—Makassar—Buton terentang dan terbuka. Selain “jalan raya perairan”—sebagai simbol Negeri Maritim—Namlea juga terhubung anggun dengan kota-kota lain di pesisir dan pedalaman Buru, berkat jalan raya negara atau jalan provinsi yang terbilang baik. Ke barat, seluruh kota-kota kecil di kawasan Pantai Utara Buru bisa direngkuh: dari Waplau, Lilialy, Waimiting,

Waeperang, Waepra, Wamlana, Air Buaya hingga Bara. Ke selatan, dari Waeapo, Waesama sampai Namrole. Ke timur, jalur Kayeli atau Ilat di sebalik pegunungan Batubual lancar dijelang dengan transportasi air, *fery*, atau *speed boat*.



Terminal Namlea

Jadi, tidak ada tuntutan berarti atau protes bahwa ibu kota kabupaten harus di sana atau di sini. Penetapan ibu kota Kabupaten Buru di Namlea berjalan seperti yang dibayangkan. Hanya ada sedikit permintaan masyarakat untuk mempertimbangkan Waeapo atau Mako sebagai alternatif. Dari segi infrastruktur dan tata ruang, boleh juga, tetapi apakah tidak akan mengancam sawah-sawah harapan yang boleh dikatakan satu-satunya di Buru atau sedikit tempat di Maluku? Begitu kira-kira pertimbangan para perintis kabupaten.

Lagi pula Waeapo terletak di lembah pegunungan, yang jauh dari laut. Sungai Waeapo pun kian surut dan

jarang dilayari seperti masa tapol dulu. Tidakkah kurang afdol bagi realitas maritim kita? Saya bayangkan orang-orang mengangguk meskipun kabarnya ada desas-desus untuk mengusulkan Waeapo sebagai kabupaten sendiri.

Situasinya tidak segenting ketika Mamuju ditetapkan jadi ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, saya kira. Waktu itu, Mamuju bersaing dengan Polewali Mandar (Polman) sebagai calon kuat ibu kota, tetapi orang-orang di Mamuju bagian utara yang berbatasan dengan Sulawesi Tengah mengancam akan bergabung ke Donggala jika ibu kota bukan di Mamuju. Polman, kota tua di Mandar, mengalah dan cukup puas sebagai kota perdagangan dan jasa, sedangkan Majene yang sempat pula diusulkan segera di-*branding* sebagai kota pendidikan. Sementara itu, di utara sendiri muncul kota baru, Pasangkayu, sebagai ibu kota Kabupaten Mamuju Utara. Penyelesaian tercapai, hal yang kadang tidak mudah saat eforia otonomi.

Begitulah dengan Buru. Pemerintah tidak kelewat dibuat repot menyediakan lahan dan segala infrastruktur karena Namlea, dengan segala keterbatasannya, bagaimana pun sudah siap dan tinggal menunggu aba-aba. Pelabuhan lama dipertahankan dan pelabuhan baru dibangun. Lapangan terbang dipertahankan. Bandara Namniwel dibangun.

Pasar lama dan terminal lama di kawasan Namlea bawah yang sudah sempit dibuat menjadi pasar dan terminal baru di ruas Jalan Lala. Meskipun kemudian pasar dan terminal itu tidak terpakai, itu soal lain. Kota lama yang padat, di tepian teluk yang sempit, dibiarkan, lalu dibangun

kawasan baru di bagian atas, sepanjang Jiku Kecil—Jiku Besar, Simpang Lima, hingga perbatasan Lala dan Batuboi.

Pada awalnya tentu saja bupati harus berkantor di kantor yang kecil, sebagaimana ditunjukkan Mas Rumihin, staf Balai Bahasa Provinsi Maluku yang sudah beberapa kali membuat kegiatan di Namlea.

“Dulu, inilah kantor bupati Buru,” katanya beberapa hari lalu, persis di lampu merah Simpang Lima. Saya melirik dan membaca bahwa sekarang plang nama kantor itu berubah menjadi kantor Dinas Pendapatan Daerah dan Penanaman Modal.



Bekas kantor bupati Buru di Simpang Lima

Simpang Lima sendiri membuat saya *pangling*. Betapa menakjubkan bertemu ada lima simpang jalan di sebuah kota kecil di timur tanah air. Mengingatkan saya pada Simpang Lima Semarang. Meskipun terdengar berlebihan,

lima simpang jalan ini menunjukkan prospektif sebuah kota, yang akan menjangkau kompleks dan wilayah-wilayah lain.

Apalagi saya lihat di sekitarnya berjejer bangunan yang hidup dengan menjual barang dan rupa-rupa jasa: warung makan, toko sembako, alat tulis kantor, *counter* pulsa, gerai telepon, *laundry*, fotokopi, rental komputer, tempat cuci kendaraan, dan entah apalagi. Sebuah pompa bensin milik Pertamina terlihat ramai diantre. Deretan warung makan pun menyiratkan keberagaman selera asal: sate, ayam lalapan, warung Madura, soto Surabaya, mi Sunda, pecel Lamongan, konro dan coto Makassar, masakan Padang—menyiratkan keberagaman Namlea.

Untuk merasakan langsung denyut kota tua Namlea, saya memutuskan mencari hotel di kawasan pantai dan pelabuhan lama. Memandang kota lama di ketinggian Hotel Grand Sarah memang menakjubkan. Akan tetapi, apa jadinya jika saya tidak memasukinya tanpa menempuh jalannya yang panas dan tanpa menyentuh dinding-dinding rumahnya yang berdebu?

Dari kota atas ke kota bawah terdapat jalan menurun dengan tikungan tajam serupa huruf “S”. Selepas itu, segeralah saya bertemu dengan pusat kota lama Namlea. Inilah pusat kota yang sebenarnya. Inilah “nukleus” itu!

Jalan utama menghubungkan Namlea Atas dan Namlea Bawah



Pasar Namlea

Di sini *setting* utama novel *Beb Vuyk*. Dulu disebut hanya ada beberapa rumah, sisanya hutan pantai dan belantara paya-paya, sekarang lihatlah, semua berbagi ruang yang kian padat. Pelabuhan dengan dermaga ke berbagai jurusan; kapal feri ke Kayeli, *speedboat* ke Batabual, Kaki Air, Sanleko, dan entah ke mana lagi. Sebuah pasar terlihat ramai sehingga penjual dan pembeli meluber ke jalan. Tidak tahu apakah karena sempit, ia terlihat ramai atau karena ramai ia terasa sempit.

Hotel-hotel kecil sederhana berderet di sepanjang Jalan Flamboyan—yang membujur dari pasar hingga pelabuhan, bahkan sebagian hotel masuk ke dalam gang, yang menyorok ke tepian teluk. Bank BRI, BNI, dan BPD Maluku seolah berkumpul jadi satu di ruas jalan yang pendek. Sekolah dan rumah-rumah yang ada di depannya difungsikan sebagai toko, warung makan, kantor desa, dan masjid dan begitu arif berbagi ruang.



Masjid dan pasar ikan Namlea

Sebuah masjid menjulang di belakang pasar. Untuk mencapainya, kita mesti melewati petak-petak los dan barang dagangan. Di belakang masjid saya kira soal bangunan sudah selesai, tetapi ternyata ada pasar ikan yang ditegakkan di atas air seperti gudang terapung. Ironisnya, sebuah bangunan paling besar di Jalan Flamboyan tampak kosong. Bangunan yang dulu sebagai pujasera (pusat jajan selera) Namlea, kini hanya dipakai ruang kecil paling depannya saja untuk apotek. Sisanya terlantar. Toh di tengah perebutan ruang seperti itu sebuah tanah lapang masih tersedia. Itulah Lapangan Pattimura—nama yang sama untuk alun-alun Ambon.

Saya tinggal di Hotel Duta Nusantara yang tidak jauh dari pelabuhan. Hotel bertingkat dua itu memanjang ke belakang hingga hampir menyentuh bibir teluk. Hotel

dalam proses renovasi dengan tukang yang bekerja siang-malam—kadang dibantu dua orang resepsionisnya—tetapi untunglah ketika saya datang, tinggal pengerjaan kecil dan ringan: pemasangan plafon, dekorasi, dan mengecat. Jadi, hal itu tidak mengganggu, apalagi saya memilih kamar di lantai atas. Di berandanya yang menyamping menghadap teluk, angin leluasa berhembus masuk. Suasana sehari-hari terasa sepi, selain tidak banyak yang menginap. Aktivitas warga sekitar seakan berlangsung dalam keheningan. Hanya *speedboat* yang melaju kencang dengan mesinnya yang menderu memecah suasana. Sesekali terdengar teriakan anak-anak yang mandi di pantai. Pada malam hari tepi jalan depan hotel digunakan orang berjualan durian. Setiap malam saya “mewajibkan” diri menyantap minimal sebuah durian dengan alasan menghangatkan tubuh dari angin malam yang dingin.

Setelah masuk lebih dalam ke kawasan kota lama ini barulah saya merasa bahwa di satu sisi ada kesamaan antara Namlea dan Melonguane atau ibu kota kabupaten baru di mana saja, tetapi di sisi lain ada perbedaan yang tidak tergantikan. Ya, kawasan kota lama ini membuat Namlea pasti berbeda dengan Melonguane dan kota mana pun. *Spirit* dan historisismenya mungkin hanya dapat saya temukan di Beo, tetapi tidaklah bisa persis sekali.



Pujasera Namlea

Kawasan kota lama selalu punya “roh” tersendiri yang sudah terbentuk oleh proses sejarah. Seperti kawasan kota lama Namlea ini, rumah-rumah yang mengulur ke bibir teluk dengan tiang-tiang dan jalanan setapak dari papan membutuhkan waktu yang lama untuk eksis. Masjid di belakang pasar dan los pasar ikan yang dibangun di atas air, bagaimana akan tergantikan?

Oleh karena itu, memang alangkah bijaknya Pemda Buru yang telah berusaha melestarikan kawasan kota lama. Itu lebih layak, ketimbang mengutak-atiknya, katakanlah dengan pretensi membuatnya lebih modern—yang acap kali salah kaprah.

Bukankah sikap utak-atik semacam ini yang membuat kota lama di Indonesia binasa? Ia dihancurkan secara

terstruktur atau dibiarkan runtuh pelan-pelan. Beberapa waktu lalu saya baru saja menyurukkan wajah dengan sedih tertahan ketika seorang kawan mengabarkan bahwa kawasan kota lama Kendari sebagian dihancurkan karena pembangunan jembatan layang. Kawasan Pecinan di kota lama Padang sebagian juga masih merana. Kota lama Jakarta dan Semarang sempat lama dibiarkan terlantar, sebelum akhirnya Pemda sadar dan kini mengelolanya jadi destinasi wisata andalan. Tidak ada kata terlambat memang. Kawasan kota lama Namlea dengan gedung-gedung tuanya yang lestari, saya kira, sepantasnya didaftar sebagai cagar budaya (*heritage*) supaya ke depan kawasan ini lebih unjuk gigi sebagai destinasi wisata.

Setiap ada kesempatan saya memutari kawasan kota lama Namlea, baik berjalan kaki, naik becak, naik ojek maupun dengan motor pinjaman Pak Sehol. Tidak pernah bosan-bosannya saya. Kawasannya tidak terlalu luas sebenarnya. Hanya hamparan tanah sempit di tepi Teluk Kayeli yang diapit perbukitan, belakang, kiri, dan kanan. Akan tetapi, dengan penataan ruang yang baik dengan jalan-jalan yang bagus polanya yang kemudian diatur dengan rambu jalan satu arah, kawasan yang sempit itu terasa lapang serta tidak membutuhkan lampu merah. Arus kendaraan mengalir terus, tidak perlu berhenti atau menumpuk di satu titik karena rambu dilarang masuk atau dilarang belok sangat dipatuhi.



Anak-anak mandi di pantai

Tampaknya, semua peruntukan ruang terpenuhi. Jika saja otonomi tidak memberi status ibu kota kabupaten bagi Namlea, rasanya kota lama ini sudah cukup. Namun, karena ibu kota kabupaten bagaimana pun memerlukan kompleks kantor bupati dan perkantoran lain, tentu saja lahan yang sudah padat ini tak mungkin lagi diganggu gugat.

Oleh karena itu, dikembangkanlah kota baru di lahan yang sangat luas di bagian atas dan itu memberi performa yang lebih meyakinkan bagi Namlea secara keseluruhan. Jadi, sekarang Namlea punya kota lama yang lestari dan kawasan kota baru yang sedang tumbuh. Apabila ini berpadu dalam proses yang wajar, watak kota ini ke depan saya bayangkan akan sangat menyenangkan.

Watak dan karakter kota tidak bisa berpindah begitu saja. Itulah sebabnya, di bagian kota atas, kita tidak

akan menemukan moda transportasi becak, sedangkan di jalanan kota lama ada becak meskipun tidak banyak. Apabila hal ini tidak dipantau, katakanlah membiarkan becak berkembang-biak ke kawasan atas, atau sebaliknya, mengusik keberadaan becak di kota lama, akan ada keseimbangan yang terguncang.



Pasar baru Namlea

Ini mungkin hal kecil, tetapi bisa berdampak besar. Ini pula yang terjadi ketika pasar dipindahkan di kawasan atas, yakni di jalan ke arah Lala. Pedagang berkeberatan pindah. Ketika mereka terpaksa pindah, terbukti lokasi pasar tidak bertahan lama. Mereka berangsur-angsur kembali ke tempat semula.

Pembeli pun memilih tetap di pasar lama. Mereka sudah terbiasa dengan pasar yang telah mengalami proses pasang surut sejak moyang mereka. Pasar tidak bisa dipindahkan dengan proses serta-merta. Sekalipun pasar baru lebih *mentereng* dan los-losnya yang lapang dibuat

sesuai dengan peruntukan. Tetap ada yang hilang antara penjual dan pembeli jika perpindahan itu tidak datang dari “dalam”, sebagaimana hakikat keikhlasan berjual beli itu sendiri.

Begitu juga dengan terminal yang dibangun dekat pasar baru, juga ditinggalkan. Orang lebih nyaman kembali ke terminal lama. Sampai kini, baik pasar maupun terminal yang dibangun cukup megah itu, terbengkalai. Barangkali ia hanya butuh perawatan untuk masa yang tidak terlalu lama. Apabila waktu sudah memproses segalanya dengan wajar, para pedagang dan pengusaha angkutan—juga pembeli dan penumpang—percaya bahwa akan memilih ke situ lagi.



Jalan yang menghubungkan kota atas dan kota bawah

Bisa jadi, kehadiran pedagang baru dan penambahan angkutan membuat dua bangunan terbengkalai itu bakal kembali terpakai oleh pelaku baru sehingga siapa tahu ke depannya Namlea punya dua pasar dan punya dua terminal. Mengapa tidak. Satu pasar induk, satu pasar desa; satu terminal induk, satu terminal transit—dan jika memungkinkan bisa ditambah terminal barang. Artinya, tak ada yang sia-sia dari apa yang sudah diputuskan Pemda Buru beberapa waktu lalu dengan membangun pasar dan terminal baru.

Akan tetapi, tentu dengan syarat meskipun sekarang belum terpakai. Keberadaannya tetap dirawat, misalnya dengan menyewakan petak-petak toko yang ada di sana dengan harga murah. Jika perlu, disubsidi karena misinya untuk merawat lokasi. Beberapa petak toko saya lihat tetap buka, tetapi jumlahnya perlu ditambah. Dengan diberi semacam paket subsidi, masyarakat mungkin akan lebih banyak yang berminat sekaligus akan banyak bangunan yang selamat. Sekali merengkuh dayung, visi dan misi terpenuhi.

Menjelajah kota lama Namlea, saya kerap berjumpa hal-hal baru, kecil, tetapi menakjubkan. Bagaimana misalnya saya bertemu sebuah sumur di tengah pasar. Sumur tua itu dangkal saja. Orang bisa menciduknya dengan tali ember yang pendek, tetapi airnya yang jernih tidak pernah kering. Saya kira airnya asin atau payau karena sumur itu tak jauh dari laut, tetapi ternyata airnya tawar.



Jual-beli ikan di pantai Namlea

Pedagang pasar memanfaatkan air ini untuk berbagai keperluan. Berwudu, cuci tangan, mencuci buah atau sayur, dan ada juga yang berkelakar, ”Kami minum juga buat obat awet muda,” kata seorang ibu.

“Benar ini, Bu?” tawar saya.

“Eh, Bapak tak percaya. Lihat saja sayur, buah, dan *ikang* yang kami jual, segar-segar semua.”

“*Lho?*”

“*Lha*, kalau jualan saja dicuci jadi segar, apalagi penjual yang meminumnya,” jawab si ibu cepat.

“Lagi pula kami bertahan di sini berjualan tanpa merasa tua. Kalau lihat kami punya uban, itu hanya sebatas kepala. Pikiran tetap muda,” sahut ibu yang lain. Disambut tawa riang bersama-sama.

Saya juga menemukan toko-toko tua yang menjual barang-barang unik, misalnya Toko Nusantara yang menjual tutup botol dan kardus khusus untuk menaruh botol minyak kayu putih.

Di sebuah gang, saya menemukan dua tempat penginapan saling berhadapan. Untuk mencapainya kita harus melewati jalan papan bertiang kayu di tepi air. Jalan itu sendiri berujung ke sebuah pelabuhan kecil tempat bertolak ke Batabual. Riak dan ombak berkejaran, terbantun di tiang-tiang dermaga. Jika laut pasang, lidah air sampai juga memukul tiang kayu di depan penginapan.

Tak jauh dari hotel saya menginap terdapat toko pakaian model distro. Koleksinya lengkap. Ada sepatu, celana, baju, topi, dan tas. Toko tersebut tak kalah dengan distro di kota-kota besar. Ada pun tempat penjualan kaos khusus bertema Maluku dan Buru saya temukan di sebuah toko kecil di jalan arah ke kota atas. Kaos berkonsep oleh-oleh, seperti *Dagadu* di Yogya atau *Joger* di Kuta itu cukup menarik dari segi desain dan tema-tema yang disampaikan, misalnya, tentang kayu putih, keindahan bumi Bupolo, Pantai Jikumerasa, sawah Waeapo, serba-serbi kepulauan Maluku, Ambon Manise hingga pesan damai dan persaudaraan. Pemiliknya seorang bapak berjiwa muda, Azhar, ditemani seorang putranya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama.

Segmen ini sebenarnya berpotensi digarap maksimal, baik tema, desain, maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan ekonomi kreatif. Apa yang saya lihat di kedai kaos Pak Azhar sudah menarik, tetapi belum bisa dikatakan maksimal. Ukuran kaos masih terbatas sehingga saya yang

berminat membeli tidak mendapat ukuran yang pas. Tema-tema keunikan Buru juga belum banyak digali. Selain itu, proses produksi kaos berada di Ambon, bukan Namlea.

Hal menakjubkan lainnya adalah perjumpaan saya dengan sepotong jalan yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Waktu itu, saya berkendara ke terminal yang tak jauh dari pasar. Dari terminal ada seutas jalan yang selama saya di Namlea belum pernah saya tempuh. Saya mengikutinya.

Ternyata, jalan itu melingkar di kaki bukit, sepanjang tepian teluk hingga ke Tanjung Kayu Putih. Namanya Jalan Nametek. Pemandangannya indah dan sejumlah kantor pemda terdapat di ruas jalan ini, termasuk PLN dan Koramil Namlea. Ketika saya ikuti terus, ternyata ke luarnya di Jiku Kecil, persis dekat kantor dinas pendidikan! Oh, ternyata ada tiga ruas jalan yang menghubungkan antara kota atas dan kota bawah; dari yang semula saya duga hanya dua, bahkan satu.

Saya kira jalur keempat mungkin tidak lagi perlukan, setidaknya bukan sesuatu yang mendesak. Pikiran itu timbul saat melihat letak pelabuhan lama dan pelabuhan baru (Pelabuhan Besar) tidak terlalu jauh. Untuk mengunjungi keduanya, orang harus memutar naik ke kawasan atas karena keduanya dipisahkan kaki bukit. Jalan di Pantai Merah Putih sangat mungkin bisa dibuat tembus ke Pelabuhan Besar tempat merapat dan bertolak kapal dan feri ke Ambon dan Makassar. Bukankah kedua pelabuhan hanya dipisahkan oleh kaki bukit yang menjorok ke laut dengan perkampungan dan ujung jalan yang sudah

berada di lereng bukit kecil itu? Tinggal merelokasi sedikit rumah, memapas batu karang, lalu menambah jalan, maka jalur keempat akan tercipta di tepian teluk.

Tampaknya, menurut pertimbangan saya kemudian, kaki bukit itu justru menjadi semacam “karang penghalang” bagi warga kota untuk tidak masuk ke jalur pintas. Dapat dibayangkan, jika warga kota lama dan sebaliknya, hendak pergi ke kedua pelabuhan, mereka tak perlu lagi melewati kawasan atas dan itu berarti mengurangi mobilitas dan dinamisasi sebuah kota. Jasa ojek bisa-bisa mati dan denyut kota akan berkurang karena jalan pintas membuat orang memilih cara mudah.

Sebagaimana yang sudah saya jadwalkan, suatu hari, saya diantar oleh Pak Sulaiman Masbit, Kasi Nilai Budaya Dinas Pendidikan Buru, menyambangi bangunan-bangunan bersejarah di Namlea dan sekitarnya. Dari kantornya di Jiku Kecil, kami langsung meluncur ke kota lama. Saat itulah saya menyadari bahwa selain jalan utama dari Simpang Lima, ada juga jalan di sisi utara yang menghubungkan kedua kawasan kota. Itulah “penemuan” saya pada jalan kedua. Selain itu, “penemuan” jalan ketiga, Namatek, seperti saya ceritakan di atas, secara tak langsung juga bersinggungan dengan Pak Man. Jalan itu tembus ke kantornya.



Lapangan Pattimura Namlea

Kalau begitu, pikir saya sambil bercanda dengan diri sendiri, Pak Man ini sosok “penunjuk” jalan. Ya, seperti hari itu, dialah yang dengan setia membawa saya menempuh jalanan kota ke tempat-tempat bersejarah.

Jalan kedua yang kami tempuh bertemu langsung dengan Lapangan Pattimura atau alun-alun kota lama. Tidak jauh dari situ terdapat bangunan tua peninggalan Belanda. Suasana ini terekam dalam novel Beb Vuyk, “Lewat kampung ini, menuju daratan dan kaki bukit, terletak sebuah rumah putih besar, tempat pejabat pemerintah. Lapangan rumput depan rumah menurun landai ke jurusan pantai, di belakangnya pohon kelapa melambai-lambai dengan latar belakang kehijauan pohon mangga; pinggir lautan membelok ke luar lagi, membentuk sebuah tanjung kecil.”

Kami pun melewati kampung dekat alun-alun itu. Tentu saja, dengan rumah tambah padat, melewati Rutan Namlea, dan sampailah kami di bekas Gedung Sekolah Cina. Gedung itu sekarang difungsikan untuk dua kantor: Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Buru—yang dipindahkan dari kantor Pak Sulaiman—dan Kantor UPDT Kecamatan Namlea.



Bekas SD Tionghoa

Kami disambut Edi Suprpto (34 tahun), seorang pamong belajar di SKB Buru. Lelaki ramah itu membuka pintu-pintu serta menunjukkan bagian-bagian bangunan yang masih asli. Ia menguasai dengan baik sejarah kantornya.

Bangunannya sendiri tidak terlalu besar. Halamannya juga agak mepet ke tepi jalan. Aura sebagai bangunan tua yang telah menempuh perjalanan waktu terasa dari kekokohnya. Tiang-tiang kayu, kusen jendela, dan daun pintu masih kayu asli, yakni kayu besi Buru dengan teknik

cincang. Teknik cincang dikenal sebelum orang mengenal mesin serut bermesin. Teknik tersebut mengandalkan kapak atau beliung untuk mencacah pohon yang bundar sehingga menjadi pipih atau balok.

Meja-meja kayu yang disusun di tengah ruangan menambah suasana ke kelampauan. Begitu pula peta di dinding dan globe atau bola dunia di atas meja memperkental nuansa sejarah. Hanya ada bagian kecil yang ditutupi triplek sebagai sekat untuk memenuhi kebutuhan ruang di SKB dan UPDT. Kemudian, yang sudah pasti adalah gentengnya yang diganti beberapa kali karena pada bangunan tua biasanya memang selalu ada yang harus diperbarui, khususnya bagian atap yang bocor atau lapuk.

Setelah meminta diri, kami melanjutkan perjalanan ke arah pasar Namlea. Persis di tikungan sudut pasar, terdapat bekas Kantor Residen Belanda—yang disebut *Beb Vuyk* dalam novelnya. Ketika Buru masih merupakan bagian dari Kabupaten Maluku Tengah, gedung ini menjadi Kantor Camat Buru Utara Timur. Saat Buru menjadi kabupaten, gedung ini menjadi rumah dinas Sekda Buru, kantor Polantas, dan sekarang menjadi kantor Satpol PP.

Dilihat dari depan, gedung ini sangat cantik. Ukurannya memang tidak terlalu besar. Barangkali sejak dulu sudah disadari ruang Namlea bagian bawah tidaklah terlalu luas sehingga bangunan kecil dianggap cukup dan tidak merampas ruang.

Kami disambut Kepala Bidang Linmas, Arifin Latjo (44 tahun) yang segera membawa saya berkeliling melihat seisi bangunan. Dinding bangunan dari beton yang tebal

sebagai khas bangunan kuno. Namun, ketebalan dan kekokohan itu tidak terkesan “menindih” ruang sebab diimbangi dengan keberadaan tiang-tiang kayu besi yang memunculkan kesan “ringan”. Tiang yang berusia ratusan tahun itu, dicat cerah, dipadu-padankan dengan kayu usuk, bingkai jendela, dan daun pintu yang juga masih asli dari hutan raya Pulau Buru *tempo doeloe*.



Bekas kantor Residen Buru

Tempat ketiga yang kami kunjungi adalah Gedung Kedaulatan di Jalan Flamboyan. Ini saya namakan sendiri mengingat tidak ada nama yang saya anggap pas untuk menggambarkan peranan gedung ini pada masa lalu. Masyarakat mengenalnya dengan nama Gedung PHB, mungkin maksudnya Pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, bisa pula salah sebut dari nama depan Jenderal Hindia-Belanda, H.P.B. Gaspers. Jenderal inilah yang

dianggap “menyerahkan” kekuasaannya kepada rakyat Buru.

Penamaan dan narasi ini jelas problematis. Penamaan harusnya ada standar yang mencerminkan semangat dan kepemilikan sah. Jika namanya diambil dari nama pemerintah kolonial atau dari nama mantan penguasa Belanda di Buru, sisi kesejarahan rakyat Buru seperti dihilangkan. Begitu pula dengan kata “menyerahkan” atau “penyerahan” kekuasaan, seharusnya “merebut” atau “mengambil alih” sebab sejatinya “kekuasaan” itu milik rakyat, bukan milik Belanda apalagi H.P.B. Gaspers.

Ketika gagasan itu saya sampaikan kepada Pak Man, ia sepakat. Ia berjanji dalam waktu dekat akan membicarakannya dengan pihak terkait lainnya.



Gedung Kedaulatan Rakyat Buru

Di gedung inilah dulu berlangsung “pengambilalihan” kekuasaan oleh Adam Pattisahusiwa atas nama Revolusi Rakyat Buru dari H.P.B. Gasper yang mengatasnamakan Pemerintahan Kolonial Belanda. Saya menyebut “pengambilalihan” sebagai perspektif lain pembacaan saya atas prasasti di dinding.

Terkait dengan revolusi rakyat Buru, di depan gedung didirikan monumen tinju terkepal sebagai simbol perlawanan dan kemerdekaan. Di bawahnya tertulis ungkapan Soekarno yang menggelitik saat berkunjung ke Namlea tahun 1957 (Soekarno tercatat dua kali berkunjung ke Buru): INDONESIA TANPA BURU BUKANLAH INDONESIA! Sebuah ungkapan yang perlu renungan tersendiri untuk memaknainya.

Saya berjanji pada diri sendiri untuk mencari makna dari ungkapan menarik itu. Mungkin lain kali. Saat ini, saya fokus memperhatikan fisik bangunan yang tampak kurang terawat.

Gedung ini memanjang dengan halaman yang luas. Halamannya dilapisi *konblok*, bagian depan dipagar besi, dan kiri kanan pagar ditembok. Tampaknya, belum lama dipugar. Karena tidak ditempati, rerumputan mulai tumbuh di celah *konblok*, bahkan di dalam saya temukan banyak pecahan botol. Sekarang gedung digunakan sebagai kantor AMPI, tetapi karena anggotanya jarang beraktivitas di sini, bagian dalam gedung semrawut. Selain pecahan botol, kursi-kursi bergulingan dan meja ditutupi debu tebal. Ruang penuh sawang.



Monumen Tinju Revolusi

Gedung sebesar itu terlalu luas jika hanya digunakan buat satu kantor. Bekas sekolah Cina yang kecil saja digunakan untuk dua kantor. Itu pun dengan jam kantor yang pasti.

“Seharusnya, di sini bisa berkantor beberapa organisasi sekaligus, Pak,” usul saya pada Pak Man. “Kalau anggota organisasi aktif berkegiatan di sini, otomatis gedung akan terjaga kebersihannya.”

“Betul, Pak,” kata Pak Man sepakat lagi.

Kami melanjutkan perjalanan dengan melewati sebuah rangka gereja yang ditinggalkan. Sebenarnya sudah sejak awal saya bertanya-tanya tentang reruntuhan gereja itu. Tiap kali lewat menjelajah kota, hati saya selalu berbisik, apa gerangan penyebab gereja ditinggalkan? Namun, saya tahan bertanya.

Baru hari itulah saya memberanikan diri bertanya pada Pak Man. “Apakah ini bekas konflik Ambon, Pak?” Saya agak menyesal sebab telah mewarnai hari yang indah itu dengan satu kata yang traumatik.

“Bukan,” kata Pak Man “Ini perkara tanah. Gerejaanya sudah pindah dan konon tanah ini sudah ditukar guling.”

Syukurlah, bisik saya dari kalbu terdalam. Konflik Maluku 1999 silam telah menjadi pelajaran bersama. Ujian keberagaman yang tak seharusnya dilupa.

Saya tidak tahu mana lagi gedung tua bersejarah di kawasan kota lama Namlea karena sekilas banyak sekali saya lihat bangunan tua yang menarik, salah satunya bangunan yang hampir runtuh di Jalan Flamboyan. Namun, kata Pak Man, itu tidak termasuk bangunan bersejarah (*heritage*), hanya bangunan tua. Begitu pula sebuah tugu tua dekat lapangan Pattimura menarik minat saya, tetapi kata Pak Man itu hanya tugu peringatan Hari Pramuka. Sebagai Kasi Nilai dan Cagar Budaya, Sulaiman Masbit tentu lebih tahu karena ia punya klasifikasi dan standar tentang itu. Oleh karena itu, saya menurut ketika ia membawa saya melanjutkan perjalanan ke kawasan kota atas.

Namun, sebelum melanjutkan perjalanan kami singgah dulu di Rumah Makan Padang “Ayah”. Sejak

datang ke Namlea, nama rumah makan ini sudah menggoda saya. Ada beberapa warung yang saya lihat bernama sama, tetapi ada penambahan “Ayah Atas” untuk warung yang berada di kawasan atas dan “Ayah Bawah” untuk di kota bawah. Saya duga, warung ini satu jaringan semacam Duta atau Sederhana di Yogya, tetapi bisa pula dikelola oleh satu keluarga. Konon, ketika demam emas Gunung Botak melanda, Warung “Ayah” lebih banyak lagi dari yang semula hanya satu di dekat pasar.

Warungnya bersih dan lapang. Dinding-dindingnya dihias gambar objek wisata Ranah Minang, seperti Danau Maninjau dan Jam Gadang. Sebagai orang Minang, saya berpikir boleh juga ikhtiar perantau Minang ini memperkenalkan objek kampung halamannya. Sebaliknya, dari suara orang Buru saya melihat keberadaan warung ini bisa menjadi bagian dari potensi Bupolo dalam mendukung akomodasi pariwisata. Apalagi masakannya enak dan harganya terjangkau. Benar-benar ayah yang baik, pikir saya. Rasa kasih ayah itu kian terasa ketika air putih dihidangkan meskipun tak dipesan—itu ciri warung Padang yang *asali*. Warung Padang di kota-kota lain mulai menghilangkan tradisi ini. Meskipun terlihat sederhana, hal itu merupakan ciri yang perlu dipertahankan tanpa ikut-ikutan memburu pengunjung dengan sapaan atau desakan, “Minumnya apa, Pak?” Soal minum itu pilihan, tetapi air putih itu keharusan!

Selesai makan, kami bergerak lagi.

“Ke mana sekarang, Pak?” tanya saya.

“Lapangan Terbang Namlea.”

Lapangan terbang peninggalan militer Jepang itu terletak di Desa Lala, tak jauh dari batas kota. Pada masa Perang Pasifik atau Perang Dunia Kedua, Pulau Buru termasuk daerah pertahanan yang sangat strategis bagi Jepang. Karena itu, di lapangan terbang ini banyak ditemukan *bunker*, bangunan perlindungan sekaligus kubu pertahanan.



Lapangan terbang Namlea

Sejenak saya teringat pada novel Pram tentang *junghanfu* di Pulau Buru. Konon judul aslinya adalah *Perawan Remaja dalam Cekraman Militer Jepang*, tetapi ketika terbit, kata *Jepang* hilang.

Seketika saya merinding. Lewat lapangan inilah dulu gadis-gadis dari Jawa dibawa untuk dijadikan budak seksual (*junghu ianfu*) oleh tentara Jepang sebelum diangkut dengan kapal ke Ambon atau Ternate. Ketika Jepang menyerah kalah kepada Sekutu, gadis-gadis itu ditinggalkan begitu saja sehingga mereka dikuasai orang-orang Buru pedalaman. Membayangkannya saya bergidik.

Di sisi kanan jalan masuk Lapangan Terbang Namlea terdapat deretan kios penjual buah-buahan yang terasa segar terlihat di tengah cuaca yang terik apalagi melewati jalan lurus yang membelah padang sabana. Kiri kanan tanaman kayu putih, rumput ilalang, dan tiupan angin santer. Sayangnya, ketika tiba, portal lapangan tertutup dan gardu kosong melompong. Tidak ada seorang pun petugas penjaga, padahal tempat ini merupakan fasilitas militer yang tidak boleh dimasuki sembarangan—sesuai dengan tulisan besar-besar di portal.

Kami hanya masuk sampai ke pelataran dan mengurungkan melihat *bunker* di dalam. Namun, dari sini terlihat bahwa Lapangan Terbang Namlea punya sejarah panjang dan peranan pada masa lampau, termasuk setelah merdeka, tempat ini difungsikan sebagai fasilitas transportasi udara bagi Pulau Buru. Untuk diketahui, Bandara Namnawel baru dioperasikan tahun 2016. Sebelum Bandara Namnawel dibangun, inilah satu-satunya pintu masuk melalui udara ke Pulau Buru. Saya bayangkan, Presiden Soekarno yang pernah berkunjung dua kali ke Buru sehingga Jenderal Sumitro yang datang menjenguk tahanan politik di Waeapo, pastilah datang melewati pintu ini.

Dari Lapter, kami melanjutkan perjalanan ke Pantai Lala. Tujuan kami ingin melihat sumur dan jembatan Australia. Itu memang peninggalan militer negeri Kanguru saat bergabung dengan Sekutu.



Sumur Australia

Setelah melewati perumahan bersubsidi yang tampak dibangun agak jauh dari jalan raya, kami membelok ke kanan. Di jalan arah ke pantai, terdapat Rumah Sakit Umum Daerah Namlea dan bangunan lain tumbuh di sekitarnya mulai warung makan, tempat fotokopi, penatu, kantin, dan lain-lain. Masuk lebih jauh, kami bertemu aktivitas pembukaan lahan dengan bulldoser yang dijaga petugas kepolisian. Ternyata, di sana akan dibangun kantor dan instalasi PLN.

Tampaknya, dalam tata ruang Kota Namlea, Lala akan dikembangkan dengan membangun sejumlah fasilitas penting. Membangun fasilitas tertentu memang menjadi strategi untuk pengembangan wilayah dan pemerataan meskipun kadang tidak mudah. Saya ingat, waktu

berkunjung ke Baubau, Buton, saya diceritakan oleh seorang kawan tentang kritikan sebagian masyarakat saat pemkot membangun rumah sakit umum di atas bukit Paligamata yang sepi dan jauh. Namun, pemerintah meneruskan pembangunan tersebut dan kini terbukti bahwa bangunan tersebut memiliki efek yang besar bagi pengembangan kawasan.



Bekas Tapak dermaga tentara Australia

Sumur dan jembatan Australia terletak persis di batas lahan yang diratakan itu. Mula-mula kami sempat tersesat mencarinya di bagian pantai agak ke barat, di antara jalan bersemak dan pohon kelapa yang menghadap Laut Seram. Pak Man berkeliling mencarinya, bahkan dia sempat menganggap sudah hilang diseret gelombang. Barulah setelah bertanya kepada polisi yang bertugas di pembukaan lahan PLN, kami menemukan apa yang dicari.



Monumen penumpasan RMS di Ubung

Australia merupakan bagian dari tentara Sekutu waktu Perang Dunia Kedua. Tentara Australia bermarkas di Namlea untuk mengamankan jalur laut internasional yang melewati Pulau Buru. Akhir Januari 1942, Jepang menyerang Ambon dan mendarat di Hitu dan Latuhalat. Kemudian, Jepang berlanjut ke Tulehu, Passo, dan Leahari (lihat *Buku Panduan Museum Siwalima*, 2014: 74).

Saya duga, pada periode ini pula tentara Australia di Namlea dapat dikalahkan. Pasukan Belanda dan Australia yang tertangkap Jepang ditawan di Tantai dan banyak di antara mereka yang tewas oleh bom pasukan Sekutu sendiri karena salah sasaran dan kekacauan informasi.

Apa yang disebut jembatan itu sebenarnya dermaga yang memanjang ke laut tempat berlabuhnya kapal perang Australia. Dulu dermaganya masih utuh, tetapi sekarang tinggal bekas kakinya berjejer ke tengah laut. Tepat di pangkal jembatan atau dermaga itulah terletak dua sumur berdiameter 1,5 meter. Itu sumber air bersih pasukan dan keduanya seolah memagar pangkal jembatan sehingga sekilas tampak seperti *bunker* perlindungan.

Saya tak tahu apakah airnya tak asin karena dekat sekali dengan laut. Dulu bisa saja tak terlalu mepet ke laut, tetapi sekarang mulai tergerus. Sumur bagian kiri masih relatif utuh dan lengkap dengan penutupnya. Ketika saya mengintip ke dalam, air tawar masih melimpah, hanya saja sampah botol plastik memenuhi mulut sumur persis bakul pedagang rongsokan.

Hari itu sebenarnya kami akan melanjutkan perjalanan ke Pantai Ubung, melihat Tugu Pendaratan TNI saat menumpas gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) tahun 1958. Namun, telepon Pak Sulaiman berdering mengabarkan bahwa salah seorang keluarga dekatnya meninggal dunia. Dia harus melayat. Saya pun berangkat dalam kesempatan tersendiri besoknya.

Namlea adalah kota yang menyenangkan bagi orang yang mencintai kota-kota kecil seperti saya. Cara mudah menjelajah kota adalah dengan melambaikan tangan dan pengendara motor akan berhenti. Di kota ini, barangkali dari lima sepeda motor, dua atau tiga di antaranya adalah motor tukang ojek.



Masjid Al-Buruuj

Menjelajah kawasan kota atas yang tidak sepadat kawasan bawah, saya bersua nuansa kota masa depan. Taman kota dengan nuansa hutan kayu putih dipenuhi muda-mudi dan keluarga yang bersantai. Masjid Agung Al-Buruuj yang indah dengan kubah birunya. Kompleks kantor bupati yang bersih. Kafe dan restoran. Hotel dan wisma. Perumahan BTN. Gedung-gedung sekolah yang bagus. Tak ketinggalan warung makan yang bertebaran di setiap simpang dan tepi jalan.

Terkait pajak rumah makan, Pemda Buru punya program kecil, tetapi menarik, yakni “Tanpa Struk, Makan Gratis”. Maksudnya, setiap pengunjung rumah makan berhak mendapat setruk resmi dari warung makan. Di situ tertera daftar harga makanan beserta potongan pajak harga makanannya 10 persen. Apabila pihak rumah makan tidak memberikan setruk tersebut, menurut Pemda Buru,

pengunjung berhak untuk tidak membayar makanannya. Saya tidak tahu apakah selama ini ada warung makan yang tidak memberi setruk dan pengunjung menolak membayar. Saya tahu bahwa cara itu cukup cerdas untuk kebaikan semua pihak. Pengunjung mendapat kejelasan mengenai jenis dan harga makanan yang ia pesan, termasuk pajak yang ia bayar (asas transparansi); pihak rumah makan bisa lebih nyaman menyetor pajak (asas partisipasi retribusi); dan pemerintah bisa mengontrol sumber pendapatan daerah (asas akuntabilitas).

Apa yang disebut dengan kota masa depan semakin terasa, demi melihat tata ruang kota Namlea yang luas dan jelas peruntukannya. Ada satu jalan utama yang berkelok dari kota lama, lalu lurus hingga Simpang Lima, kemudian memecah menjadi satu arah ke arah Pelabuhan Baru hingga bertemu cabang-cabang lain. Lahan yang luas berupa sabana berhutan kayu putih cukup bersahabat untuk membangun apa saja.

Ada beberapa bundaran saling silang dengan jalan yang lapang meskipun beberapa dari ujung jalan itu belum dibanahi. Di sepanjang jalan kita akan bertemu rumah-rumah beton yang terbilang bagus dan besar serta berhalaman luas. Sebagian tampak dalam pengerjaan atau dibangun secara bertahap. Dari rumah-rumah yang tegak kita dapat menerka bahwa penduduk kota ini cukup mempunyai untuk urusan tempat tinggal.

Jalan ke pelabuhan dibuat dua jalur, di kiri kanannya tumbuh hotel dan warung makan. Gerbang selamat datang ternyata ada di sini, yakni di laut. Tidak terlalu mencolok memang. Pantas saya tidak melihatnya saat pertama kali

datang karena saya datang dari jalur berbeda. Pelabuhan baru itu sendiri terbilang besar sebagai tempat kapal segala jurusan bersandar dan membongkar muatan. Melihat situasi ini saya tak ragu mengatakan bahwa Namlea merupakan salah satu kota masa depan di timur tanah air!

Suatu siang menjelang sore, cuaca terik berubah lindap. Lalu, tak terduga hujan turun cukup deras.

“Sudah mulai musim timur,” kata tukang ojek yang mengantar saya berkeliling. Musim timur berarti musim hujan bagi orang Namlea. Kami berteduh di sebuah warung kopi.

Tak diduga, belum habis setengah gelas kopi, Simpang Lima langsung tergenang.

“Kalau hujan lebat, ini pasti tergenang, Pak,” kata bapak tukang ojek lagi.

Pembangunan jalan kurang memperhatikan saluran air (drainase). Saya melihat tidak ada satu pun gorong-gorong di tepi jalan, padahal jalan utama yang notabene Simpang Lima merupakan etalase kota. Jelaslah kondisi ini menjadi duri dalam daging bagi sebuah kota yang berhasrat menjadi kota yang nyaman di masa depan. Sebuah pekerjaan rumah bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk menata kembali infrastruktur kota yang belum terukur.



Buku Buru Pulau Raja yang Indah

Salah satu tempat favorit saya dalam kota adalah Perpustakaan Daerah (Perpusda) yang nyaman dekat Simpang Lima. Koleksinya tentu masih perlu terus ditambah karena dalam pengamatan saya masih sangat kurang. Tak urung dari situ, saya mendapatkan buku *Buru Pulau Raja yang Indah* (Bappeda Buru, 2008).

Buku ini berupa kumpulan tulisan tentang keindahan, sejarah, dan pariwisata Kabupaten Buru. Editornya Arief Rahman dan penulis adalah, antara lain Janet E. Steele, *associate professor* dari School of Media and Public Affairs, George Washington University. Ia menulis kesan-kesannya saat berkunjung ke Pulau Buru, terutama ke Waeapo, tempat sahabatnya, Amarzan Lubis dari Majalah *Tempo* pernah lama ditahan. Ia juga bertamu kepada janda raja

Kayeli, Ibu Raja Nafsiah, dari mana ia mendapat banyak cerita tentang Patuanan Kayeli, termasuk tanah ulayatnya yang dijadikan pusat penahanan para tapol.

Tidak kalah menarik adalah tulisan Dhimam Abror, seorang wartawan senior dari Surabaya. Ia menceritakan lika-liku memburu mantan *jugun ianfu* yang masih hidup di pedalaman Buru. Ia melakukan investigasi yang mendetail dan nyaris menyeluruh atas fakta kemanusiaan yang tak kalah pahit di Buru, tetapi terlupakan. Isu kemanusiaan di Buru selalu dikaitkan dengan para tapol, minus isu-isu krusial lain seperti nasib perempuan *jugun ianfu* itu atau kompensasi tanah Raja Kayeli. Abror mengaku menindaklanjuti kisah yang ditulis Pramodya dalam buku *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer*.

Kisah *jugun ianfu* yang ditulis Pram selama di Pulau Buru tersebut memang berangkat dari fakta, sebagaimana ia menulis kisah tapol dalam *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu*. Pram beruntung memiliki kawan sesama tapol yang militan dan punya visi kemanusiaan meskipun martabat kemanusiaan mereka sendiri sedang tergencet rezim.

Di antara pekerjaan berat membuka hutan dan mengerjakan sawah, mereka berusaha mencari tahu mengenai perempuan-perempuan yang ditemukan di kampung-kampung orang Alfuru, yakni perempuan yang mereka anggap tidak biasa, misalnya logat bahasa berbeda dengan perempuan Buru lainnya. Dari situ data-data terkumpul dan Pram mengolahnya. Dari data yang sudah diolah Pram itulah Dhimam Abror bergerak memburu sekitar lima orang korban kekerasan fisik, fisikis, dan seksual

tentara Jepang yang masih hidup. Sisanya, ia lampiaskan dengan memburu makam dan nisan para korban.

Dari sini tampak, betapa dunia literasi punya titik pertemuan, jalinan kisah baru, dan kemungkinan-kemungkinan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi terbitnya buku seperti ini. Dari sini tampak visi Pemda Buru yang kuat. Bukan saja untuk kemajuan dunia literasi itu sendiri, tetapi juga nilai kemanusiaan. Saya yakin belum tentu semua pemerintah daerah bersedia menerbitkan buku yang memuat sejarah kelam daerahnya.

Saya beruntung memperoleh buku *Buru Pulau Raja yang Indah* dari Perpustakaan Buru meskipun yang bisa saya bawa pulang hanya fotokopinya. Saya juga beruntung mendapat tambahan dua buku dari Pak Sulaiman Masbait yang juga diterbitkan Bappeda Buru, yakni *Surga di Tanah Raja, Kabupaten Buru dalam Pesona dan Potensi* (2005) dan *Buru di Mata Para Penjelajah* (2010).

Buku pertama mungkin hal yang biasa diterbitkan oleh instansi daerah bernama Bappeda. Tugas dan lingkup mereka memang data dan angka. Namun, untuk buku sejenis yang diterbitkan Bappeda Buru, buku *Surga di Tanah Raja* pantas dipuji karena penyajiannya tidak selalu berupa statistik, liputan, dan narasi yang bagus. Editornya adalah Arief Rahman dan Toto Sonata yang ahli di bidang penyuntingan sehingga sajian buku tentang potensi suatu daerah tidak “garing”, tetapi enak dibaca dan detailnya mengangkat potensi yang ada. Ada juga foto-foto berwarna yang ditata dengan baik.

Buku kedua, *Buru di Mata Para Penjelajah*, jauh lebih luar biasa lagi untuk urusan Bappeda. Buku ini sarat unsur sejarah, kronik masa lampau, *travelogues* dari para penjelajah, dan orang asing yang pernah berkunjung ke Buru. Ada cuplikan catatan Antonio Pigafetta yang pernah berlayar ke Buru bersama Ferdinand Magellans dengan kapal Victoria pada tahun 1521. Pigafetta atau Pigapheta menerbitkan bukunya yang terkenal *Primo Viaggio Intorno al Globo Terraque* (1524). Di dalam buku tersebut, perjalanan ke Buru dapat ditemukan.

Ada pula catatan Alfred Russel Wallace ke Kayeli yang dicuplik dari buku *The Malay Archipelago*. Cuplikan dari beberapa bab novel Beb Vuyk *Sebuah Rumah Nun di Sana* serta catatan perjalanan Janet E. Steele ke Kayeli dan Waeapo. Sebenarnya, saya berharap buku peneliti Belanda tentang Buru *Het Eiland Boroe Zijne Exploittatie Hifoersche Instenllingen* (1558) juga diikutkan. Tampaknya, penyusun belum mempunyai edisi terjemahannya.

Faktor belum diterjemahkan ini pula agaknya yang membuat kita, setidaknya saya, tidak pernah berjumpa novel Beb Vuyk lainnya tentang Buru, yakni *Hel Hout van Bara (Kayu dari Bara)*. Novel berlatar Teluk Bara, Buru Barat ini, ia tulis pada tahun 1948. Kita layak berharap supaya pihak terkait di Buru, apakah Dinas Pendidikan atau Lembaga Kebudayaan Maluku mulai melirik buku ini untuk diterjemahkan dan diterbitkan. Bagaimanapun, Bappeda Kabupaten Buru sudah memulai inisiatif yang bagus dalam dunia literasi.

Hal yang tak kalah menyenangkan dari sebuah kota atau tempat yang baru dikunjungi adalah pertemuan dengan orang-orang yang baru dikenal dan saya cepat akrab. Itulah yang saya alami selama di Pulau Buru. Selain dengan para pejabat di lingkungan Pemda Buru, saya juga berjumpa dan berkenalan dengan sejumlah orang yang memberi saya banyak hal. Mulai dengan Rektor Universitas Iqra, Muhammad Mukhadir, staf pengajar Dr. Muhammad Sehoul, dan *civitas akademica* lainnya, saya berjumpa pula dengan putra Raja Kayeli Fandi Wael yang menceritakan kebudayaan di Kayeli khususnya dan Buru umumnya.

Informasi tentang kebudayaan Buru saya dapatkan lebih lanjut dari perbincangan dengan Ketua Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku (LKDM) yang juga anggota DPRD Buru, Jafar Nurlatu. Kami bertemu di Wisma Kita, kompleks rumah dinas Bupati Buru. Tokoh muda yang kharismatik tersebut dengan ramah dan lancar bercerita tentang hal ihwal kebudayaan Buru.

Hal pertama yang menarik perhatian untuk saya tanyakan adalah asal-mula kata “Buru”. Menurutnya nama Buru termasuk baru bagi pulau terbesar ketiga di Maluku ini. Sebelumnya namanya adalah Buffolo (kini banyak ditulis dengan Bupolo) yang berarti tanah para raja. Akan tetapi, ada juga yang menyebut artinya *biak* atau papeda, jika diucapkan dengan aksen Buru Selatan, *bifolo*, sedangkan lidah orang Buru bagian barat menyebutnya *bafalo*. Apa pun sebutannya, nama lama tersebut merujuk pada kondisi riil masyarakat yang memang hidup dalam sistem patuanan dan sumber pangannya mengandalkan sagu atau ubi yang dibuat menjadi papeda.

“Nah, nama Buru itu diberikan setelah kolonial datang. Asal mulanya *Boroe*, artinya ‘keledai’. Mungkin maksudnya mengejek, *tapi* lama kelamaan kita terima dan diadopsi sebagai *spirit* patuh dan terus bergerak,” kata Bang Jafar.

Serentak dengan itu saya terbayang dua hal yang berhubungan dengan dunia literasi. Pertama, teori mimetik menerima penamaan dari kubu lawan, tetapi membalikkannya sebagai senjata perlawanan. Inilah yang kita temukan dalam *Bumi Manusia*, misalnya. Nama tokoh Minke (baca: Mingke) berasal dari kata “monyet”, tetapi itu dipakai secara sadar sebagai bentuk kemerdekaan dan kebebasan. Bukankah “seekor monyet” bebas berbuat apa saja, termasuk menghina dan mengejek sistem kolonial? Kedua, saya ingat buku Ariel Heryanto dan Idi Subandy Ibrahim, *Perlawanan dalam Kepatuhan* (2000), yang salah satunya menceritakan kehidupan yang serba tertib dan patuh dalam rezim Orde Baru, tetapi dalam kepatuhan tersebut ada sejumlah perlawanan yang kadang tak terendus rezim.



Kayu putih

Itulah yang terjadi dengan Buru. Nama tersebut dipakai sampai sekarang. Soal interpretasi bisa terus berkembang atau dikembangkan. Ini sejalan dengan “kepatuhan” masyarakat Buru dalam memutar roda kebangsaan, baik pada zaman kolonial, revolusi, maupun masa sekarang. Pada masa kolonial, rakyat Buru berjuang menantang sistem yang diterapkan. Salah satunya adalah menolak kerja sama dengan bangsa Eropa. Penolakan itu tidak disebabkan mereka tidak mau membangun persahabatan dengan bangsa lain, tetapi kearifan tradisional mencium gelagat tidak baik di balik cara-cara kolonial. Itulah yang membuat kolonial menamai mereka dengan *Boroe* dengan maksud mengejek. Namun, terbukti kemudian, Belanda melakukan Pelayaran Hongi yang misinya membakar ladang cengkih penduduk untuk pengendalian harga. Itu pula yang membuat Buru seolah luput dari sejarah cengkih sebab Belanda memang menjadikannya sebagai *onderdeming* (perusahaan daerah) yang berbasis kayu putih. Artinya, kecurigaan rakyat beralasan!

Pada masa revolusi, Buru memiliki pahlawan yang tak disangsikan lagi keberaniannya, yakni Adam Pattisahusiwa yang memimpin perebutan kekuasaan dari residen Belanda di Namlea. Ada pula Abdurahman Wannebo yang merobek dan menurunkan bendera Belanda, Amido bin Talib dan Hamid Goja. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy, saat berkunjung ke Buru, membuka Kongres Kebudayaan Maluku, meresmikan Monumen Bung Karno dan Tugu Revolusi serta menerima cucu dan cece pahlawan revolusi tersebut. Menteri meminta dokumen dan perlengkapan lain segera diurus oleh pihak terkait dalam

proses pengajuan para pahlawan Buru itu sebagai pahlawan nasional.



Persiapan menyuling kayu putih

“Pada masa berdirinya RMS (Republik Maluku Selatan), rakyat Buru tidak tertarik bergabung. TNI yang mendarat di Ubung untuk penumpasan RMS, sangat terbantu oleh sikap penolakan warga Buru atas RMS,” kata Bang Jafar lagi. Menurut dia, penempatan tapol di Waeapo bisa dianggap tepat jika tujuannya untuk menangkal aliran komunis. Di Buru, masyarakatnya tidak mudah terpengaruh oleh ideologi apa pun. “Jadi, bukan hanya faktor penjara alam yang barangkali diperhitungkan pemerintah untuk menempatkan tapol di Waeapo, seperti gunung sebagai dinding dan lautan sebagai wilayah yang tak gampang diseberangi. Ketahanan masyarakat atas ideologi yang

tidak mereka kehendaki. Saya tidak dapat bayangkan kalau mereka ditempatkan bukan di Waeapo.”

Meskipun resisten terhadap budaya dan prinsip hidupnya, orang Buru bukanlah komunitas tertutup. Komunitas di pedalaman sekalipun, misalnya di sekitar Danau Rana, yang kadung diasumsikan sebagai masyarakat isolatif (jika bukan primitif), sebenarnya sangat adaptif menerima perubahan.

“Masyarakat Danau Rana itu memakai *lestari* (ikat kepala) berbentuk *blangkon* dari Jawa. Selain punya tifa, mereka punya gong dan piring *dolo*. Itu semua dari mana? Pengaruh mana? Itu jelas Majapahit semua.”

“Kalau di Waeapo tentu lebih mudah lagi menelisik saling keterpengaruhannya itu. Bahasa Jawa dan Buru sudah membentuk sistem baru di sana. Perkawinan biasa dirayakan dengan adat Jawa dan Buru. Itu alamiah, tak perlu rekayasa,” kata politisi Partai Demokrat berusia 45 tahun ini.

“Hal yang perlu dilakukan pemerintah sekarang menurut saya memetakan seluruh lahan yang ada, menginventarisasi potensi dan kemungkinannya, lalu jangan lupa kompensasi yang layak bagi yang berhak. Pemerintah Pusat, Pemda Maluku, dan Pemkab Buru bisa bekerja sama untuk itu. Lewat cara itu kita menjinakkan bom waktu, sekaligus mengapresiasi tekad masyarakat Buru bahwa kami perlu terbuka, *tapi* jangan telanjang,” pungkasnya secara filosofis.



Tungku dan ketel kayu

Dalam *Sebuah Rumah Nun di Sana*, Beb Vuyk dengan indah dan romantik, tetapi juga penuh perjuangan yang heroik, melukiskan kehidupannya di Pulau Buru. Saya tidak tahu persis apakah Beb memang pernah tinggal di Namlea, sekalipun di dalam cerita tokoh “aku” (yang dipanggil Nonnie oleh para pekerjanya) sangat biografis jika bukan otobiografis.

Beb yang kita ketahui merupakan seorang indo dengan ayah Belanda dan ibu Indonesia. Ia sebenarnya sangat mencintai ibunya dan Indonesia; ia pernah tinggal di sejumlah kota di Indonesia dan pernah menjadi redaktur majalah kebudayaan *Konfrontasi* bersama H.B. Jassin, Rivai Apin, dan lain-lain di Jakarta.

Cerita tentang kehidupan kota Namlea memberi gambaran perjuangan dan unsur sebuah kota. Orang Arab, Cina, Eropa, dan penduduk nusantara seperti Alfuru (penduduk asli Buru), Binongko, Buton, Tomia, Ambon, Bugis, Makasar, Ternate, Sumatra, dan Jawa disebutkan telah hadir di Namlea. Bertahun-tahun kemudian, komposisi penduduk yang sangat beraneka ragam itu tetap bertahan, bahkan menjadi jauh lebih kompleks. Di mana-mana saya menemukan dengan mudah orang Buton, Wakatobi, Bugis, Ambon, Jawa, Minang, Arab, Cina, dan lain-lain. Latar belakang itu terasa menyatu dengan kental sehingga rasanya sebutan asal-usul bukan lagi sesuatu yang urgen—meskipun bukan berarti tidak penting.

Semua sudah lebur di Buru. Betapa tidak. Saat bertemu dengan Dr. Sehol, dia menyebut sedang ikut membantu menyusun *Kamus Buru* bersama rekan lain dari Lembaga Kebudayaan Daerah. Pak Sehol adalah orang Tomia yang aktif di Lembaga Kebudayaan Maluku.

Keberagaman kota memantulkan realitas daerah-daerah di sekitarnya. Sebaliknya, keberagaman di daerah-daerah akan mewarnai kota terdekatnya. Jadi, keberagaman masyarakat di Namlea adalah cermin benggala berbagai daerah yang menjadi kantong budaya Pulau Buru.



Panorama Batobai

Di Waeapo kita dengan mudah berjumpa dengan orang Jawa. Apa yang disebut “orang Jawa” itu pun sangat kompleks, misalnya Jawa Tengah dengan kabupaten/kotanya—Tegal, Pati, Cilacap, Banyumas, Yogyakarta, dan lain-lain—juga subkulturnya: pesisiran-pedalaman, ngapak-mataraman, dan lain-lain. “Orang Jawa” pun merujuk kepada orang Sunda yang datang bertransmigrasi: dari Ciamis, Pangandaran, Tasikmalaya, dan lain-lain.

Belum lagi mereka yang sejak kecil berada di Pulau Buru dan tidak pernah sekali pun menginjakkan kaki di Pulau Jawa atau mereka yang lahir di Waeapo yang hanya kakek nenek dan orang tuanya saja yang orang Jawa. Tidak sedikit pula yang kawin-mawin antara orang Jawa dan penduduk lokal atau dengan suku bangsa lainnya.

Saat saya datang ke Waeapo, jalan raya di depan Polsek Waeapo dialihkan. Di tengah jalan dibangun tenda karena ada pesta pernikahan perempuan Jawa dengan seorang lelaki Buru. Proses inilah yang kemudian melahirkan, pinjam istilah Romo Mangunwijaya, manusia “pasca-Indonesia”, dalam konteks Jawa, misalnya melahirkan orang “Jambon” (Jawa Ambon), “Jaton” (Jawa Tondano), dan “Jabu” (Jawa-Buru). Ini baru dari satu aspek.

Sekarang tentang kayu putih (*Melaleuca leucadendra*), komoditi utama Pulau Buru di samping kopra dan kakao. Kembali saya menyitir Beb Vuyk: minyak kayu putih (*cajuput oil*) sebenarnya baru dikenal belakangan di Eropa sebagai bahan obat-obatan dan wangi-wangian. Georg Eberhard Rumpf (1627—1702) atau yang lebih dikenal dengan Rumphius, ahli botani Jerman yang bekerja di *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) menyebut bahwa obat minyak kayu putih didapat dari menghaluskan daunnya, bukan disuling. Ini menunjukkan bahwa pada masa Rumphius tinggal di Ambon, daun kayu putih belum diolah secara massal. Daun kayu putih mungkin diambil seperlunya sebagaimana daun-daunan yang lain.

Barulah setelah seorang asisten residen bernama Willer mengadakan tugas keliling di Pulau Buru. Ia melaporkan penyulingan lengkap dengan hitungan biayanya. Barangkali itulah yang membuat kayu putih tidak sepopuler cengkih dan pala, padahal di nusantara (atau Hindia) minyaknya

dianggap obat untuk segala penyakit kulit, encok, masuk angin, dan lain-lain. Biasanya, minyaknya hanya dikenal sebagai obat gosok atau obat luar, meskipun kenyataannya juga bisa diteteskan pada segelas air gula untuk diminum sebagai obat sakit perut. Baunya yang wangi menusuk hidung yang dapat mengusir nyamuk dan beberapa tetes dalam air mendidih bisa mengatasi hidung yang mampet. Demikianlah ungkapan Beb Vuyk.



Api penyulingan

“Obat hijau dari Buru ini menjadi obat umum di rumah-rumah yang berwarna coklat di semua pulau, di tempat-tempat yang hanya didatangi dokter sekali setahun, dan yang lebih ditakuti penduduk daripada maut,” tulis Beb Vuyk di halaman 48.



Tetesan minyak kayu putih

Saya juga diyakinkan oleh para penyuling di Siahoni, dekat Batuboi, bahwa dengan meneteskan minyak kayu putih ke dalam air, kemudian meminumnya, sakit perut akan sembuh. Akan tetapi, Pak Sehol, doktor kimia lulusan UGM dan UNY melarang.

“Dulu mungkin iya karena penyulingan masih menggunakan drum dan ketel yang terbuat dari kayu. Sekarang sudah dari besi atau *stainless steel* yang jika dipanasi terus-menerus akan mengeluarkan racun.”

Saya jadi teringat peristiwa tempe bongkrek dalam *Ronggeng Dukuh Paruk* Ahmad Tohari. Ayah Srintil, Santayib, membuat tempe dengan bokor tembaga. Itu yang dianggap menimbulkan racun dan menewaskan banyak orang. Akan tetapi, sebagian orang menganggap itu adalah wabah yang dikirim dari langit karena orang dukuh Paruk

sudah lama tidak berpacara di makam Ki Secamenggala, leluhur mereka. Apa pun itu adalah awal mula Srintil ditahbiskan sebagai ronggeng.

Itu di jagat cerita atau fiksi. Dalam realitas, saya juga mengingat proses merebus ikan teri di daerah kelahiran saya. Dulu, orang menggunakan keranjang-keranjang kecil dari rotan, tetapi sekarang menggunakan wadah dari plastik. Saya membayangkan, plastik yang dipanaskan di atas 100° Celcius itu tentu akan mengeluarkan zat yang berbahaya. Tidak ada protes dari masyarakat dan tidak ada penyuluhan dari pihak terkait. Jika masyarakat tetap menggunakan keranjang rotan, pastilah para perajin rotan tidak kehilangan pekerjaan dan kesehatan pun lebih terjamin. Hal ini pula yang saya bayangkan dengan penyulingan minyak kayu putih. Jika tetap mempertahankan alat-alat penyulingan dari kayu, tentu ada jaminan mutu dari sisi kesehatan, sekaligus perajin ketel kayu akan terus mendapat pekerjaan. Hal sekecil ini saya kira perlu diperhatikan pihak terkait di Buru karena membawa dampak yang cukup signifikan pada kesehatan dan kehidupan ekonomi.

Lokasi tempat tumbuhnya kayu putih tidak pernah disebut sebagai “kebun”, melainkan “hutan” kayu putih. Barangkali karena pohon kayu putih sejenis tumbuhan liar yang tumbuh dengan sendirinya di atas bukit-bukit sabana. Izin pengelolaan hutan kayu putih oleh pemerintah kolonial tidak ubahnya dengan perlakuan kepada hutan pada umumnya, yakni melalui konsesi. Semacam Hak Pengelolaan Hutan (HPH) pada zaman Orde Baru. Atas konsesi inilah ayah mertua Beb Vuyk, de Willigen—seorang pensiunan opsir—beroleh hak atas pengelolaan hutan kayu

putih yang luas di Batuboi. Usaha ini kemudian dilanjutkan oleh Beb dan suaminya yang memilih meninggalkan Pulau Jawa menuju Buru untuk bersungguh-sungguh menggunakan hak konsesi itu.

Batang kayu putih memang putih dan daun berbentuk lonjong berwarna sangat hijau. Daun-daun inilah yang dipetik dengan cara mematahkan ranting. Lalu, daun dilepas dengan cara diurut. Karena dipatahkan dan diurut, pohon kayu putih yang disuling oleh penduduk memiliki ketinggian yang tampak konstan, seolah-olah merupakan jenis kayu putih yang pendek dengan ketinggian rata-rata dua meter. Jenis pohon ini jugalah yang bisa tinggi menjulang sebagaimana banyak saya temukan di tepi jalan dan tepi pantai. Pemda Buru menjadikan tanaman tersebut sebagai pembatas jalan yang ketinggiannya tampak menjulang. Jelaslah bahwa pohon-pohon di bukit ketinggiannya tetap konstan karena secara tetap dipetik oleh penduduk untuk disuling.

Beb Vuyk menggambarkan dengan puitik dan otentik hubungan Buru dan kayu putih pada Bab 8:

Sepanjang pantai Buru Utara, dari Ilat sampai Air Buaya, tumbuh pohon-pohon kayu putih. Batangnya lengking dan putih, tumbuhnya tersebar dari tanah datar, terus menaiki lereng gunung sampai puncak, hingga membentuk bayangan hitam dengan latar belakang langit merah senja. Di sekitarnya tumbuhlah akar-akar menutupi lereng yang kelabu kebiru-biruan seperti kabut di musim hujan, dan sejam kemudian, bila matahari mulai menyala, warnanya menjadi hijau manis seperti lereng gunung suatu negeri yang subur. Dan di musim panas, bila alang-alang menghilang

karena kekeringan dan hawa panas yang membersit dari tanah meniup di atas air, semak-semak gundul di atas tanah berkarat tampaknya putih seperti tulang-tulang berserakan di tepi jalan. (...) Pada musim apa saja, laki-laki dan perempuan berjalan membawa keranjang tinggi di antara pohon-pohon untuk memetik daun, yang kemudian disuling dalam alat sederhana menjadi minyak kayu putih yang hijau dan wangi

Beb menyebut hutan kayu putih di Batuboi sebagai kawasan di tempat ia beroleh konsesi hutan kayu putih. Batuboi merupakan kawasan perbukitan di bagian barat Namlea. Diceritakan keluarga Beb harus bersampan dari Namlea menyisir teluk, masuk hutan bakau, menambatkan perahu, dan naik ke atas bukit. Tempat ini sangat indah dengan *spot* Bukit Tatanggo yang menampilkan deretan bukit hijau cembung sambung-bersambung hingga sampai ke kaki Teluk Kayeli yang disambut hijau bakau. Panorama yang sungguh memukau!

Konsesi kayu putih Batuboi terletak lebih masuk ke dalam teluk. Untuk mencapainya, orang harus berdayung selama empat jam mengikuti arus dan angin. Tanahnya luas, delapan ratus lima puluh hektar; terdiri dari bukit-bukit yang curam, penuh dengan pohon kayu putih berwarna hijau muda, suatu pemandangan yang gersang berbatu-batu di mana tampak bukit demi bukit meninggi sampai berakhir di pegunungan di tengah-tengah Pulau Buru.

Sekarang Batuboi mudah dicapai dari Namlea dengan menyusur jalan trans Buru yang mulus ke arah Waeapo. Batuboilah desa pertama yang dimasuki begitu lepas tapal batas Namlea. Berturut-turut setelah Batuboi, kita akan berjumpa kampung dengan karakter yang sama—berbukit-bukit kayu putih, kekal dalam kisah-kisah penyulingan—yakni Siahoni, Jamilu, Marloso, dan akhirnya sampai di Savanajaya dengan karakter alam yang berbeda, yakni padi di hamparan sawah.

Jalan Namlea—Waeapo persis alur Sungai Waeapo yang sering berpindah-pindah jalur. Jalur lama tetap terlihat di antara alur atau jalur yang baru. Artinya, karena jalan sering diperlebar dan tikungan dikurangi dengan memapas kaki bukit dan menimbun jurang, aspal dari jalan lama tetap terlihat, tetapi sudah tidak terpakai. Yang dipakai kemudian adalah jalan yang baru sehingga jarak Namlea—Waeapo semakin dekat saja sebenarnya. Saya menyusuri jalur barat Teluk Kayeli itu dengan menggunakan sepeda motor pinjaman dari Pak Sehol. Anaknya yang siswa SMP ikut menemani saya. Anak itu tampaknya suka jalan-jalan. Kata Pak Sehol, ia pernah naik motor sama teman-temannya ke Teluk Bara yang jaraknya ratusan kilometer dari Namlea. “Kami sibuk mencarinya, ternyata ia pergi jauh sekali tanpa pamit,” kata Pak Sehol.

Meskipun Batuboi merupakan sentra minyak kayu putih, tidak mudah menemukan tempat penyulingan di tepi jalan. Kita harus masuk ke jalan-jalan kecil di hutan karena tempat penyulingan bertebaran di luar perkampungan. Untuk itu, para pekerja biasa membuat gubuk beratap *gaba-gaba* (daun sagu yang dijahit dengan rotan) di bukit-

bukit karena pada masa petik daun dan penyulingan bisa memakan waktu berhari-hari.

Ada sebuah tempat penyulingan yang cukup besar saya temukan dalam kampung Batuboi, tak jauh dari tepi jalan. Ukurannya yang cukup besar menyerupai pabrik atau kilang. Akan tetapi, sampai siang itu tidak ada aktivitas, bahkan sebagian pintunya tutup. Tampaknya tempat penyulingan itu sedang tidak beroperasi.

Tidak jauh dari batas Desa Batuboi, saat baru memasuki Desa Siahoni, hidung saya mengendus aroma minyak kayu putih mengembang di udara. Saya berhenti. Di sebuah tanah kosong, lewat jalan setapak yang bisa dilalui sepeda motor, saya melihat para pemetik kayu putih turun dari bukit terdekat memanggul karung. Laki-laki dan perempuan memanggul karung berisi daun kayu putih yang dipetik sejak pagi hingga sore. Di sekitar situ sebuah ketel sedang terjerang dengan api menyala.

Pak Hamid (59 tahun) merupakan kepala penyulingan yang bertugas mengatur api dan mengontrol tetesan minyak. Pekerja yang lain tampak mengeping kayu bakar yang memang harus selalu tersedia karena proses penyulingan memakan waktu dari siang sampai malam. Sebuah pipa mengalirkan air ke dalam penampungan Fungsinya untuk mendinginkan tetesan minyak sekaligus menambah air dalam ketel. Satu pipa lagi adalah tempat mengalirkan minyak yang berhasil disuling ke tempat penampungan akhir.

“Ini ketel baru naik setelah penyulingan pertama dapat dua botol lebih sedikit,” kata Pak Hamid. Ini terkait

keinginan saya yang akan menunggu ketel diangkat. Jika saya benar menunggu, artinya baru pukul 22.00 saya baru bisa menyaksikan ketel diangkat dan sepah daun dibuang. Dalam proses penyulingan, jika dihitung sejak ketel pertama diisi daun dan dinaikkan ke tungku kemudian diangkat, prosesnya bisa memakan waktu empat sampai lima jam. Satu bujur daun (dalam sebuah kolam kayu) bisa enam kali masak. Artinya, jika dikalikan dengan rata-rata lima jam, waktu yang digunakan untuk satu bujur hampir dua hari dua malam atau 36 jam. Setiap kali penjerangan, rata-rata dihasilkan dua botol minyak kayu putih murni (botol bir besar). Harga perbotol Rp150.000. Hasil itu dikumpulkan selama waktu penyulingan yang memakan waktu sepekan atau dua pekan. Lalu, hasilnya dibagi kepada dua belas pekerja.

“Apakah kalau dipetik terus-menerus daun kayu putihnya tidak habis, Pak?” tanya saya.

“Kita ada masa jeda. Setelah satu kawasan selesai dipetik, tidak akan dipetik lagi selama sepekan dan itu cukup memulihkan daunnya untuk dipetik lagi pekan depannya.”

Saya menikmati proses penyulingan dengan khidmat, di antara para pekerja yang ramah. Pulangnya saya beli sebotol minyak kayu putih asli seharga Rp150.000. Di Namlea harganya Rp200.000 dan di Ambon Rp 250.000. Di Makassar atau tempat lain mungkin harganya lebih tinggi. Untuk itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Buru saya kira perlu memperhatikan jalur distribusi ini supaya harga bisa lebih baik lagi di tingkat penyuling.

Perjalanan saya ke barat Namlea, yakni ke Air Buaya, tidak saja mempertemukan saya dengan komoditi minyak kayu putih, tetapi juga cokelat dan kopra. Sepanjang jalan saya menemukan kebun kelapa yang luas yang berselang-seling dengan kebun cokelat. Buah-buah cokelat dan kopra dijemur sebagian di badan jalan.



Sebuah rumah di air buaya

Perjalanan ke Air Buaya juga mempertemukan saya dengan sebuah pabrik pengolahan minyak cengkih. "Ini milik Pak Saleh Mukaddar, mantan manajer Persebaya," kata sopir travel yang saya sewa, Iqbal Alkatiri. Saleh Mukaddar adalah orang Air Buaya, sebagaimana Iqbal sendiri. Di Air Buaya memang banyak terdapat komunitas Arab.

Kota kecil Air Buaya termasuk kota tua di ujung barat Pulau Buru. Alkisah, Kota Air Buaya berasal dari temuan penduduk atas seekor buaya yang hidup dengan

memeluk sebuah guci berisi air. Cerita itu diabadikan sebagai logo “kultural” di sana, sebagaimana *arek* Surabaya mengabadikan asal mula nama Surabaya dengan gambar *sura* (hiu) dan buaya. Di sebuah rumah, saya lihat gambar buaya memeluk keramik ditorehkan di atas atap.

Lebih ke barat lagi dari Air Buaya, setelah melewati air terjun Waprea, saya sampai di Teluk Bara yang indah. Jika melihat peta Pulau Buru, kita akan dengan nyata melihat keadilan Tuhan dengan membuat Pulau Buru secara seimbang. Di bagian timur terdapat Teluk Kayeli yang luas yang dikelilingi Pegunungan Batabual dengan puncak tertinggi Gunung Waloolon (1.745 dpl). Sementara itu, di bagian barat terdapat Teluk Bara yang lebih kecil daripada Teluk Kayeli. Di sana tegak Gunung Kepala Madan yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Buru (2.729 dpl).



Teluk Bara

Teluk Bara masih dikelilingi hutan lebat dengan pohon-pohon besar dan dinding bukit yang curam. Jalan aspal yang bagus terbentang sampai ke pelabuhan, dengan dermaga penyeberangan ke Sanana (Pulau Sula) yang sempat beroperasi, tetapi sekarang terhenti lagi. Akibatnya, kaki dermaga menjadi koloni ular laut yang dapat dilihat dari atas karena air laut yang jernih. Ikan-ikan teluk yang berwarna-warni juga bisa dijenguk dari atas dermaga.

Selain jalan aspal sampai ke pelabuhan, akses jalan ke Kecamatan Kepala Madan (masuk Kabupaten Buru Selatan) berupa jalan tanah yang menembus hutan yang berada tepat bersimpang di pintu pelabuhan. Di jalan tanah itu pula terdapat makam Syekh Hussein yang sering menjadi tempat ziarah warga Buru. Penziarah datang dari luar Buru, bahkan dari Timur Tengah.

Desa Bara sendiri yang terletak jauh dari pelabuhan juga jauh dari jalan raya. Masuk ke tepi pantai sekitar tiga kilometer. Rumah-rumah nelayan yang sederhana menanti kita dengan keramahan penghuninya. Dari desa Bara pula pemandangan ke gunung terlihat memesona. Tidak saja terlihat puncak Gunung Kepala Madan nun di ujung tanjung, tetapi juga gunung terdekat yang mengapit kawasan Bara dengan pohon-pohonnya yang lebat. Ini senantiasa mengingatkan saya pada novel Beb Vuyk yang lain, *Kayu dari Bara*. Sayang sekali, novel itu belum pernah saya baca karena setahu saya memang belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Dari Air Buaya, saya masuk ke pedalaman, yakni kawasan Danau Rana yang dianggap titik tengah Pulau Buru. Kami menunggu oto di persimpangan Desa Wamlana. Dulu desa itu masuk ke dalam Kecamatan Air Buaya dan sekarang masuk ke dalam Kecamatan Fenaleisela yang baru dimekarkan. Mobil Iqbal Alkatiri yang saya sewa tidak mungkin menempuh medan Danau Rana yang berat. Karena hari sudah sore, kemungkinan mobil yang ke “atas” adalah mobil-mobil kecil.

“*Tapi* coba tunggu saja,” kata ibu warung tempat kami makan. “Biasanya tengah malam juga ada mobil naik kalau ada urusan penting,” katanya lagi.

Kami beruntung karena hari itu ada urusan penting rupanya di Danau Rana. Karena akan ada kunjungan Duta Komunitas Adat (KAT) dari Jakarta, Krisna Murti, pihak Dinas Sosial Buru mempersiapkan segala sesuatu dengan cepat. Sebuah mobil spesial medan berat yang akan membawa mereka berhenti dekat rumah makan menunggu seorang temannya berbelanja.

Pak Man mendekat dan meminta menumpang.

“Waktunya mepet,” kata seorang petugas yang diutus naik sore itu juga ke Desa Waegrahe di tepi Danau Rana. “Jadi, semalam-malam hari kita harus tiba di sana mengabarkan kepada penduduk untuk mempersiapkan segala sesuatu.”

Dengan menumpang mobil gardan ganda petugas dinas sosial inilah, saya bersama Pak Sulaiman Masbait dan seorang stafnya ikut naik ke pedalaman Buru. Jalan yang ditempuh adalah jalan *logging* (bekas jalan perusahaan

kayu). Jalan itu berkelok dan berliku di lereng gunung dengan jurang yang dalam, pendakian terjal, jembatan darurat, dan sebagian dari kami harus menyeberang sungai tanpa jembatan. Tanah longsor dan pohon tumbang adalah suasana perjalanan yang tak habis-habisnya sampai empat jam lebih. Namun, hutan yang lebat dan pemandangan Gunung Date yang sangat hijau membuat saya seolah abai dengan medan yang berat itu.

Gunung Date itu unik. Sejauh apa pun kami berjalan, ia tetap saja berada di samping kami, entah *saking* besar atau tingginya, atau posisi jalan yang memang melingkar di sekitar situ saja atau misteri alam Buru, saya tak tahu persis. Ini mengingatkan saya kepada Danau Toba yang tampak dipandang dari mana saja, sekalipun kita sudah berjalan berjam-jam di atas kendaraan.

Hujan turun dan penumpang di belakang mulai basah kuyup. Untunglah jenis tanah di Buru bukan tanah liat, tetapi tanah bercampur kerikil kecil sehingga jalannya tidak licin. Saya sudah menyiapkan jas hujan di dalam tas dan saya serahkan kepada Pak Man. Saya beruntung dapat tempat duduk di dalam kabin bersama seorang tetua adat dari pesisir. Namanya Pak Jait. Ia punya anak yang tinggal di Sleman, Yogyakarta.

“Setamat kuliah di UGM, ia dapat suami orang sana,” katanya. Ia bercerita tentang upacara panen (*mahloa hawadegen*) yang menjadikan doa-doa keselamatan sebagai tema upacara.

Di pohon-pohon meranti yang tinggi besar, saya saksikan sarang lebah dengan madunya yang berceceran.

Sebagian sarang lebah itu sudah kosong ditinggalkan. Kata Pak Jait, warga Buru tidak menyadap madu. Semua dibiarkan tinggal di dahan pohon. Sementara itu, saya berpikir sebaliknya, alangkah bernilai ekonomisnya sarang-sarang lebah itu.



Kampung Waegrahe

Pukul 18.00 kami sampai di Kampung Waegrahe. Kami beruntung tidak berjalan kaki. Biasanya, mobil hanya sampai di Kampung Garang, tempat penambangan emas. Lalu, kami harus berjalan kaki sampai sehari semalam karena dulunya jalan hanya sampai di sana yang bisa dilalui kendaraan. Akan tetapi, sekarang seiring promosi “Rana Menyapa Dunia”, jalan sudah bisa ditempuh langsung ke kampung tepi danau.

Kampung Waegrahe sudah ditata oleh dinas sosial setempat dengan rumah-rumah setengah permanen. Rumah dan jalannya terlihat rapi. Rumah-rumahnya berukuran

sama dan bercat putih-putih. Sebuah *baleo* (balai pertemuan) terdapat di tengah kampung. Sebuah SMP dan sebuah SD masing-masing berada di ujung barat dan timur.

Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dinas sosial yang telah berbaik hati. Ia menolak ongkos yang saya berikan. Biasanya, ongkos Wamlana—Waegraha sebesar Rp100.000 per orang.

“Kita sama-sama petugas, Bung,” kata sang sopir penuh persahabatan.

Malam itu mereka menginap di rumah kepala dusun, sedangkan kami (saya, Pak Man, dan stafnya) menginap di rumah kepala *soa* (kepala kampung). Ini seperti di Bali. *Klian* adat urusan kultural, *klian* dinas urusan administratif. Kampung begitu tenang. Listrik dari tenaga surya menerangi 63 rumah di Dusun Waegrahe. Cuaca dingin menusuk tulang. Saya cepat tertidur malam itu karena kelelahan.

Menjelang subuh saya terbangun. Sebuah mobil menderu masuk kampung dengan suara musik berdentam-dentam. Ternyata, rombongan dinas sosial dari Namlea. Mereka “naik” pukul 24.00 dari Wamlana. Rombongan yang perempuan langsung ditempatkan di rumah kepala *soa*.

Pagi itu juga, kami diantar ke tepian Danau Rana oleh Pak Puji yang berposisi sebagai *tere* (juru kunci danau). Apa yang disebut tepian danau itu ternyata sangat jauh dari Kampung Waegrahe. Jaraknya sekitar empat kilometer dengan jalan menembus hutan dan jalan setapak berawarawa. Pak Puji yang berusia 80 tahun itu tampak sigap berjalan di depan dengan tongkat adatnya yang panjang.



Kepala Tere
(Juru kunci Danau Rana)

Alhamdulillah, akhirnya saya sampai di Danau Rana ketika fajar menyingsing. Pak Puji melarang saya mengambil gambar sebelum prosesi izin kepada penjaga danau dilakukan. Ia pun masuk ke tepi danau, lalu berdoa dalam bahasa Buru yang mistik dan khidmat. Lalu, keping uang logam di tangannya ia lempar ke tengah danau. Setelah itu kami bebas berfoto.

Danau Rana mungkin memiliki luas yang sama dengan Teluk Bara dan keindahannya juga nyaris sama. Hal itu terutama berkat hutan lebat yang mengelilinginya. Sementara itu, teratai dan gelagah tumbuh di atas permukaan danau yang berkilau diterpa sinar matahari pagi yang menyepuh perahu-perahu penduduk seberang danau yang berkayuh ke Waegrahe. Di seberang situ, ada Kampung Waereman, Kaptuan, dan Aerdepa. Di seberang

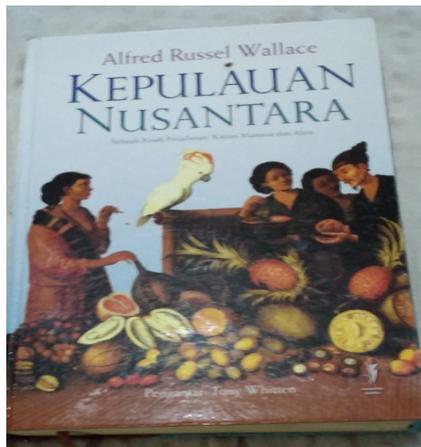
kami berdiri, selain Waegrahe, ada Kampung Waru Jawa, Wamanbuli, dan Waemiten.

Melihat keindahan danau yang murni di tengah hutan yang rapat, saya merasakan getaran yang sangat dalam. Semoga program Pemda Buru dalam *tagline* “Rana Menyapa Dunia” terwujud dengan baik, dalam arti mendatangkan wisatawan dengan menjaga danau tetap lestari. Salah satu pilihan yang tepat adalah menjadikan Danau Rana sebagai objek wisata petualangan. Selebihnya, biarlah proses berlangsung dan masyarakat sebagai “pilot” yang menentukan arah perkembangannya.

Ketika kami kembali ke pusat kampung, bunyi kendang bertipak-tipung di balai adat. Para pemuda memukul tifa dengan semangat yang mengiringi orang kampung yang mulai bergotong-royong menyambut tamu dari Jakarta. Saya menatap perbukitan yang masih dibasahi sisa embun dan menyaksikan deretan pohon-pohon salawaku dengan warna putih berseri. Seperti senyum gadis-gadis Waegrahe yang turun ke kali di batas kampung, yang airnya mengalir ke Danau Rana. Sejuk dan menyejukkan

Kayeli

Saya datang ke Kayeli sebulan lebih awal daripada Alfred Russel Wallace. Sang naturalis Inggris itu datang pada bulan Mei dan menjelajah hingga ke Lembah Waeapo. Ia menetap di Kayeli sampai bulan Juni 1819. Saya datang minggu pertama bulan April 2018. Saya mendaki hingga ke Gunung Botak dan sampai akhir bulan tinggal di Namlea, yakni di seberang Kayeli.



Buku Kepulauan Nusantara

Sebagaimana dinukilkan dalam sejarah, juga dari cerita orang-orang yang saya dengar di Namlea, pada tahun 1919 banjir besar memporandakan pusat Petuanan Kayeli. Dua sungai yang membujur di dataran rendah ini, Massarete dan Sungai Kayeli, mengamuk melebihi 120

fenomena “aer putih”; gelombang besar yang muncul di Teluk Kayeli akibat musim angin menghempas langsung ke dalam teluk. “Menakutkan,” tulis Beb Vuyk. Dalam nuansa berbeda, Vuyk menyebut hal lain yang menakutkan dari Teluk Kayeli, yaitu “suangi”, pelacur di antara seratus macam hantu menurut tahyul orang Maluku.



Sungai Massarete

Akan tetapi, banjir bandang Kayeli tampaknya lebih menakutkan karena setidaknya ia terjadi sekali seumur hidup dan jejak yang ditinggalkannya begitu kekal di dalam cerita dan hikayat. Fenomena “aer putih” dan “suangi” tidak pernah saya dengar disebut orang di Namlea dan sekitarnya, tetapi banjir Kayeli selalu ditambahkan seseorang tiap kali saya bertanya tentang benteng, kompeni, dan bapak raja. Saya bayangkan rumah-rumah bertiang kayu meranti—kayu terkuat untuk rumah di Buru—tak mampu menahan

terjangan air campur lumpur. Dinding kulit sagu dan atap gaba-gaba yang kukuh melekat di bingkai rumah terpecah memburai diseret arus gila ke teluk. Pohon-pohon terhumbalang dan jalanan lenyap tertimbun lumpur dan bebatuan. Manusia dan ternak banyak yang hilang atau ditemukan tak bernyawa tersangkut di akar pohon yang juga dalam keadaan setengah terbongkar.

Bagaimana ganasnya banjir bandang tahun itu dapat dilihat dari kondisi Benteng Kayeli di tepi Sungai Masarete. Benteng yang semula berdinding setinggi empat meter itu, setelah banjir tingginya menyusut menjadi dua setengah meter saja karena tapaknya terbenam lumpur yang mengeras hingga kini. Peristiwa itu memaksa Belanda memindahkan pusat pemerintahannya ke Namlea yang pada mulanya hanyalah desa nelayan biasa. Perlahan Kayeli ditinggalkan. Sebagian kampung berangsur ditelan belukar rimba dan “pendaratan di Kayeli”—yang bernilai simbolik berkat kedatangan Wallace—tak ada lagi. Begitulah takdir bicara. Untuk Kayeli, takdir bicara melalui peristiwa alam: bah!

Sebelum diterjang banjir dan ditinggalkan, Kayeli cukup membuat penjelajah seperti Wallace takjub. “Bouru (maksudnya Cajeli, Kajeli, atau Kayeli) memiliki sebuah benteng kecil yang tertata sangat rapi, dikelilingi oleh lapangan rumput dan jalan-jalan yang bagus,” tulisnya dalam karya babonnya, *The Malay Archipelego* [1869] yang diterjemahkan menjadi *Kepulauan Nusantara: Sebuah Kisah Perjalanan, Kajian Manusia dan Alam* (Komunitas Bambu, 2009).



Dermaga Kayeli

Bagi Wallace, keadaan Kayeli ini jauh lebih bagus daripada Delli [sic]—mungkin maksudnya Dili di Pulau Timor—yang dipimpin “Yang Mulia Gubernur” serta memiliki garnisun lengkap dengan letnan, kapten, dan mayor. Bouru dengan Cajeli sebagai pusat pemerintahan “terlalu miskin untuk memiliki seorang asisten residen sekalipun”. Oleh karena itu, di Kayeli hanya ada seorang *opziener* alias pengawas, putra asli Amboyna (Ambon) dengan garnisun berkekuatan 12 orang serdadu Jawa dan seorang ajudan sebagai komandan.



Halaman depan Benteng Kayeli

Beb Vuyk menyebut Kayeli sehubungan dengan kapal KPM yang mendarat dua bulan sekali di Kota Kayeli, suatu tempat perbentengan kompeni yang menjadi pusat pemerintahan sipil daerah. Di situ juga tinggal seorang pendeta. Mertuanya sendiri—seorang opsir pensiunan—setelah membeli ketel minyak kayu putih yang ditempatkan di Batuboi memutuskan tidak tinggal di Kayeli, tetapi di Namlea. Tak tahu apakah karena jarak Batuboi lebih jauh daripada Kayeli atau karena kota itu sendiri sudah sempurna surut dan sebaliknya Namlea mulai diminati.

Hal ini sama sulitnya menerka apakah ketika Wallace sampai, masa jaya Kayeli sudah lewat atau baru akan tiba. Jika kita mengambil masa Wallace mendarat di Pelabuhan

Kayeli setelah menumpang kapal uap milik jawatan pos Belanda pada tanggal 4 Mei 1861, kita punya dua andaian. Andaian ini berangkat dengan asumsi bahwa pembangunan benteng di suatu tempat biasanya menandai pentingnya tempat dimaksud. Sekaligus dengan itu, jika benteng sampai ditinggalkan atau runtuh, pastilah ada peristiwa genting yang membuatnya demikian.

Pertama, hitung mundur dari tahun 1861—saat Wallace tiba—ke tahun pendirian benteng pada tahun 1785. Ada saldo waktu 76 tahun. Waktu sepanjang itu kiranya cukup untuk membuat Kayeli atau Buru secara umum tidak hanya memiliki seorang pengawas, seorang komandan pelabuhan, 12 serdadu, dan seorang ajudan komandan, tetapi lebih dari itu semua.

Cerita ironis seperti ini tak perlu terjadi bahwa kapal yang ditumpangi sang naturalis tidak merasa perlu merapat ke pelabuhan. Nakhoda cukup melepas tembakan pemberitahuan, maka komandan pelabuhanlah yang menyusul ke tengah teluk dengan perahu kecil. Perahu itu mengangkut penumpang yang ingin turun di Pulau Buru—saat itu tampaknya hanya Wallace seorang—dan paket pos yang juga tidak seberapa banyak. Lalu, "*Kapal uap Belanda itu kembali berlayar tanpa membuang sauh.*" Ter-la-lu!

Keadaan apakah ini jika bukan tanda-tanda berlalunya masa kejayaan?



Fandi Ashari Wael
(putra mendiang Raja Fuad Wael)

Kedua, hitung maju dari tahun 1861 ke tahun perpindahan ibu kota ke Namlea pada tahun 1919. Saldo waktunya lebih panjang, yakni 99 tahun. Apakah kiranya yang tak bisa dicapai dalam kurun waktu sepanjang itu, jika pada awal kedatangannya saja seorang Wallace—yang notabene sudah berkunjung ke banyak tempat di dunia—bisa tanpa ragu menyebut benteng yang rapi dan jalan-jalan yang bagus?

Bukankah juga tersirat pemerintahan yang efektif lewat personil yang sedikit? Jika pun kemudian Kayeli ditinggalkan, tiada lain karena serangan bah, bukan karena serangan meriam musuh yang ingin menguasainya. Sejak itu,

sayangnya memang tidak ada catatan lebih lanjut tentang capaian Kayeli. Hening. Sepi. Kayeli tidur meringkuk di sudut bumi selama puluhan, bahkan ratusan tahun.

Akan tetapi, satu hal yang tak hilang dari Kayeli ialah status tradisionalnya sebagai daerah Patuanan yang merupakan tempat raja berkedudukan. Ini merupakan konsekuensi kolektif dari kawasan Maluku yang berasal dari sebutan bangsa Arab, *Jazeera al-Muluk* (negeri para raja). Buru sebagai bagian dari “*jazeera*” itu, sudah lama memiliki rajanya sendiri. Dikenal sebagai Petuanan. Ada tiga petuanan yang bersifat “tri-tunggal”: Lisela, Masarete, Kayeli—yang menjadi pusat petuanan. Akan tetapi, Belanda lancang membaginya jadi delapan petuanan (*regenschap*): Patuanan Kayeli, Liliiali, Tagalisa, Lisela, Masarete, Fogi, Waisama, dan Ambalau. Pusat raja pun berpencar-pencar dan kekuasaan pun terbagi di bawah tangan.

Sebelum kompeni ikut campur, dapat dikatakan Kayeli sebagai pusat petuanan. Setidaknya, menurut Fandi Ashari Wael, anak mendiang Raja Fuad Wael, terdapat pembagian *petak telo* (petak tiga) yang tak terpisahkan antara Kayeli, Lisela, dan Masarete. Wilayah *petak telo* ini, selain memiliki Raja, juga dilengkapi struktur yang komplit.

“Ada *saniri* yang terdiri atas perdana menteri, penasehat, dan penghulu; ada *kaksodin*, orang tua yang membawahi tujuh marga; *hinolong*, kepala tiga marga dan kepala *soa* atau kepala kampung,” kata Fandi Wael dalam perbincangan di Namlea.

Hal itu, lanjutnya, belum terhitung *babeto* atau *gebapuji* (juru kunci tempat-tempat penting) dan juga

deretan *orang kaya* (bangsawan) yang mengingatkan kita pada penggerak struktur Kesultanan Aceh.

Ketika Belanda memindahkan semua aktivitasnya ke Namlea, raja dan strukturnya yang masif itu tetap bertahan di Kayeli. Mengapa pula harus pindah? Keberadaan mereka sudah eksis jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Begitu pula organ-organnya yang menyebar di seluruh kawasan petuanan dari Liliali di pesisir melintasi dataran luas Waeapo hingga Kubalahin di pegunungan.

Raja Kayeli memiliki hak ulayat yang luas. Salah satu yang utama adalah daratan Waeapo yang subur. Ketika Wallace memulai perburuan serangga dan pengamatan unggasnya, Raja Kayeli tidak cukup hanya mengutus orang suruhan sebagai pendamping, tetapi sang raja sendirilah yang mendampingi si Inggris. Menurut saya ini “bernuansa politis”, bagaimana seorang raja ingin menunjukkan wilayah kekuasaannya kepada seorang asing yang sedang berburu ragam kumbang, burung, dan kupu-kupu.

Sekaligus “diplomatis”, bagaimana seorang raja bisa memberi rasa aman bagi orang jauh. Kita tidak tahu, cara apa pula yang telah ditunjukkan raja kepada orang asing yang datang mendirikan benteng dan memasang meriam. Yang jelas, ketika Pemerintah RI menjadikan Waeapo sebagai kawasan inrehab bagi Tahanan Politik '65, dengan Raja Kayelilah pihak pemerintah berunding. Waktu itu, Raja Kayeli adalah Ishak Wael berunding dengan Jaksa Agung Muda Soetrisno, S.H. pada tahun 1969. Menurut Nafsiah, ibu Raja, kompensasi yang diterima suaminya waktu itu berupa mesin motor tempel yang jika sekarang seharga Rp16 juta.

Ketika tanah inrehab hendak dialihfungsikan sebagai lahan transmigrasi pada tahun 1970, sekali lagi Raja Kayeli diajak berunding. Namun, belum jelas keputusannya, sang Raja sudah lebih dulu wafat sehingga keluarga besar pun tidak tahu persis isi perundingan (lihat *Buru, Pulau Raja yang Indah*, 2008: 28).

Belakangan, ketika emas Gunung Botak mendatangkan eforia di mana-mana dengan sisa-sisa kejayaan lampau, sekali lagi Raja Kayeli menunjukkan otoritasnya. Akan tetapi, kali ini situasi sudah jauh berbeda. Raja Fuad Wael wafat, lalu muncul dualisme kepemimpinan yang sama-sama merasa berhak melanjutkan tahta: Raja Abdullah dan Raja Jafar. Sebenarnya ada yang ketiga, yakni Fandi Ashari Wael sendiri, putra mahkota Fuad Wael, tetapi yang terakhir ini tidak menggelar pelantikannya dan hanya tersenyum ketika saya sapa “Pangeran”.

Penyeberangan saya ke Kayeli berlangsung pada Jumat pagi yang khidmat. Tepat pukul 08.00 WIT, feri atau kapal motor penyeberangan (KMP) Danau Rana meninggalkan dermaga Namlea. Harga tiket Rp17.000/orang. Feri melaju tenang dan saya menikmati teluk yang beriak kecil. Kota Namlea untuk pertama kalinya saya saksikan dari tengah teluk. Bangunan-bangunan yang menjorok ke air, yang dibangun di atas tiang, tampak dramatis. Menara masjid dan tower seluler berderet.



Teluk Kayeli

Suasana tenang itu mengingatkan saya pada secuplik kisah yang diceritakan Will Derks tentang bersin. Seseorang menyeberangi Sungai Amstel Amsterdam yang tenang. Namun, ketenangan itu mendadak pudar karena sesuatu menggelitik hidungnya: bersin. Proses alamiah tubuh yang sepele itu tiba-tiba meruyakkan semua ketenangan dan kekhidmatan.

Seperti saya di atas KMP Danau Rana yang membawa sebuah *pick-up*, dan beberapa motor. Penumpang tidak lebih dari sepuluh orang. Separuh di antaranya adalah para penambang emas yang akan bertolak ke Gunung Botak. Ketenangan itu mendadak pudar ketika seseorang itu bersin, persis yang saya alami, tetapi dalam bentuk lain.

Saat itu saya sedang melayangkan pandangan ke sisi luar teluk dengan melihat Tanjung Kerbau dan Tanjung Kayu Putih yang disebut *Beb Vuyk* dalam novelnya.

“Di balik Teluk Kayu Putih, arah ke Ilat, terdapat Tanjung Keramat. Di sana ada makam seorang habib,” seorang bapak berbicara di samping saya tanpa diminta. Hal itu membuat saya seolah-olah saya mendengar novel Beb Vuyk yang sedang dibacakan. Nadanya lunak dan bersahabat, tetapi bagaimanapun itu telah menggelitik saya dan saya terlanjur “bersin” karenanya.

Namun, sungguh tak apa. Malahan saya mendapat banyak hal ketimbang saya mempertahankan kekhidmatan untuk diri sendiri. “Oh ya, banyak yang berziarah ke sana, Pak?” saya berusaha menanggapi.

“Banyak, terutama saat menyambut hari baik bulan baik. Besok mau puasa ramai orang menyeberang dari Ilath dan Namlea,” katanya. “Dua orang habib dari Timur Tengah rutin datang ke sana. *Tapi* maaf, saya tidak tahu siapa nama kedua habib itu dan siapa pula habib yang berkubur di tanjung.”

Saya tersenyum. Di kejauhan saya melihat celah masuk ke Teluk Kayeli, yang berhubungan langsung dengan Selat Manipa dan terus ke Laut Banda. Pulau Manipa, tanah kelahiran Kapten Jonker, sekutu Aru Palakka dan Speelmen itu, tampak terbelintang searah pintu masuk.

Ke sisi kanan pandangan saya tertumbuk pada deretan Pegunungan Batabual dan di salah satu anak bukitnya bertengger sisi bukit yang tampak *kerowak*.

“Itu Gunung Botak,” tunjuk si bapak, dan “bersin” kali ini lebih kencang.

“Bersin” saya semacam “gegar budaya” ketika si bapak bercerita tentang fenomena Gunung Botak. Tentu saja, bukan kebaikan hatinya itu yang membuat saya gegar, melainkan kenyataan yang tak terbayangkan.

Menurutnya, emas Gunung Botak ditemukan pada tahun 2013 dengan sebuah kisah ajaib jika tidak naif. Penemuan emas tersebut berawal dari sepasang peladang yang perlahan mendadak kaya, padahal hasil ladangnya biasa-biasa saja. Tetangga yang curiga mengikutinya diam-diam masuk hutan. Ternyata, sepasang suami istri peladang itu sedang menambang tanah emas.

Kisah seperti ini, dengan sedikit variasi, sudah sering saya dengar di sejumlah tempat penambangan emas, seperti di Tumbangsamba, Tumbang Pitu, dan Bombana. Tanpa perlu lagi dikonfirmasi, rantai penceritanya sudah sedemikian panjang dan sukar diuraikan siapa pemilik kisah paling awal. Jadi, bukan cerita itu benar yang penting, tetapi apa yang terjadi di balik cerita itu: *toh* ternyata bongkah-bongkah emas benar-benar ada!

Tanpa bisa diempang, ribuan penambang atau orang yang sama sekali tak pernah bersentuhan dengan tambang, berbondong-bondong datang. Makin lama makin banyak dan tak berlebihan disebut seperti arus banjir bandang yang ternyata sekali lagi menghempas Kayeli. Hanya kali ini berlaku sungsang. Jika dulu air mengalir dari gunung ke teluk, kini orang-orang mengalir dari teluk ke gunung.

Efek yang ditimbulkannya saya kira tidak bisa dianggap kecil jika tidak mendekati banjir bandang pada tahun 1919. Gunung sebagai benteng alam *kerowak*, sungai

Anahoni penuh lumpur dan merkuri serta sagu-sagu dan ekosistem rawa terancam, biota Teluk Kayeli menunggu kiamat dini—saya dengar di Namlea mulai ada orang yang menolak makan ikan dari Teluk Kayeli. Saya bergidik ngeri membayangkan tragedi Teluk Buyat beberapa tahun lalu.

Begitulah, demam emas Gunung Botak membuat “pendaratan di Kayeli” berlangsung bertubi-tubi. Kapal penyeberangan yang saya naiki ini disebutkan hampir miring menahan beban. Sementara perahu bermesin tempel dan *speedboat* hilir-mudik membawa penumpang. Para penambang memang menggunakan jalur Namlea—Kayeli sebagai pintu masuk utama ke Gunung Botak. Lebih nyaman jika dibandingkan lewat Waeapo yang konon ada beberapa “pos pungutan”, entah resmi, entah liar. Lewat Kayeli cukup diam di atas feri atau perahu, lalu melewati jalanan kosong satu jam.

Akibatnya bukan hanya Namlea yang hidup 24 jam, Kayeli pun tersentak bangun setelah puluhan tahun tertidur. Namun, tetap saja pusat kehidupan berlangsung di Namlea. Waktu itu disebutkan, semua kamar penginapan di Namlea terisi penuh dan rumah-rumah penduduk disewa atau dikontrak dengan harga mahal. Rumah Pak Sehol sendiri pernah mau disewa penambang, padahal waktu itu ia masih tinggal di rumah kayu kecil di depan rumahnya yang sekarang.

“Mereka berapa kali datang karena sudah tak kebagian tempat,” kata Pak Sehol. “*Tapi* mau *ditarok* di mana anak-anak saya?” tolaknya.

Tukang ojek waktu itu panen besar. Sehari mencari uang Rp500.000 bukan perkara sulit. Warung Padang “Ayah”—milik seorang perantau dari Padang Kota—yang pada mulanya hanya satu di dekat pasar di Kota Namlea, membuka cabang kurang lebih sepuluh warung. Toko ponsel diserbu dan selalu menyediakan model-model ponsel terbaru. Tak dapat dinafikkan, demam emas telah menggigilkan seluruh kota. Betapa pun tudingan merusak lingkungan tak terelakkan. Mesti diakui pula penambangan emas Gunung Botak ibarat “momentum emas” yang memberi andil bangkitnya Namlea. Meski cerita getir tentang itu ada di mana-mana: mulai dari rusaknya lingkungan, perkelahian, rebutan lahan, kerusakan, sampai pada efek “minimal” yang bersifat personal: kasus minggatnya istri pemilik kontrakan dengan penambang yang baru panen emas!

Saya sendiri pernah cukup antusias membaca liputan seorang teman, Fatris MF di majalah dan edisi daring *DestinAsia* tentang Pulau Buru, khususnya tentang perubahan gaya hidup yang drastis karena penghasilan emas Gunung Botak.

Namun, sekarang, setelah emas surut, jumlah penambang yang bersisa tak lebih separuh. Hanya ada enam orang penambang di atas kapal, seorang di antaranya adalah anak kecil yang pergi mengantar ikan dalam termos kepada orang tuanya. Sisanya lebih memilih lewat Unit 18 di Waeapo. Itu kenyataan di kapal. Sementara di Namlea, Warung Ayah tinggal empat buah. Penginapan dan rumah-rumah banyak yang kosong. Tukang ojek mengeluh pendapatannya turun drastis.

“Penjualan sekarang lesu, selesu malam-malam Namlea,” kata Bang Fery, pemilik toko ponsel “Galaxi” di jalan ke pelabuhan Namlea ketika kemarin malam saya mampir ke situ.

Bagaimana dengan Kayeli?

“Situasi di Kayeli boleh dikatakan ‘aman terkendali’; tidak banyak berubah,” kata si bapak itu lagi. Ia mengakhirinya dengan senyum ironis.



KMP Danau Rana

Saya mengerti maksudnya. Ketika gunung emas “meletus” di halaman belakang Kayeli, daerah ini tidak banyak mengambil kesempatan. Orang-orang datang dan pergi hanya menggunakan Kayeli sebagai jalur utama, tetapi tidak singgah. Kebanyakan penambang memilih tinggal di Namlea, Wamsait, atau Waeapo. Dari apa yang tampak, Kayeli “stabil”: rumah-rumah mereka yang sederhana dan

kecil tidak menjadi incaran penambang untuk disewa. Tak ada warung makan dan penginapan tidak dibangun. Satu-satunya yang kasat mata adalah diperlebarnya jalan Kayeli—Gunung Botak—Wamsait, sesuatu yang seharusnya. Itu pun demi kelancaran lalu lalang penambang dan itu pun tidak sampai diaspal!

“Danau Rana” perlahan merapat ke Pelabuhan Kayeli. Pohon-pohon kelapa condong tak berbuah dan berderet di pantai, di antara pohon sagu dan rimba bakau. Pluit kapal menjerit dan jangkar dilemparkan ABK. Pukul 10.00 nanti feri akan kembali ke Namlea, lalu langsung kembali ke Kayeli lagi. Pukul 14.00 kembali ke Namlea untuk berangkat keesokan hari lagi ke Kayeli, kecuali hari Sabtu dan Minggu penyeberangan hanya satu trip.

Di luar itu warga bisa menggunakan jasa perahu mesin atau *speedboat*. Boleh dikata urusan transportasi sudah tertangani dengan baik oleh jawatan terkait di Pulau Buru. Selain ketersediaan feri seperti ke Kayeli dan Ambon, juga ada bus Damri ke berbagai jurusan. Ada juga kapal Pelni yang biasanya datang sekali sebulan karena menempuh rute yang panjang. Salah satunya adalah kapal Lambelu sehingga jika kapal ini merapat, akan muncul “pasar Lambelu” di pelabuhan. Para pedagang menggelar rupa-rupa dagangan di pelabuhan. Hanya saja sekarang kapal Pelni jarang muncul (ironi kepulauan!) dan “Pasar Lambelu” terancam hilang dari daftar keunikan Pulau Buru.

Armada dan moda transportasi yang digerakkan rakyat atau sektor swasta terus beroperasi. Di tengah ironi kepulauan, dengan berkurangnya trayek kapal besar ke pulau-pulau tanah air, di Buru khususnya dan Maluku

umumnya, basis transportasi laut masih menjadi andalan. Ada kapal cepat Buru—Ambon, *speedboat* dan perahu bermesin ke daerah-daerah yang sulit dijangkau dari darat, seperti Ilat, Leksula, atau Kepala Madan.

Di jalur darat sendiri tersedia mikrolet dari terminal Kota Namlea ke jurusan yang agak dekat seperti Ubung, Jikumerasa, dan Mako. Sementara itu, mobil *travel* (minibus yang masih berplat hitam) menempuh rute jauh, ke Air Buaya, Baraz dan Namrole. Daerah-daerah yang jalannya masih rintisan, belum diaspal atau rusak, seperti ke Gunung Botak, Kepala Madan dan Danau Rana, menggunakan jasa mobil gardan ganda jenis *hilux* yang tak hanya memfungsikan kabinnya, tetapi juga membuat bangku tambahan dengan papan di bagian bak terbukanya. Jangan lupa ojek yang gampang dicegat di mana-mana untuk transportasi dalam kota.

Saya sempat tercengang ketika feri merapat di Pelabuhan Kayeli yang sepi. Betapa kota yang sering disebut dalam berbagai kronik tentang Buru, bahkan Maluku itu ternyata sangat lengang dan jauh dari yang saya bayangkan. Kenyataan ini makin terasa tak terperikan ketika saya menumpang naik mobil *hilux* yang dimodifikasi sebagai angkutan penumpang yang biasa membawa para penambang emas dari pelabuhan Kayeli ke Gunung Botak. Bangku-bangku kayu buatan dibelintangkan di bagian

belakang dan dijejeri para penumpang dengan barang-barang dipelukan.

Debu beterbangan di jalan tanah. Di kiri kanan mulai tampak kebun jati. Masih belum terlihat satu pun rumah. Barulah setelah melewati jembatan di atas Sungai Masarette yang lebar, saya melihat perkampungan dengan rumah-rumah berderet sampai ke ujung jalan. Dengan nama masa lalu yang besar dan kenyataan hari ini yang tak lebih sebagai kampung yang sepi, pantaslah sebuah laporan di sebuah media daring menyebut “Kayeli, Kota yang Hilang.”



Debu jalanan Kayeli

Dekat jembatan, sopir menghentikan kendaraan.

“Ini, Mas bentengnya,” katanya.

Saya segera melompat turun, membayar ongkos, dan kendaraan pun melaju meninggalkan lebu debu yang bergumpal. Sekali lagi, saya lepaskan pandangan ke alur sungai yang lebar dan berkelok-kelok, penuh bebatuan,

dengan hutan lebat di bagian ke hulu. Beberapa perempuan tampak mandi dan mencuci di alur sungai yang jernih. Sungai inilah yang meluap lebih seabad lampau dan menimbun Benteng Kayeli di sisi selatannya.

Ya, Benteng Kayeli, ke situlah kini saya melangkah dan melewati rumput dan gelagah. Di depan benteng terhampar sebangk tanah lapang yang berumput dengan sapi dan kerbau memamah makanan. Kotorannya berceceran. Lapangan inilah yang dulu disebut Wallace sebagai tempat yang rapi dan kini penuh rumput liar dan kotoran sapi.



Angka yang hilang

Benteng Kayeli sebenarnya cukup unik dari serba-serbi historis. Melihat gerbangnya yang kini terkesan rendah, tertulis angka pembuatan tahun 17.... Angka lanjutannya hilang atau terkelupas. Tidak jelas apakah sengaja dikelupaskan atau tanggal dimakan waktu. Imajinasi

bisa saja mengembangkannya ke dalam angka-angka lain yang bersinggungan secara politis dengan zaman kolonial Maluku dan itulah yang coba saya bayangkan dalam sebuah gubahan cerita.

Tidak ada yang tahu ke mana lenyapnya lanjutan bilangan dua desimal tersebut karena bagian nilai sejarah di Namlea pun tidak dapat menjelaskan kecuali bahwa angkanya terkelupas sejak awal. Meskipun terkelupas, sejarah mencatat dengan yakin bahwa angka yang hilang tersebut tidak lain 85 sehingga jamak diketahui Benteng Kayeli berumbul tahun 1785. Namun, ada pula yang menulis tahun 1718. Bagaimanapun sederhananya, bagi saya ini sebuah misteri.



Tulisan di atas gerbang Benteng Kayeli

Sama misterinya dengan kepemilikan benteng yang bernama asli Benteng Byruns ini. Lambang VOC tercetak di atas gerbang, setelah di atasnya lagi ada narasi dalam bahasa Belanda tentang keterangan benteng. Menurut sebagian pihak, termasuk Wallace, benteng ini didirikan oleh Portugis sehingga sang naturalis sempat memuji dengan sentimental, “O, Lusitania, betapa dirimu adalah sebuah karya seni!”

Jika sekarang yang terlihat adalah lambang VOC, berarti ada pengambilalihan benteng dan kemudian mengubahnya seolah-olah VOC yang mendirikan benteng tersebut sebagaimana diyakini banyak pihak hingga kini.



Menara di sudut Benteng

Apa pun, situasi ini mencerminkan perebutan pengaruh yang jelas di Kayeli berabad-abad lampau antara dua bangsa penjelajah Eropa abad pertengahan. Mustahil

persaingan itu bisa terjadi jika daerah bersangkutan tidak memiliki potensi dan daya jual yang bisa mendatangkan untung. Hanya saja dalam sejarah Maluku dan Nusantara umumnya, Buru tidak kentara dituliskan sebagai rebutan kolonial.

Penghasil rempah-rempah, komoditi penting masa itu, lebih banyak disebutkan di Banda, Saparua, atau Halmahera. Buru lebih disebut sebagai penghasil minyak kayu putih, itu pun pada masa lebih kemudian, sesudah pudarnya semangat ekspedisi Eropa. Cengkih dan pala juga tumbuh baik di Buru, tetapi kita tidak tahu apakah Pelayaran Hongi VOC telah membumihanguskan komoditi ini sehingga tidak bisa bangkit lagi.

Ini merupakan sebuah misteri atau teka-teki yang perlu digali.

Dilihat bentuk bangunannya, Benteng Kayeli terbilang kecil dan anggun. Lebarnya tak lebih dari 300 meter persegi. Bentuknya asimetris. Ada dua gardu di depan, kiri kanan mengapit gerbang utama yang bertulisan VOC dan logonya tersebut. Bentuk gardunya menyerupai cerobong. Benteng terbuat dari bata ukuran besar dan sebagian batu gunung. Tinggi sekitar 2 meter dari yang semula diperkirakan lebih 4 meter. Tebalnya 1,5 meter. Sebuah pintu terletak di dinding kiri hampir menyerupai terowongan. Timbunan lumpur membuatnya begitu rendah dan seolah lobang mencuat dari dalam tanah atau lumpur yang mengeras. Di dalam benteng terdapat sisa dinding pembatas yang tampaknya membagi benteng ini menjadi beberapa bagian serta sebuah sisa bangunan tersendiri dibuat menyerupai kamar di bagian belakang.



Dinding Benteng

Kondisi benteng tampak kurang terawat, pohon-pohon tumbuh di luar dan di dalam benteng. Meskipun di beberapa bagian tampak upaya jejak perawatan, misalnya bekas semak yang dibersihkan, gerbang yang ditutup papan supaya ternak tidak masuk, dan retakan yang disemen, upaya itu tampak akan segera berlalu dimakan waktu sepanjang tidak ada upaya terpadu mengembalikan keadaannya seperti sedia kala. Tentu saja mengembalikan di sini dimaksudkan menjadikannya sebagai destinasi wisata dan objek studi sejarah yang dapat dikunjungi pelajar, mahasiswa, peneliti, dan masyarakat luas yang berminat pada sejarah, khususnya masa lalu Kayeli.

Di dinding benteng saya duduk dan merenung. Terbayang masa lalu pulau-pulau nusantara yang menjadi rebutan segala bangsa, terutama bangsa Eropa. Benteng-

benteng itu sejatinya menjadi penanda yang dapat diolah di masa kini. Selalu di mana-mana saya menemukan benteng-benteng tua yang merana. Di Gorontalo, Benteng Otanaha juga bernasib serupa meskipun perlahan lebih baik karena mulai dijadikan objek kunjungan wisata.

Setelah cukup lama duduk sendirian, saya melanjutkan langkah ke pusat perkampungan. Sebuah masjid tampak di seberang tanah lapang dan ke sanalah saya menuju untuk sekedar istirahat dan jika memungkinkan menunggu salat Jumat. Melihat atap masjid yang bundar seperti kebanyakan atap masjid di mana pun, saya terbayang lagi gambar-gambar masa lalu Kayeli. Di *Wikipedia* atau buku-buku lama, Kayeli selalu ditandai dengan bangunan masjid tua beratap daun rumbia (sekilas menyerupai ijuk) yang arsitektur atapnya lancip ke atas beberapa tingkat, seperti atap pura. Di waktu lain saya bayangkan seperti atap surau-srau tua di kampung saya, Minangkabau sana.

Di manakah masjid itu pernah berada? Apakah di bekas masjid yang beratap seng itu? Atau di suatu tempat yang kini tak lagi bersisa jejak dan tapaknya karena hantaman air bah atau gerusan waktu yang fana?

Sebelum sampai ke masjid, saya lewati sebuah kantor dinas pendidikan pembantu di kiri jalan yang tertutup dan berdebu. Di sana tertulis Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Teluk Kayeli. Ini menyadarkan saya pada dunia administratif terkini bahwa Kayeli yang dulu merupakan tempat kedudukan Petuanan dengan Raja Kayeli, sekaligus pusat pemerintahan Portugis dan VOC, lalu menjadi desa biasa dan kini menjadi kecamatan, yakni Kecamatan Teluk Kayeli.

Meskipun tidak menjadikan Kayeli secara khusus sebagai kecamatan, melainkan meliputi daerah sepanjang teluknya yang luas, tetapi itu sudah cukup seolah mengembalikan jejak kekuasaan Petuanan Kayeli. Kita tahu, teluk besar di utara Pulau Buru ini diambil dari nama Kayeli, sebuah nama yang representatif dari kondisi daerah yang layak menyandang sebutan itu. Meskipun sekarang tinggal sebagai desa yang lengang, sebagaimana Desa Tomini di Sulawesi Tengah—dari mana nama Teluk Tomini yang besar itu diambil, jejak kekuasaannya meliputi selingkar teluk, bahkan sampai ke wilayah lebih pedalaman, seperti lembah Waeapo dan Batabual. Waeapo, tempat inrehab Tapol 65 yang kemudian dijadikan daerah transmigrasi, merupakan tanah ulayat Raja Kayeli dengan wakil raja di Kubalahin. Sementara itu, daerah Batubual wajib hadir dalam pelantikan raja sebagai bentuk pengakuan kedaulatan atas Patuanan Kayeli; begitu pula kawasan di seberang seperti Batuboi, Jamilu, dan Namlea.

Daerah kekuasaan itu kemudian lepas dari kekuasaan raja, mula-mula didahului dengan serah-terima tanah ulayat yang sampai sekarang tidak terungkap dengan jelas syarat dan bentuk perjanjiannya. Setelah para tapol dikembalikan, langsung masuk gelombang transmigran besar-besaran dan bertepatan dengan saat pembaruan perjanjian yang seharusnya dilakukan, Raja Kayeli, Fuad Wael, yang menandatangani dan paling tahu tentang seluk-beluk perjanjian, wafat. Sejak itulah, kawasan Waeapo terlepas dari Kayeli.

Pada zaman Orde Baru, Kayeli hanya berstatus desa sekalipun status raja tidak dihapuskan dan memang tak

bisa dihapuskan. Namun, dengan hanya menjadikan Kayeli sebuah desa, sekaligus melepaskan kampung-kampung di sepanjang Teluk Kayeli dari wilayahnya yang sejati sehingga Kayeli menjadi sangat kecil dan terpencil. Kayeli menjadi bagian Kecamatan Waeapo yang berkedudukan di Mako. Kini setelah otonomi, terbentuklah Kecamatan Teluk Kayeli yang sedikit-banyak mengembalikan beberapa wilayah ke pangkuan, yakni Kaki Air, Masarete, Seith, dan Waelapia—itu pun dengan pusat kecamatan bukan di Kayeli, tetapi di Waelapia.



Masjid Kayeli

Sampailah saya di masjid di ujung tanah lapang yang cukup megah dan besar untuk ukuran masjid di desa, tetapi masjidnya tampak kurang terawat. Toiletnya mampet dan air mengalir sedikit. Yang mengherankan adalah kotoran

kambing berserak di atas terasnya yang luas, padahal hari ini adalah hari Jumat dan dalam hitungan jam waktu Jumat akan masuk. Melihat saya datang, garin masjid segera mengambil sapu dan setengah bergumam mulai membersihkan kotoran kambing.

“Kambing-kambing tak tahu untung, selalu maunya berteduh ke masjid!”

“Mungkin mereka mengira sudah masuk Hari Raya Kurban, Pak,” canda saya mencairkan suasana.



Kampung Kayeli

Garin itu tertawa, lalu duduk di samping saya yang sedikit kepanasan. Ia bertanya dari mana dan hendak ke mana. Saya jelaskan bahwa saya dari Namlea dan ingin bertemu raja. Spontan ia menunjukkan rumah raja, yakni di seberang jembatan Sungai Kayeli, yang dindingnya dicat

hijau dengan pagar besi. Saya mengangguk dan mengatakan akan ke sana sehabis istirahat sejenak.

Dia juga menunjukkan jika ingin berziarah, silahkan ke makam di depan masjid, ada beberapa makam, satu di antaranya paling besar dan menurutnya itu makam seorang habib yang banyak dikunjungi peziarah dari Ambon dan Jawa atau Jambon, Jawa-Ambon. Saya lagi-lagi mengangguk dan akan berziarah nanti setelah keringat kering di badan.

Selanjutnya ia memperkenalkan namanya. Abdul Rasyid. Asli Probolinggo, bahasa ibu Madura. Ia bercerita ikut ke Kayeli bertransmigrasi dengan rombongan 30 KK. Karena berangkat dari daerah pesisir, di Kayeli mereka juga di tempatkan di desa pantai, ia menyebut sebuah dusun di utara Kayeli. Masing-masing keluarga, kata dia, diberi bantuan perahu mesin, tetapi hampir separoh mesin perahunya hilang dicuri. Sejak itulah menurutnya, satu persatu keluarga trans menghilang. Sebagian besar kembali ke kampung halaman, termasuk istri dan anaknya.

“Saya memilih tidak pulang, sama seperti tapol di Waeapo yang dibebaskan, tetapi tetap memilih tinggal,” katanya. Saya mulai tertarik dan merasa boleh juga orang tua ini. Dia bercerita lebih punya harapan di Kayeli daripada kembali ke Desa Ketapang, Probolinggo.

“Bagaimana tidak, Mas,” katanya. “Pohon jati saya sekarang sudah besar-besar. Sejak dusun pesisir itu kami tinggalkan, saya beralih membuka lahan jati.”

Ceritanya kemudian semakin meninggi mendekati khayali. Ia bercerita bahwa dalam waktu dekat, jika pohon jatinya sudah ditebang, ia akan membangun sejumlah

rumah untuk orang-orang terlantar. Mereka tidak hanya akan ditempatkan gratis di rumah-rumah itu, tetapi juga akan disubsidi sebagaimana para transmigrasi di masa awal mereka tiba. Sekali lagi, boleh juga. Namun, dari mana ia akan mendapatkan dana buat membangun rumah? Seberapa luaskah kebun jatinya?

Dia tersenyum dan mengatakan, "Siang malam saya tidur di mihrab masjid ini. Tak seorang pun yang tahu bahwa tengah malam sehabis berzikir saya akan berjalan-jalan sekitar kampung, ke hutan, bukit, dan pantai. Dalam perjalanan malam itu ada banyak emas yang saya temukan tanpa saya harus susah-susah menggali ke Gunung Botak. Emas itu akan melompat ke dalam sarung saya jika saya menolak membawanya. Itulah yang saya simpan selama ini dan tak seorang pun tahu di mana saya simpan. Itulah kelak yang akan saya bongkar."

Saya hanya berdecak dan entah mengapa seperti menemukan masa lalu Kayeli dengan garis khayali.

Setelah penat saya hilang, saya benar-benar berziarah ke makam di depan masjid itu dan mengucapkan salam dan membaca doa-doa. Setelah itu saya pamit ke rumah yang ditunjuk sebagai rumah Raja Kayeli. Ternyata, itu rumah Bapak Abdullah, yang baru dilantik sebagai Raja Kayeli, meskipun setelah saya baca di sejumlah media daring ada beberapa kontroversi. Tentu saja, saya tidak ingin mencampuri urusan internal ini dan kedatangan saya tidak lebih sebagai bentuk silaturahmi. Dengan harapan saya hanya ingin menelisik sisi-sisi budaya dan sejarah terkait Kayeli, bukan menyentuh hal-hwal pengangkatan

raja. Namun, niat tersebut tidak terpenuhi karena setelah mengucap salam dan bertemu tuan rumah, saya mendapat kabar dari seorang ibu bahwa Pak Abdullah tidak tinggal di Kayeli, melainkan di Namlea.

“Bapak tinggal di Namlea karena bekerja di sana dan istrinya juga guru. Coba cari di Namlea,” kata sang ibu memberi ancar-ancar tempat tinggal Pak Abdullah di Namlea.

Saya mengucapkan terima kasih dan berjanji akan mencarinya nanti. Akan tetapi, niat ini kemudian sedikit beralih ketika saya sadari bahwa sebenarnya dalam situasi kemelut interen yang terjadi di Kayeli—di mana terdapat setidaknya tiga raja, pasca-meninggalnya raja terakhir, Fuad Wael—mungkin yang saya butuhkan bukan raja, tetapi informasi yang berhubungan dengan budaya dan sejarah Kayeli.

Untuk ini kemudian saya bertemu Fandi Wael, putra tertua Fuad Wael, yang dibayangkan banyak orang sebagai pelanjut ayahnya. Namun, kenyataannya, Fandi yang sosok muda lulusan STPMD Jatinangor itu tampak tidak terlalu berambisi akan gelar raja. Dia hanya tersenyum ketika disebut sebagai “pangeran”. Ia pun paham bahwa tujuan saya bukanlah soal kedudukan dan tahta Raja Kayeli, maka pembicaraan hanya seputar info kebudayaan.

Pada masa saya kanak-kanak, ayah saya yang gemar *bakaba* biasa mengatakan “bagai dihala garuda,” untuk menggambarkan negeri lengang-sunyi karena terkalahkan. Gambaran itu terasa sangat mengena dalam *kaba* Nan Gombang Patuanan.

Tersebutlah negeri Buluh Katunggalan yang diserang Raja Si Pitoka dari seberang lautan. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih—takdir di tangan Tuhan Allah—Nan Gombang, Raja Ketunggalan, jatuh tertawan. Istrinya, Andam Dewi, yang sedang mengandung Limbak Tuah, dilarikan Si Pitoka buat dijadikan permaisuri—hasrat itulah memang yang jadi bala, kata ayah.

Dalam konteks “kaba” saya saat ini, kalimat ayah yang paling menyergap adalah, “Sejak itu, tidak di bukit, tidak di lurah, di tengah pasar atau tepian, bahkan hingga pintu rumah, tak ada lagi kelihatan sekalian manusia. Negeri Buluh Katunggalan mati sudah, sunyi senyap, bagai dihala garuda, tujuh ekor garuda....” Dengan itu, saya dapat mendengar kepek burung garuda saat terlelap.

Ungkapan itu dipinjam Pram menggambarkan suasana sepi yang sama saat pertama kali ia tiba di Teluk Kayeli.

”Kemudian kapal menikung memasuki Teluk Kayeli, luas, indah, dan menjorok dalam masuk ke daratan, seperti sebuah pangkalan angkatan laut yang telah ditinggalkan sepuluh abad. Tampak Namlea, sebuah pelabuhan alami di teluk dihiasi rumah-rumah kecil seperti kardus.... Sebuah masjid bermenara menjenguk pantai dalam kelengangannya. Tak tampak seorang pun di Namlea. Seperti dusun—kalau

menggunakan ekspresi Melayu lama—sedang dikalahkan garuda.”

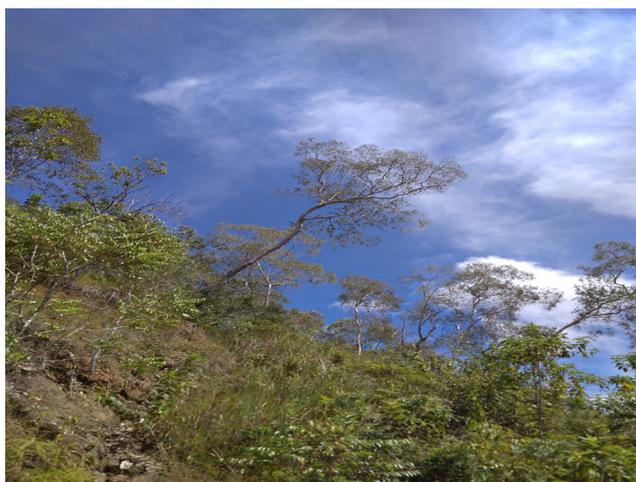


Sungai Kayeli

Meskipun Pram menyebut Namlea, ombak yang berdesir di lengang pantai bawah menara masjid itu adalah ombak dari teluk yang sama dan ombak yang menyepuh lengang pantai Kayeli juga, bahkan lebih lengang karena Namlea yang sudah menjadi “kota” pun sudah dikalahkan garuda, apalagi Kayeli yang berpuluh tahun ditinggalkan. Sungguh ini mempertegas kesunyian.

Kini pun saat datang, ungkapan itu saya kira masih bisa digunakan. Kayeli terlihat lengang siang itu. Rumah-rumah banyak tutup pintu. Ke mana penduduknya? Saya menemukan seorang laki-laki duduk merokok di tepi Sungai Kayeli yang jernih. Saya tanyakan apakah penduduk pada melaut atau ke ladang, tetapi menurutnya tidak.

Kalau melaut, siang hari justru sudah pulang, katanya. Mereka ternyata ke Gunung Botak. Yang ke sana bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan, bahkan anak-anak. Sejak emas Gunung Botak ditemukan, begitulah keadaannya. Konon, ada bagian di Sungai Anahoni yang khusus diolah oleh warga Kayeli, penambang pendatang dipersilakan menggali lobang dan terowongan.



Pohon kayu putih di Kayeli

Dari laki-laki ini pula saya mengetahui bahwa Pak Rasyid yang menjaga masjid memang sudah lama “miring”, tepatnya ketika ditinggal istrinya pulang ke Jawa. Namun, ia baik dan rajin bekerja dan “kemiringan”-nya hanya dalam soal berkhayal. Orang kampung menyayangnya dan ia bebas makan di rumah siapa saja.

Sehabis mendengar cerita itu, saya berjalan ke pantai mencari tahu di mana tempat penangkaran penyu yang pernah digalakkan WWF. Seorang kawan di Ambon sempat

memberi tahu bahwa di Kayeli ada penangkaran penyu. Tempatnya sudah pindah, ternyata. Bukan di Kayeli lagi. Apakah program WWF berhasil atau tidak, saya tidak tahu. Namun, melihat Teluk Kayeli yang mengalami sedimentasi dari lumpur sungai-sungai yang mengalir ke dalamnya, saya merasa situasi kurang aman. Apalagi jika kita mengingat merkuri Gunung Botak yang dapat meruyak ketenteraman sewaktu-waktu.



Menuju Gunung Botak

Sementara itu, pada beberapa peta saya melihat ada setidaknya dua pulau kecil di bibir pantai Kayeli. Pulau itu ternyata terbentuk dari sedimentasi lumpur. Di peta yang sama saya juga melihat ada dua danau kecil di atas perbukitan Kayeli. Namun, jalan ke sana agak sulit karena dipenuhi belukar. Apa pun, dengan topografi seperti itu, boleh dikata Kayeli sebagai “Kampung Atlas”, meminjam sebutan Semarang sebagai “Kota Atlas”. Artinya, hampir

semua tanda alam di peta dimiliki Kayeli: hutan, sungai, danau, laut, teluk, dan pulau. Sungguh potensi luar biasa untuk dikembangkan jadi destinasi wisata dan kegiatan pelestarian.



Gunung Botak di kejauhan

Sesungguhnya, penyulingan kayu putih yang menjadi komoditi Buru sekarang pun dimulai pertama kali di Kayeli. Ketel terbanyak dimiliki oleh penduduk Kayeli sendiri. Waktu Willer, asisten residen membuat laporan tentang cara penyulingan berikut perhitungan biayanya, sebenarnya ia merujuk pada orang-orang yang menyuling di lereng gunung belakang Kayeli. Pada masa itu sudah ada orang Ambon, Wakano, dan Serhalawan yang mempunyai ketel penyulingan di situ, meskipun jumlahnya tidak banyak, demikian dikisahkan Beb Vuyk.

Pramoedya Ananta Toer juga sempat menyinggung demikian, "Orang bilang Kayeli pada mulanya berasal dari kata Belanda: *Kayoe Poeti Olie*. Mungkin dongengan jahil. Memang Kayeli produsen minyak kayu putih terbesar dan tertua sepanjang dikenal tulisan."

Karena itulah saya agak merasa heran ketika melihat pohonan kayu putih dibiarkan tinggal di perbukitan Kayeli. Tidak terlihat aktivitas mengurus daun, apalagi penyulingan. Perburuan emas tampaknya menyita waktu penduduk tahun-tahun belakangan ini.

Tak ada yang perlu disesali karena bagaimanapun kehidupan terus berjalan di Kayeli. Yang lewat menyejarah, yang sekarang nyata, dan harapan ada pada yang bakal tiba. Tak selalu mulus, memang, karena sejarah dan kehidupan bukan garis linear.

Jalan di Kayeli belum beraspal karena itu debu beterbangan setiap kali ada kendaraan yang lewat. Sebuah kendaraan lewat dari pantai membawa sejumlah penumpang dan sebuah kulkas. Saya akhirnya menumpang mobil *hilux* itu menuju Gunung Botak. Jalanan tanah yang luas membentang, naik-turun perbukitan dengan hutan kayu putih di kiri-kanan. Barulah ketika sampai di bagian tertentu ada terlihat rawa-rawa dengan pohon sagu. Sagu yang menghitam saya kira bekas terbakar, tetapi itu merupakan efek dari merkuri penambang.

Saya sampai di titik pemberhentian Gunung Botak, tempat bertolak para penambang dengan berjalan kaki menuju beberapa pos di kaki, lereng, dan puncak Gunung Botak. Polisi bersenjata laras panjang tampak berjaga-jaga.



Titik kumpul ke gunung Botak

Tentu saja, hal-hal biasa terjadi di tengah daerah tambang (apalagi dianggap liar) yang rawan. Sebuah bangunan permanen sengaja didirikan di situ sebagai pos keamanan. Di sampingnya, terdapat musala kecil. Selebihnya adalah bedeng bambu dan tenda-tenda plastik yang dijadikan warung. Tenda-tenda yang umumnya berwarna biru laut itu juga digunakan sebagai “rumah” para penambang di lokasi penambangan. Dari jauh, tenda-tenda itu tampak seperti rumah-rumah kumuh di wilayah padat penduduk di suatu kawasan Brazil, India, atau Jakarta.

Saya mampir di salah satu warung tenda memesan kopi dan mi telur. Hawa di dalam tenda terasa panas menyengat yang membuat nafas saya sesak. Akan tetapi, pengunjung lain tampak biasa saja menyantap makanannya, merokok, atau minum kopi. Salah seorang yang minum kopi bersama

saya adalah Marselo, seorang anak muda dari Ambon. Ia sudah meninggalkan bangku sekolah menengahnya sejak tahun lalu di pinggirannya di Mardika dan ikut pamannya mengadu untung ke Gunung Botak. Baju lengan panjangnya dan sebuah topi di kepala ia biarkan menutupi rambut keritingnya ala *rapper*, tanpa merasa gerah.



Tambang emas tradisional di sungai Anahoni, Gunung Botak

Tampak ia sudah terbiasa. Menambang dalam lobang-lobang galian pastilah jauh lebih menandakan tenaga dan oksigen. “Biasa berpanas-panas, Mas,” katanya sambil menghembuskan asap rokoknya. Ia bercerita di Pos I, II, dan III, ada macam-macam lobang dan terowongan yang menantang. Pengab dan panas, terbatasnya oksigen, atau sebaliknya sangat dingin dan lembab seperti terowongan hemat angin dan rembesan air mata. Ada pula terowongan yang dinamakan sesuai dengan keadaan, misalnya

Terowongan Janda karena banyak merenggut nyawa para lelaki yang membuat para istri menjanda.

Meski mencoba tertawa, hati saya sebenarnya getir. Akan tetapi, Marcelo lebih tangkas lagi menghibur, ”*Tapi jangan khawatir, Mas, di antara yang buruk-buruk terdapat kabar baik. Ada Terowongan Avansa, Xenia, Innova, sampai Pajero. Lobang Tiga Istri juga ada.*”

Kali ini saya tidak bisa menahan tawa. Orang kita memang kreatif menamakan sesuatu.

Di luar tenda, tidak henti-hentinya orang datang dan pergi. Naik-turun ojek atau mobil gardan ganda. Yang pergi biasanya membawa tas atau buntalan. Sebagian membawa lumpur galian yang sudah diayak dalam karung untuk selanjutnya diolah di rumah atau tempat khusus yang didirikan secara kongsi di kampung terdekat. Di Kampung Kayeli saya melihat cukup banyak tempat pengolahan pasir ini. Proses kerjanya biasa mereka sebut *men-disel*. Rombongan yang baru datang biasanya membawa perbekalan berupa sembako bagi sesama penambang di puncak. Ada pula yang datang membawa papan dan kayu-kayu untuk keperluan membuat terowongan. Pendek kata, aktivitas tampak sangat hidup dan ramai. Sebagian mandi dan mencuci di kali kecil di samping masjid, yakni kali yang tidak terkena lumpur galian emas dan otomatis juga tidak terkena cipratan merkuri.

Polisi bersenjata laras panjang saya lihat mulai berkeliling. Menurut cerita pemilik warung, tadi pagi petugas mengultimatum bahwa semua tenda harus dibongkar paling lambat besok pagi. Alasannya, warung-

warung ini sudah terlalu banyak, bertambah dari hari ke hari memenuhi tak hanya titik pemberhentian penambang, tetapi meluber ke sisi jalan. Juga faktor keamanan yang kian rawan. Akan tetapi, menurut pemilik warung alasan yang sebenarnya bukan itu. Petugas ingin mengosongkan lokasi karena perusahaan besar yang beroperasi dengan mengatasnamakan normalisasi Sungai Anahoni akan segera membangun *basecamp* di lokasi. Meskipun memang semalam, menurut pemilik warung, ada keributan di antara penambang. Itu hal biasa di lokasi ini. Tak ada alasan untuk menguir para pedagang. Toh si pedagang yang bercerita saya lihat sangat tenang dan tak ada kepanikan di wajahnya. Mungkin juga karena sudah biasa.

Meski jauh dari lokasi penduduk, harga makanan di warung tenda normal alias terjangkau. Sepiring nasi campur hanya Rp10.000. Mi instan yang saya pesan dengan telur, nasi putih, dan tempe goreng hanya Rp8.000. Segelas kopi Rp3.000 dan sebotol air mineral ukuran sedang Rp5.000. Saat saya hendak membayar kopi dan rokok Marcelo, dia menolak. Ternyata, ia sudah biasa mengambil makanan di warung orang Bugis itu dan nanti dihitung setiap akhir pekan.

Saya memutuskan naik ke Pos I, yakni lokasi penambangan di kaki bukit tempat Sungai Anahoni mengalir berupa air terjun. Kita harus menyisir sepanjang bantaran sungai yang kini tampak begitu lebar setelah dikeruk dan diratakan oleh perusahaan yang mendapat izin dari Dinas Pertambangan Maluku. Alasannya, mereka diberi konsesi untuk bekerja menormalisasi sungai—tetapi dicurigai penambang sebagai akal-akalan. Setelah pekerjaan

normalisasi sungai selesai, perusahaan tidak kunjung beranjak pergi, malahan membuat *basecamp* penambangan di bagian hilir Sungai Anahoni.

Perusahaan tersebut ada dua dan izinnya konon langsung dari Jakarta atau Ambon karena otoritas penambangan ada di tingkat provinsi dan pusat (Jakarta). Itulah sebabnya ketika ricuh tambang emas Gunung Botak terjadi beberapa kali, Pemda Buru tidak bisa berbuat banyak karena semuanya ditangani pihak pertambangan dan keamanan dari Ambon. Meskipun demikian, masyarakat adat Kayeli tidak tinggal diam. Mereka ikut berpartisipasi mengamankan lokasi, terutama memantau hal-hal yang tak diinginkan.

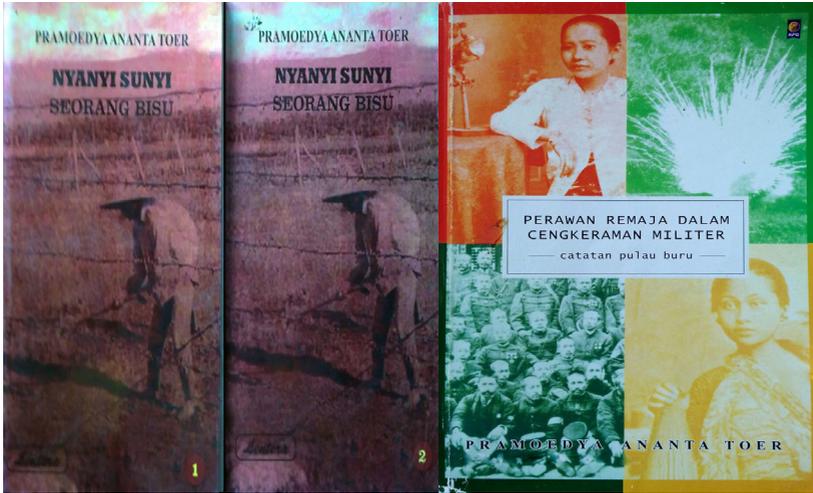
Semua keadaan yang saya lihat dan cerita yang saya dengar, entah kenapa membuat saya selalu terkenang kampung tua petuanan tempat raja bertahta, tetapi seolah tak punya otoritas lagi, o, Kayeli!

Bertahun-tahun lalu ketika saya masih berseragam putih-biru, dengan takjub membaca koleksi perpustakaan sekolah, saya benar-benar jatuh cinta pada sejumlah novel. Selain *Sebuah Rumah Nun di Sana* Beb Vuyk, saya terkesan dengan *Orang-Orang Trans* (1985) N.H. Dini, *Anak Tanah Air* (1985) Ajip Rosidi, *Dan Perang pun Usai* (1979) Ismail Marahimin.

Kenangan akan dunia literasi kian membesar saat seragam putih-abu-abu saya kenakan di sebuah sekolah menengah atas di kota kabupaten. Namun, *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu* Pramoedya belum saya baca, tentu saja. Buku yang berisi catatan, reportase, dan surat-surat tak sampai itu baru terbit dalam bahasa Indonesia tahun 1996 setelah edisi bahasa Belanda justru terbit jauh lebih dulu pada tahun 1988.

Tahun 1996 saya sudah berada di Denpasar. Saya memutuskan merantau dan seragam putih-abu-abu saya tanggalkan. Suatu siang, Muchsin Lubis, seorang wartawan senior di *Harian Nusa Tenggara* menyampaikan kepada saya bahwa buku Pram baru saja terbit.

“Abang tak *peduli* kau makan apa besok, buku ini mesti dicari. Dalam hitungan hari atau jam pasti akan dilarang!”

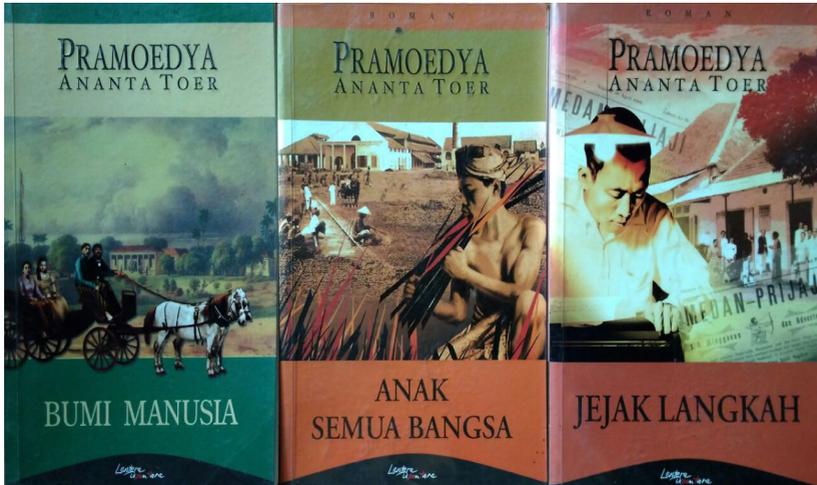


Buku-buku Pramoedya Ananta Toer

Ia belajar kepada yang sudah-sudah. Tidak terhitung buku Pramoedya Ananta Toer yang dilarang beredar begitu diterbitkan. Penjual dan pembaca yang kedapatan menyimpan buku terlarang itu akan ditangkap dan dipenjarakan. Sekitar tahun 80 hingga 90-an, buku-buku Pram memang cukup gencar diterbitkan, walau di bawah tanah, terutama oleh Hasta Mitra yang dikelola Josoef Isak, kawan senasib Pram di Buru.

Waktu Pram dipulangkan dari Buru tahun 1979—setelah tertunda-tunda, membuat dunia internasional resah—Isak yang dibebaskan lebih dulu, sudah menyiapkan “perahu” Hasta Mitra. Perahu kecil itu menampung beberapa rekannya sesama tapol yang perlu pekerjaan untuk kembali ke tengah masyarakat. Sekaligus dengan itu

memulai pekerjaan idealis menyambut kepulangan Pram dari “negeri antah-barantah”. Pram pulang tidak dengan tangan kosong. Ia membawa “oleh-oleh” luar biasa mahal dari lembah Waeapo: novel dan catatan-catatan.



Tiga diantara Tetralogi Pulau Buru

Tetralogi *Bumi Manusia*, *Anak Semua Bangsa*, *Jejak Langkah*, dan *Rumah Kaca*, pada mulanya dilisankan Pram di Pulau Buru. Keadaan di barak tak memungkinkannya menulis. Pram menceritakannya kepada kawan-kawan senasib, bukan sekadar pengantar tidur. Bukan sekadar pelipur lara. Melainkan dengan satu kesadaran betapa sengit pergulatan manusia Indonesia merumuskan nasionalisme yang menentang arus kolonialisme.

Karya utama Pram yang lain, *Arus Balik*, juga anak kandung bumi Bupolo, meskipun benihnya sudah ada sejak di Jawa. Sementara novelnya yang tidak terlalu banyak dibicarakan, tetapi menyimpan kalam sejarah bangsa,

berkisah tentang nasib jugun ianfu di Pulau Buru. Itulah *Remaja Perawan dalam Cengkeraman Militer* (2001). Pengumpulan bahannya banyak dibantu kawan-kawan tapol, termasuk cerita langsung dari ibu raja Nafsiah Wael, istri Raja Kayeli, Ishak Wael. Ibu raja sering berdiskusi dengan Pram di Mako karena sebagai janda penguasa Waeapo, Nafsiah Wael diberi keleluasaan ke luar masuk kawasan tefaaf untuk berjualan (lihat Dhimam Abror, 2008: 27). Kemudian, karya Pram yang khusus membahas kehidupan tapol terbit dalam dua jilid yang sangat bernilai dokumentatif: *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu*.

Buku terakhir itulah yang segera saya cari begitu Bang Muchsin memberi informasi. Syukurlah saya mendapatkannya di swalayan “Hero” di bilangan Jl. Teuku Umar, tentu setelah mengencangkan ikat pinggang. Maklum sebagai perantau pemula saya hanya mengandalkan honor menulis di *Bali Post*—yang ruang budayanya diasuh penyair Umbu Landu Paranggi dan *Nusa Tenggara* yang rubrik *feature*-nya dikelola Muchsin Lubis. Sayang sekali, hanya ada jilid pertama yang dicetak dengan kertas buram tipis. Penerbitnya pun bukan Hasta Mitra, tetapi Lentera yang saya duga sebagai taktik berkelit dari radar pemerintah. Alih-alih menunggu jilid kedua, sehari setelah jilid pertama saya peroleh, seperti diduga, Kejaksaan Agung RI melarang peredarannya!

Dari jilid pertama itu saya sudah bisa “berangkat” ke Buru. *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu* memuat informasi yang kaya, bukan saja tentang kehidupan tapol, tetapi juga kehidupan masyarakat Buru. Sejatinya, buku itu merupakan catatan harian Pramoedya, surat-surat yang tak

jadi terkirim, reportase, dan berbagai kisah hidup para tapol. Pram pandai benar mengolah kisah pribadi dan kolega serta memadukannya dengan latar alam, kultur, dan masyarakat setempat.

Buku bernuansa merah tanah berkover lelaki sedang mencangkul itu segera menarik minat saya sebagaimana saya tertarik dengan buku-buku terdahulu. Saya pun berusaha memburu jilid kedua yang akhirnya saya peroleh dari seorang kawan di Gang Rode sewaktu saya sudah “hijrah” ke Yogyakarta. Ajaibnya, hampir semua karya paling berkesan bagi saya meskipun dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik yang berbeda, baik langsung maupun simbolik, ternyata bermuara ke satu tempat: Pulau Buru.

Percaya tak percaya: *Sebuah Rumah Nun Di Sana* mempertemukan saya dengan Namlea dan sekitarnya. *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu* membawa saya ke unit-unit Inrehab Waeapo. *Anak Tanah Air* bercerita tentang pergulatan ideologi seniman Jakarta tahun 60-an. Tokohnya seorang pelukis yang tertarik ideologi komunis. Ketika gegar Peristiwa '65, ia mengalami nasib yang menyedihkan: ditangkap tanpa pengadilan. Nasibnya merepresentasikan nasib banyak orang dengan tragedi yang sama, termasuk yang dikirim ke Pulau Buru.

Di Buru pula saya diharu-biru jejak pilu *jugun ianfu* sebagaimana dengan detail diceritakan Pram dalam *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer*. Bersamaan dengan itu, saya bertemu situs-situs militer Jepang di Namlea dan sekitarnya. Kisah militerisme Jepang dengan kekejaman yang sama, sebelumnya saya baca dalam buku *Dan Perang pun Usai*.

Berikutnya *Orang-Orang Trans*. Menurut saya inilah novel N.H. Dini paling kuat dan termasuk sedikit novel berlatar pertanian di tanah air. Ironisnya, novel itu tidak pernah dicetak ulang seperti novelnya yang lain. Novel ini bercerita tentang kehidupan orang-orang Jawa yang bertransmigrasi ke Pleihari, Kalimantan Selatan. Mereka membuka hutan dan menyemai benih kehidupan.

“Dunia transmigrasi” Pleihari mempertemukan saya dengan “dunia transmigrasi” Waeapo. Biar pun *setting*-nya berbeda, satu di Kalimantan, pulau terbesar di Indonesia, satu di Buru, pulau besar di Maluku—hampir dua kali Pulau Bali, tetapi semangatnya sama.

Saya merasa, semua itu akhirnya bertemu di lembah subur Pulau Buru: Waeapo.



sawah di waeapo

Ya, di Waeapolah kisah-kisah sejenis sambut-bersambut. Ada pergulatan ideologis di tanah air yang berakhir antiklimaks September 1965 yang melahirkan berpuluh-puluh ribu tahanan politik. Tahun 1969—1979 para tapol yang tersebar di ibu kota dan berbagai penjara di Pulau Jawa itu dikirim ke Pulau Buru. Pram menyebutnya “Pulau Hidup Baru” sebagai sebuah satir atas istilah pemerintah yang menyebutnya “proyek kemanusiaan”. Secara resmi proyek tersebut bernama Instalasi Rehabilitasi (Inrehab) atau Tempat Pemanfaatan Tahanan Politik (Tefaaf) Buru.

Inrehab atau tefaaf dipusatkan di lembah Waeapo. Di sini para tapol diperintah membuka lahan dalam pembagian wilayah yang disebut *unit*. Unit-unit itu sangat luas yang mencakup hampir keseluruhan lembah Waeapo. Ada 21 Unit, mulai dari Unit 1 sampai Unit 18, plus Unit R, S, dan T. Lokasi unit menyebar secara acak. Masing-masing memiliki nama kampung misalnya Unit I/Wanapura, Unit II/Wanareja, Unit III/Wanayasa, Unit IV/Savanajaya, Unit V/Wanakarta, dan seterusnya. Sebagian nama masih dipertahankan sampai sekarang dan sebagian lagi sudah hilang atau berganti.

Itu belum termasuk unit non-areal atau unit khusus sebagaimana dicatat Mars Noersmono dalam bukunya, *Bertahan Hidup di Pulau Buru* (Ultimus, 2017). Di antaranya unit produksi garam di Sanleko, unit gula aren yang terletak antara unit II/Wanareja dengan unit XIV/Bantalareja, dan unit penyulingan minyak kayu putih di Ketel Timba.

Pada bulan November 1979 rombongan terakhir tapol dibebaskan, termasuk Pram. Hampir bersamaan dengan itu, pada awal tahun 1980, masuklah rombongan

transmigrasi yang pertama dari Jawa. Antara tapol dan transmigran seolah berselisih jalan. Mereka tak sempat saling mengucapkan selamat datang dan selamat tinggal, kecuali sekitar 200 orang tapol yang tidak pulang. Mereka tak pernah lagi meninggalkan Waeapo untuk selamanya dan hidup berbaur dengan orang-orang trans yang baru datang.

Betapa takjub saya kepada sastra, betapa takjub saya kepada dunia literasi. Ia telah membuat simpul-simpul perjumpaan yang tak terduga. Dan saya percaya tak ada yang kebetulan. Jika pun kebetulan, itu adalah kebetulan yang indah—kadang lebih indah daripada apa yang direncanakan.

Kini saya sampai di Waeapo pada suatu tengah hari ketika jalanan berdebu dan kuik elang mengepak selurus matahari. Di bawah matahari yang membuat runduk daunan kayu putih, mengalir Sungai Waeapo. Dari sungai yang memancar dari Danau Rana dan bermuara di Teluk Kayeli inilah semua kawasan dinamakan.

Ada yang menulis Wayapo atau Waiapu. Ada pula yang dipisahkan: WayApo atau WaiApu. Pram sendiri menulisnya tidak tetap. Hal itu merujuk nama yang terpampang di plang kantor polsek dan kecamatan, yakni nama mutakhir adalah Waeapo. Saya menduga bagaimana orang Lampung menyebut sungai dengan “way”, orang Buru juga demikian. Banyak nama sungai diawali “way” atau “wae” dan dalam proses penyebutan dan penulisan mengalami penyesuaian.

Saya masuk Waeapo pertama kali melalui “pintu belakang”, yakni dari Kayeli. Kalau mau disebut “pintu depan”, tentu saja jalur Namlea—Waeapo yang merupakan jalan trans Pulau Buru, kecuali mulus dan lapang. Transportasinya juga maju lancar. Berbeda dengan jalur Kayeli yang masih berupa jalan alternatif, berbatu-batu, dan sebagian belum diaspal. Orang juga harus menyambung perjalanan di Unit XVIII/Deboway atau disebut juga Kilometer 18 dengan menunggu oto atau bus Damri. Ojek merupakan moda transportasi yang paling cepat di jalur ini.

Seorang pengojek muda membawa saya membelah lembah Waeapo dengan keluasan sawah dan rumah-rumah khas daerah transmigrasi—meski sebagian besar sudah berubah. Sesampai di Kilometer 18, ketimbang menunggu oto, saya *bilang* kepada tukang ojek untuk mengantar saya langsung ke Mako. Kami menyusuri jalan tanah yang dulu dibuka para tapol yang belum banyak berubah. Unit-unit yang agak di pedalaman—dalam arti jauh dari jalan utama—memang masih beraroma Buru masa lalu. Hanya sabananya saja yang sudah berganti sawah. Tempat penyeberangan dengan *pontong* masih ada, yakni rakit kayu yang diberi pengapung drum kosong dan cantelan tali yang dilintangkan di atas sungai. Di atasnya mobil dan motor diseberangkan tanpa harus mendayung atau menggalah.

Kami naik *pontong* menyeberang Sungai Waeapo yang lebar menuju Air Mandidih di Unit I. Ongkosnya Rp10.000, sudah termasuk tukang ojek dan motornya. Kerja tukang *pontong* tampaknya tak sulit. Tinggal mengaitkan tali seturut arus, *pontong* akan bergerak sendiri. Karena itulah tiga orang penunggunya dalam kondisi santai sekali;

seorang memancing, seorang berkelumun kain sarung, dan seorang lagi memutar radio. Suara radio yang mendesis di antara riak air dan tiupan angin membawa perasaan saya ke suasana masa lalu saat negeri ini bertikai sengit sesama saudara sebangsa. Di samping saya, seorang tentara ikut menyeberang. Membuat suasana makin dalam.



Penyeberangan ke Air Mandidih

Saya pandangi alur Waeapo yang berkelok-kelok dengan semak-semak dan hutan bambu. Sungai ini bisa dimudiki dengan perahu ke hulu. Muaranya menuju Teluk Kayeli. Selain lewat pantai Sanleko yang dekat ke Unit Savanajaya, sebagian tapol dulunya dibawa dengan perahu melalui jalur ini. Lewat jalur ini juga kebutuhan tapol dikirimkan, yakni alat-alat pertanian, pupuk, dan obat-obatan untuk klinik kesehatan. Namun pada kenyataannya, para tapol bekerja dengan alat seadanya, pupuk yang tak

terpakai atau raib, dan penderita malaria yang dibiarkan meringkuk tanpa pengobatan memadai. Ini tidak aneh jika melihat perangai oknum petugas yang jadi pecundang. Kadang-kadang perintah mengangkut kayu, papan, dan beras dilakukan secara gelap ke Namlea untuk memenuhi kebutuhan pribadi oknum komandan tefaaf.

Ah, sungai ini telah menghidupi lembah Waeapo, tetapi juga sudah banyak merenggut hidup para tapol; disambar buaya, hanyut, tenggelam, atau ditenggelamkan!

Kami sampai di seberang, yakni di tepian Air Mandidih. Pram sering menyebut nama ini karena tempat ini merupakan jalur penghubung ke sejumlah unit. Lokasi penyeberangan yang baru saya lalui, menurut seorang penumpang, sudah ada di sana sejak zaman tapol. Hanya penunggu dan *pontong* saja ganti-berganti, entah kapan berganti jembatan.

Kampung Air Mandidih kecil saja. Dari tepi sungai hingga ke arah pusat kampung didominasi rawa. Sebuah gudang Bulog tegak seperti kehabisan lahan. Begitu pula sebuah sekolah di antara mengapung dan tenggelam di timbunan rawa yang tetap basah. Di bagian rawa yang membelukar terdapat bekas beberapa bangunan tua yang menunggu angslup ditelan bumi. Itu gudang-gudang zaman tapol yang dianggap tak lagi berguna.

Keluar dari jalan tanah Air Mandidih, persis di samping Masjid Raya Mako, saya langsung disambut jalan aspal yang mulus dengan sebuah tikungan tajam dekat pasar. Itulah jalan raya utama Pulau Buru yang menghubungkan Namlea—Waeapo hingga Namrole di Buru Selatan. Pasar

itu sendiri merupakan kawasan Mako, sebagai akronim dari Markas Komando, karena di situlah dulu komandan inrehab berkantor.

Dari Mako, koordinasi 21 Unit yang tersebar di lembah Waeapo dilakukan. Tak heran daerah ini menjadi paling ramai hingga sekarang. Sebenarnya kantor camat, polsek, koramil, kantor pos, dan lain-lain terletak dalam wilayah yang lebih luas, yakni Waenetat. Orang tetap menyebutnya Mako.

Berbagai fasilitas ada di Mako, yakni pasar, perkantoran, dan pertokoan. Ada toko alat pertanian, pupuk, sembako, warung makan (eh, ada warung Padang Ayah juga!), apotek, penginapan, tukang cukur (Rp20.000/kepala; di Yogya cukup Rp8.000 saja), bank, *dealer*, bengkel, toko mainan anak, swalayan, toko emas, dan tukang kunci.

Saya mencari tempat menginap dan setelah berkeliling menemukan ada sekitar 4—5 penginapan di sekitar Mako. Ada di pinggir sawah dengan angin sepoi-sepoi dan pemandangan indah, tetapi lokasi penginapan jauh ke mana-mana. Ada penginapan berpendingin ruangan, tetapi kamarnya sempit. Pilihan saya jatuh ke Penginapan Resty dekat tikungan, di tempat saya pertama kali keluar dari Air Mandidih. Pertimbangan saya lebih dekat dengan pasar jika saya memerlukan sesuatu. Lagi pula, ada masjid tempat saya bakal bertemu dengan banyak orang.

Penginapan ini adalah rumah biasa yang sangat sederhana dan bekas tempat tinggal si empunya yang sekarang sudah punya rumah baru di sebelah. Suasananya terasa sejuk dengan lantai semen model lama, mengingatkan

rumah bibi saya di kampung. Pemiliknya berasal dari Pati, yang dibawa bertransmigrasi sejak usia 8 tahun. Hanya saja karena di bagian depan digunakan tempat berjual ayam potong, yang dihasilkan dari peternakannya sendiri di belakang rumah, baunya agak kurang sedap. Sese kali aroma pakan ayam masuk ke kamar dibawa angin santer Waeapo.



Jalan raya Mako

Namun, biarlah, pikir saya, hitung-hitung merasakan bau Waeapo dari dunia transmigrasi. Untuk diketahui, sebagai daerah transmigrasi, Waeapo tak hanya menghasilkan padi dengan petani yang tekun, tetapi juga menghasilkan berbagai hewan ternak mulai ayam, kambing, sapi, dan kerbau pilihan.

Hal ini tidak jauh berbeda pada zaman tapol dulu. Para tapol tidak hanya membuka sawah bercocok tanam, tetapi juga memelihara hewan ternak. Itulah sebabnya, ketika para tapol dibebaskan, mereka tidak hanya mewariskan

sawah dan lahan pemukiman buat saudara sebangsa mereka dari Jawa, tetapi juga melepas dan membagikan sapi-sapi, kerbau, kambing, ayam, dan itik peliharaan mereka.

Dari sebagian sapi dan kerbau yang berkembang biak di lembah Waeapo sekarang, siapa yang menjamin “*steril*” dari keturunan sapi dan kerbau milik tapol? Apa pun, semangat bertani dengan segala bidang garapannya, terpancar dari dua dunia yang berbeda jauh keadaannya. Satu ditangani rezim atas nama hukuman dan rehabilitasi dan satu lagi difasilitasi atas nama pembangunan, Pelita, Repelita, dan entah apa lagi. Dua dunia itu bertemu di Waeapo, syukurlah kemudian menjadi kekuatan ganda dalam mengolah tanah Bupolo menjadi lumbung pangan di Jazirah Para Raja.

Kepada ibu pemilik penginapan saya bertanya apakah dia mengenal mantan tapol di sekitar Mako. Dia langsung menyebut dua nama: Pak Dasipin dan Pak Kamto. Ancar-ancar rumahnya pun ia tunjukkan. Ibu Resty sendiri tidak tahu banyak tentang tapol karena ia dibawa ke Mako oleh orang tuanya sewaktu dia masih kecil. Waktu itu sawah dan lahan pekarangan sudah tersedia. Dari cerita ke cerita, barulah ia tahu bahwa sawah dan lahan yang ia terima sekeluarga seluas tiga hektar lebih merupakan lahan yang dibuka oleh tapol. Mendengar cerita itu terbit rasa hormat Ibu Resty kepada tapol yang ia jumpai.

Memang, anak-anak transmigrasi yang sekarang menjadi generasi kedua atau ketiga di Waeapo menghormati mantan tapol sebagai tetua yang berjasa. Jumlah tapol yang memilih tidak pulang ke Jawa pascapembebasan ada sekitar 200 orang. Mereka mendapat jatah tanah sama dengan para transmigran. Mereka tersebar di unit-unit. Jumlah

mereka yang terbanyak di Unit IV/Savanajaya karena dulu merupakan unit khusus untuk tapol yang berkeluarga. Di Unit I/Wanapura, tempat Mako terletak, ada sekitar lima orang tapol yang masih hidup.

Berbekal informasi dari Bu Resty, sehabis salat Magrib berjemaah di masjid, saya mendatangi beberapa orang yang sedang duduk-duduk menunggu waktu salat Isya. Saya berkenalan dengan mereka yang salah satunya adalah Pak Ahmad, guru Fisika di SMA 3 Waeapo. Ia berasal dari Pangandaran, Jawa Barat, yang dibawa bertransmigrasi bersama tiga orang saudaranya oleh orang tua dan pamannya ketika berumur 6 tahun.

Malam itu juga Pak Ahmad mengantar saya ke rumah Pak Dasipin di pasar Mako. Bagian depan rumahnya disewakan kepada penjual kartu telepon seluler. Tempat tinggalnya di rumah yang lebih besar—tetapi masih terbengkalai—di belakang. Begitu Pak Ahmad mengucapkan salam, terdengar suara lelaki dengan nada besar menyambut salam. Berbarengan dengan itu, pemilik suara muncul di ambang pintu dengan rambut ubanan berkilau ditimpa cahaya lampu. Pundaknya yang juga tersepuh cahaya tampak kukuh.

“Ada tamu dari Jawa, Pak,” Pak Ahmad memperkenalkan saya. Saya mengulurkan tangan dan memperkenalkan diri lebih lanjut.

Pak Dasipin tertawa dan mengangguk. Ia seperti sudah paham maksud kedatangan saya sebab terbilang sering didatangi orang dengan tujuan sama: mendengar ia bercerita. Tentu saja, bukan cerita sembarang cerita.

Ia mempersilahkan kami duduk di resbang yang menghadap meja tua. Ia pun duduk di kursi di depan kami.

“Tadi saya mau pergi ke tempat anak di Jikumerasa, tetapi batal. Ada kedutan di pelupuk mata saya pertanda ada tamu, eh, ternyata *sampean*,” katanya. Terdengar riang, seolah tak ada lagi beban yang tersisa.

Beban masa lalu itu mungkin tak sepenuhnya hilang, tetapi dengan menyebut anak-anaknya, beban itu jauh berkurang. Ia menyebutkan anak tertuanya tinggal di Jikumerasa sebagai pegawai negeri sipil. Tiga anaknya yang lain ada yang bekerja di pertambangan dan bertani. Ia punya empat anak dari perempuan asli Buru yang ia nikahi setelah memastikan istrinya di Jawa telah menikah lagi.

Dasipin berasal Batang, Jawa Tengah. Ia seorang petani dan simpatisan Pemuda Rakyat yang berafiliasi ke Partai Komunis Indonesia (PKI). Peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang terjadi di Jakarta hanya samar-samar ia dengar. Tahu-tahu pada awal bulan Desember tahun yang sama, pada pukul 13.00 siang, ia ditangkap tentara dan digelandang ke Koramil Batang. Ia ditanya macam-macam yang tak bisa ia jawab karena ia memang tidak tahu. Akhirnya ia dikirim ke penjara Batang, mendekam sampai satu tahun. Tahun berikutnya ia dipindah ke Nusakambangan.



Pak Dasipin

Pada tanggal 16 Agustus 1969—sehari sebelum HUT Ke-24 RI—bersama 800 orang tahanan lain ia digiring ke Pelabuhan Sodong, Wijayapura, Nusakambangan. Lambung kapal ADRI XV sudah menunggu dan membawa mereka ke Pulau Buru. Pramoedya yang termasuk dalam rombongan pertama itu, menulis dengan satir, “Kami berangkat sebagai hadiah ulang tahun Republik Indonesia.”

Ketika kalimat Pram dalam *Nyanyi Sunyi...* itu saya bacakan, Pak Dasipin tersenyum kecut.

“Ya, begitu. Hadiah kemerdekaan,” ulangnya ironis. “Dua kali kapal mati mesin entah di laut mana,” Pak Dasipin kemudian mengenang.

“Untung ada di antara kami yang ahli mesin. Mereka bahu-membahu membantu teknisi kapal. Eh, sampai di

Laut Banda kapalnya malah rusak parah. Setelah sebelas hari berlayar dalam ketidakpastian, barulah kami sampai di Teluk Kayeli.”

Suasana di Teluk Kayeli, digambarkan Pram dengan mencekam

Suling kapal menjerit-jerit tapi tak juga mencari dermaga untuk bersandar, kapal ini terlalu besar. Dua buah LC (landing craft) datang menjemput....Dari LC beberapa perwira naik ke kapal. Beberapa belas orang yang nampak kokoh diperintahkan turun lebih dahulu menyiapkan dapur.

Perwira tertinggi pun datang pula menjemput. Dengan satu LC tapol pilihan mempelopori mendarat di pulau “Hidup Baru”, dengan segerobak perlengkapan dapur.”

Bagi Pak Dasipin semua itu adalah sejarah, tidak saja bagi dirinya pribadi, tetapi bagi para tapol dan juga bangsa Indonesia. Akan tetapi, apakah ini akan dianggap sebagai sejarah bagi bangsa ini, tanpa bermaksud berkecil hati, Dasipin sangsi. Ia merujuk hal-hal kecil yang ia saksikan dan alami sendiri di Waeapo.

Ia menyebut banyak nama unit di Waeapo yang sudah lama hilang atau diganti sehingga generasi sekarang tidak lagi mengetahuinya. Misalnya, lokasi Mako tempat Pak Dasipin tinggal namanya adalah Unit I/Wanapura. Inilah unit pertama yang dibuka karena itu namanya terdiri dari dua kata: *wana* (hutan) dan *pura* (gerbang). Nama-nama unit memang banyak memakai awalan kata “wana” yang

dalam bahasa Jawa Kuna mencerminkan lokasi *babat alas*. Sementara itu, orang Buru mengawali nama tempat dengan kata “way” atau “wae” karena kehidupan mereka dekat dengan sungai.

Kesejarahan itu tak selalu terbaca dewasa ini. “Makanya orang tak tahu Mako itu sebenarnya terletak di Wanapura, padahal lebih dulu baraknya ada daripada markas komando. Namun, markas tetap lebih dikenal ketimbang barak; sejarah tetap milik komandan, bukan tapol jelata,” Pak Dasipin membuat amsal.

Begitu pula Unit II/Wanareja, tempat Pramoedya Ananta Toer ditempatkan, tidak lagi dikenal.

“Bahkan di mana lokasi Wanareja orang tak tahu,” kata Pak Dasipin yang mengaku kenal baik dengan Pram. Mereka sama-sama berada dalam rombongan pertama, tetapi hanya beda unit. Pram di Unit III, dia di Unit I. Sewaktu Pram diizinkan tinggal di Mako untuk menulis, ia punya kesempatan lagi bertemu Pram karena Mako terletak di Unit I.

“Begitu pula nama-nama jalan yang dulu diberi berdasarkan kesepakatan tapol, kini banyak hilang atau berganti,” Pak Dasipin mulai lagi.

Jalan Ahmad Yani, Brawijaya, dan Jalan Ir. Tasi, kata dia, sudah tidak ada. Yang masih bertahan itu Jalan Flamboyan dan Jalan Gatot Soebroto.

Ketika saya bertanya mengapa nama Ahmad Yani diberikan, padahal sang Jenderal disebut tewas diculik orang komunis, Pak Dasipin terdiam sebentar. “Itu tidak benar!” katanya kemudian.

“Ada banyak versi dan kontroversi seputar peristiwa itu. Jika pun PKI dituduh sebagai dalang, apakah semua anggota dan simpatisannya terlibat? Tentu tidak. Yang bermain hanya orang atau kelompok tertentu, selebihnya tidak tahu. Nah, karena itu, kami ada dendam apa dengan Pak Yani? Kami tak suka bagaimana dengan Pak Gatot?”

“*Tapi* ada nama bunga yang romantis juga, ya, Pak?” saya sedikit mengalihkan.

“Iya, flamboyan!” Ia tertawa. “Dulu ada juga nama mawar dan kembang sepatu untuk jalan lebih kecil. Itu perlu untuk mengurangi beban hidup. Kami biasa menamai kambing atau sapi dengan nama gadis-gadis cantik, *sekedar* hiburan. Juga *bikin* istilah yang lucu-lucu, padahal *resiko*-nya berat. Misalnya *Kordem*, artinya *Korps Demit* atau *Corvee Demit*. *Corvee* itu artinya tugas khusus atau mendesak. Pelaksananya, ya, korps, orang-orang yang diberi tugas. Misalnya membawa kayu ke Namlea. Kerja tengah malam, diam-diam seperti demit, sebab itu mainan gelap dantefaat...”

Dalam bukunya, Mars Noersmono ada menyinggung soal *corvee* ini lengkap dengan ilustrasi yang ia buat sendiri. Begitu pula Shindunata, dalam bukunya *Dari Pulau Buru ke Venesia* (2006), menyebut *corvee* merupakan tindak lanjut dari “RDG” alias radiogram. RDG biasanya berupa “perintah yang harus cepat-cepat dijalankan.”

Radiogram untuk *corvee*, tulis Shindu, sering tak masuk akal. Misalnya, pernah Unit III diminta menyeter 999 m³ papan dan 80 ton padi untuk komandan unitnya. Unit XVIII pernah dikerahkan membangun semacam “Bina

Ria”, taman dengan kolam dan wisma. Anggota Unit III pernah diminta *corvee* membangun dua gereja dalam waktu sehari semalam.

Dalam situasi sulit itu, para tapol punya cara menghibur diri. Untuk dua gereja yang selesai dibangun “seharlam” (istilah Pram untuk waktu 24 jam), mereka sepakat merasa sakti persis Bandung Bondowoso membangun Candi Prambanan dalam semalam. Untuk “Bina Ria” yang dinikmati para komandan, mereka namai “Hotel Krusek”. Dalam bahasa Jawa artinya lebih kurang tempat esek-esek.

“Siapa lagi yang bilang kami sakti kalau tidak kami sendiri?” sambut Pak Dasipin terpingkal, ketika saya kutipkan liputan Shindunata yang terbit di *Kompas* pada tahun 1978 itu.

“Bayangkan, bagaimana tidak sakti,” ia mulai lagi. “Di penjara bertahun-tahun dan dipaksa mengaku ini dan itu, kami tetap kuat. Dikirim dalam lambung kapal bocor kami tetap tiba selamat. Dipaksa kerja tanpa alat memadai, bisa buka sawah dan membangun jalan.”

Menurut Pak Dasipin, pada awal membuka hutan menjadi lahan pertanian, para tapol hanya mengandalkan sabit dan pacul yang berkarat. Selebihnya menggunakan tangan. Mereka mencabut lalang, mematahkan ranting pohon, dan membongkar akar-akar. *Toh*, dengan semangat kebersamaan mereka berhasil membuka jalan penghubung antarunit atau dikenal dengan jalan Transkop, termasuk membuka jalan raya Mako—Namlea sepanjang lebih dari 40 km.

Ketika panen mulai berhasil, para tapol sengaja menjual beras dengan harga murah kepada penduduk lokal. Hal itu merupakan bentuk kepedulian dan keinginan tapol untuk hidup bermasyarakat, bahkan banyak di antara penduduk yang semula hanya mengandalkan sagu dan hasil ladang meminta diajari bercocok tanam, khususnya padi.

Para tapol juga tidak menisbikan tradisi dan tata cara masyarakat Buru. Misalnya, masyarakat Buru banyak menganut kepercayaan pamali. Mereka sangat menghormati alam karena dianggap berhubungan dengan roh nenek moyang. Mereka memiliki batu dan kayu pemujaan dalam sebuah bangunan kecil yang disebut “Rumah Pamali”. Bangunan ini dibuat di halaman depan rumah atau tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti tepian sungai. Selain tempat ritual, bangunan tersebut juga berfungsi sebagai tempat menyimpan pusaka dan barang-barang leluhur.



Rumah pamali

Para tapol menghormati benda-benda dan prosesi ritual di rumah pamali. Pernah, kata Dasipin, kawasan Unit II dan sebagian Unit I dilanda banjir besar karena luapan Sungai Waeapo. Masyarakat lokal dan tapol kemudian mengadakan ritual tolak bala. Mereka berdoa bersama-sama di rumah pamali. Setelah itu mereka membuat rumah pamali yang cukup besar di tepi sungai, yang dihiasi perahu-perahu yang digantung dan sampai sekarang bangunan itu tetap lestari.

Terkait sejarah kecil (*petite historis*), Pak Dasipin kembali merujuk nama-nama yang hilang atau terlupakan. Ia mengatakan bahwa banyak orang tidak tahu kenapa nama tiga unit terakhir menggunakan huruf, bukan angka. Unit yang dia maksud adalah Unit R, S, dan T.

“Itu ada kepanjangan dan artinya. Yakni, Ronggolawe, Sawunggaling, dan Trunojoyo,” kata Pak Dasipin.”Masing-masing merujuk asal kesatuan petugas yang mengawal unit. Dalam sejarah, nama-nama itu juga berasal dari sosok pahlawan, tetapi sering dianggap sebaliknya.”

Ya, kita tentu tahu kisah Ronggolawe yang ikut mendirikan Majapahit. Lalu, Ronggolawe dianggap membangkang kepada kerajaan. Sawunggaling sering dianggap “Pitung”-nya Surabaya. Trunojoyo seorang pangeran Madura yang berperang melawan Amangkurat dari Kraton Mataram, tempat dulu ia pernah diasuh tinggal. Bagi sebagian orang ia pahlawan, sebagian menganggapnya pecundang. Intinya, sosok ketiga tokoh tersebut tidak gampang dinilai secara hitam putih.

Setelah mengingat kisah-kisah tersebut, saya mencoba membuat analogi, “Apakah bisa berarti dengan nama-nama itu, komandan tefaaf mulai menyadari siapa tapol sebenarnya, Pak?”

Pak Dasipin manggut-manggut. “Bisa jadi, mengingat unit-unit bertanda huruf itu dibangun terakhir, ketika padi sudah panen dan jalan sudah terbuka. Bisa pula kebetulan. *Tapi* saya percaya itu skenario Tuhan.”

Bagaimanapun sederhananya, hal-hal yang dikemukakan Pak Dasipin ini penting untuk diketahui masyarakat luas. Supaya masyarakat Buru khususnya dan Indonesia umumnya mendapat informasi dan sejarah yang berimbang. Saat ini ada ketimpangan pengetahuan orang tentang Waeapo. Bagi orang Indonesia umumnya, Waeapo identik dengan para tapol. Sementara bagi orang Buru sendiri, Waeapo identik dengan orang-orang trans, padahal keduanya saling bersinergi.



Bekas gudang Tefaaf di Mako

“*Tapi* kenapa orang di luar Buru tidak mempelajari juga Waeapo dari sisi transmigrasi? *Kenapa* Buru hanya dipromosikan secara tunggal dari sisi tapol?” ia menatap saya. “*Dan* kita di Buru kenapa tidak mempelajari Waeapo dari sisi tapol juga?” tanya Pak Dasipin, seolah ditujukan kepada Pak Ahmad.

”Kita seolah melupakan sejarah Waeapo yang dibuka para tapol. Orang kita cenderung merujuk transmigrasi sebagai ikon Waeapo yang dianggap manusiawi dan berorientasi pembangunan, sedangkan inrehab dengan penghuni para tapol dianggap sebagai tempat buangan dan terkait ideologi terlarang. *Kenapa* tidak dipelajari juga, ya, Pak Ahmad?” Benar. Pak Dasipin bertanya kepada guru muda lulusan sebuah universitas di Makassar itu.

“Seharusnya dipelajari, Pak Ipin. *Tapi* bahkan generasi saya saja hanya samar-samar tahu cerita tentang tapol, apalagi generasi sekarang,” aku Pak Ahmad jujur.

Sebagai tetua di Mako, Pak Dasipin juga menyayangkan dirinya tak pernah dilibatkan oleh desa untuk berbagai hal, padahal ia mengetahui banyak sejarah tempat itu, termasuk tentang pasar dan Masjid Raya Assalamah. Dulu dia termasuk orang yang mengusulkan mendirikan Pasar Mako di lahan yang ikut ia buka, bahkan dia yang memberi nama masjid besar di Mako sekarang. Itulah sebabnya, ketika suatu hari ada petugas agraria mengukur tanah masjid untuk membaginya bagi keperluan lain, Dasipin langsung mencegat petugas yang sedang mengukur lahan.

“Tidak bisa! Dari sejak kami membuka hutan di sini, tanah seluas ini semuanya diperuntukkan buat masjid,”

Dasipin menirukan penolakannya. Petugas desa dan kecamatan yang memerintahkan petugas agraria tersebut akhirnya membatalkan rencana.

“Meskipun saya jarang ke masjid, *tapi* saya selalu bersyukur melihat masjid kian hari kian ramai dan bangunannya makin bagus. *Dan* satu lagi, meskipun saya tak dilibatkan dalam kegiatan desa, saya sudah cukup senang karena nama Assalamah yang saya berikan masih dipertahankan hingga kini.”

Di tengah cerita yang terus mengalir, datanglah seteko teh panas beserta pisang goreng. Anak perempuan Pak Dasipin menghidangkannya untuk kami yang diikuti dengan pandangan sang ibu yang berdiri di gawang pintu. Saya tersenyum kepada ibu yang wajahnya tak kalah tegar itu.

Pak Dasipin menuangkan teh ke dalam gelas. Tangannya masih terlihat kuat.

“Tak ada poci di sini, *tapi* teko ini bisa menggantikan,” tiba-tiba ia teringat kampung halaman, Batang, tak jauh dari Tegal, yang tradisi minum teh pocinya sangat kental.

Sejak ia ditahan dan kemudian menetap di Waeapo, ia sempat pulang ke Batang pada tahun 1981 dan 1986. Ketika ditangkap, Pak Dasipin meninggalkan dua orang anak, satu di antaranya masih berumur 40 hari. Ia meminta maaf kepada anak-anaknya dan mereka memahami apa yang terjadi.

“Bapak ditangkap karena politik dan Bapak tidak tahu politik,” katanya menirukan sang anak.

Pak Dasipin menikah lagi dengan perempuan asli Buru yang sudah beranak empat. Dari hasil pernikahannya dengan Pak Dasipin, perempuan itu memiliki tiga orang anak. Anak-anak mereka, baik yang tinggal di Batang maupun Buru, hidup rukun sampai sekarang. “Anak-anak di Batang dan Mako biasa kontak-kontakan lewat telepon,” katanya, bahkan anaknya yang di Batang pernah datang ke Mako.

Di Unit I Wanapura, selain Pak Dasipin terdapat Pak Slamet dan Pak Tukiman asal Yogyakarta, Pak Sukiman dan Pak Suto Mahmud dari Solo dan Pak Saidan dari Tegal. Mereka ditangkap dan dibawa ke Buru dengan cara yang hampir sama: tidak banyak tahu persoalan dan tak pernah diadili.

Yang unik adalah Pak Kamto, tapol paling muda di antara mereka. Pak Kamto datang bersama ibunya ke Buru mencari ayahnya yang merupakan seorang tentara. Setelah sang ayah dibebaskan, Kamto dan ibunya memilih menetap di Waeapo, sementara ayahnya malah pulang ke Yogya.

Sampai di situ cerita saya dengan Pak Dasipin hari itu. Kunjungan dipungkasi dengan “upacara” minum teh dan menyantap pisang goreng. Saya ditawarkan makan malam, tetapi Warung Padang Ayah tak jauh dari penginapan telah dengan sabar menanti sejak tadi.

Sejarah mencatat, atau mungkin tak tercatat, sepanjang tahun 1969—1979, Waeapo dijadikan tempat “rehabilitasi” tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) ’65. Mereka dianggap anggota dan simpatisan anggota PKI yang dinyatakan terlarang pascaperistiwa 30 September 1965.

Pemerintahan Soeharto dengan rezim Orde Barunya mengirim tak kurang 12.000 jiwa tapol ke Pulau Buru. Mereka dikirim secara bertahap yang membuat geram dunia internasional dan dipulangkan kembali juga secara bertahap yang membuat dunia menahan nafas karena mengalami sekian kali penundaan.

Selama sepuluh tahun di Pulau Buru, para tapol ditempatkan di daerah-daerah yang dibagi sedemikian rupa sepanjang lembah Waeapo. Pembagian tersebut dinamakan *unit*. Total ada 21 unit yang penomorannya tersusun secara acak. Jika dilihat secara acak, masing-masing unit berjarak antara 10—25 km, dari yang terdekat ke Namlea, yakni Savanajaya, sampai yang terjauh di kaki Pegunungan Batabual, Unit X/Wanadharma. Akan tetapi, jika dihitung secara urut berdasarkan letak unit yang bertetangga, jarak hanya berkisar antara 1—9 km saja. Sementara jika diukur dari Markas Komando, jarak terjauh 10,4 km, yakni Mako-Unit XIII/Giripura (lihat tabel yang dibuat Pramoedya, 1996: 409).

Setiap unit dihuni sekitar 500 orang tapol yang ditempatkan dalam 10 barak (10 barak diisi 50 orang). Mereka dikawal oleh tonwal (peleton pengawal), dengan seorang dantefaaf (komandan tefaaf). Lokasi pemukiman unit berada di tengah-tengah lahan pertanian.

Merujuk bagan Tefaaf Unit XIV yang dibuat Mars Noersmono (2017: 11), lokasi dibagi dua bagian, yakni depan dan belakang. Di depan terdapat wisma dantefaaf, asrama tonwal berikut dapur, gudang, dan tempat kerja khusus, seperti bengkel dan penggilingan beras (*giser*). Di belakang atau bagian dalam tersusun barak dengan posisi berhadapan, lima barak di kanan, lima di kiri, dan di tengahnya dibangun gedung pertemuan (kadang berfungsi juga sebagai gedung kesenian).

Masing-masing barak memiliki beranda dan satu dapur yang disebut dapur barak. Selain dapur barak, terdapat sebuah dapur umum untuk masak besar jika ada kegiatan. Jangan ditanya tempat genset (diesel listrik) karena malam hari keadaan gelap gulita, kecuali sedikit cahaya dari lampu kaleng. Itu pun tidak setiap hari menyala karena minyak, baik minyak kelapa maupun minyak tanah, sulit didapat. Cahaya yang ditunggu satu-satunya dalam kegelapan hanyalah cahaya bintang, yakni bisa bintang di langit atau bintang di lengan baju para pengambil kebijakan.

Secara nasional, pelaksana Inrehab Buru adalah Bapreru (Badan Pelaksana Resettlement), suatu badan di bawah Kejaksaan Agung R.I. bersama Pangkopkamtib (Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban), sebuah lembaga kemiliteran khusus yang dibentuk di luar konstitusi. Itulah sebabnya, pihak yang berunding dengan Raja Kayeli dalam hal penggunaan tanah ulayat Patuanan di Waeapo, adalah Jaksa Agung RI. Saya tidak mendapat informasi lebih lanjut di mana perundingan itu dilaksanakan, apakah di Jakarta dengan mengundang Raja atau di Kayeli di mana pihak Jaksa Agung datang.

Di luar perundingan, Jaksa Agung Jenderal Sugiharto pernah datang ke Waeapo. Menyusul kemudian Pangkobkamtib Jenderal Soemitro, 9 Oktober 1973. Soemitro datang dengan rombongan lengkap seperti Brigjen Wadly (Ketua Perencana Bapreru), Brigjen Wing Wirjawan, Mayjen Charis Suhud, dan lain-lain. Bersama mereka ada tim psikologi dari UI, seperti Fuad Hasan dan Saparinah Sadli. Tak ketinggalan pula wartawan, di antaranya Mochtar Lubis, Sabam Siagian, dan Rosihan Anwar.

Tentu saja ketika rombongan itu datang kondisi Tefaaf Pulau Buru sudah mulai jelas bentuknya. Selama empat tahun para tapol bekerja, sebagian sabana sudah berubah menjadi sawah, jalan sudah tersedia walaupun masih dari tanah, dan sebuah perkampungan (non-barak) juga sudah berdiri di Savanajaya. Ini unit khusus untuk tapol yang disusul keluarga sehingga tempat tinggal dibuat berbentuk rumah-rumah sederhana. Pengairan yang dialirkan dari Sungai Waeapo dan sungai-sungai lain sudah membuahkan hasil.

Situasi itu jauh berbeda ketika para tapol baru datang. Mereka harus *babat alas* membuka hutan dan membalik tanah sabana yang terbentang seluas mata memandang. Meskipun sebenarnya, saat mereka datang lokasi tefaaf tidak sepenuhnya kosong. Di sana sudah lebih dulu dipekerjakan para tapol dari Ambon. Mereka ditugaskan mendirikan barak dan membuat jalan rintisan. Namun, jumlah tapol Ambon yang bekerja paling awal di Waeapo ini jarang terekspos, termasuk ke mana mereka dibawa setelah gelombang tapol dari Jawa berdatangan. Begitu tapol dalam jumlah besar datang, para tapol dari Ambon ditarik, tetapi

tak ada yang tahu apakah dikembalikan ke Ambon atau ditahan di Jiku.

Pusat Komando antar-unit terletak antara Unit I/Wanapura dan Unit II/Wanareja. Tempat tersebut dikenal dengan nama Mako (Markas Komando). Tidak ada gambar atau foto yang memperlihatkan bagaimana bangunan utama markas komando. Namun, dari gambaran yang disampaikan Pram dalam catatannya, Mako berupa bangunan dua tingkat. Dilengkapi pos, dapur, dan gudang logistik. Pram diizinkan tinggal di salah satu bilik di lantai atas. Setelah kunjungan Soemitro, ia diizinkan memakai mesin ketik untuk menulis.

Setiap hari, sebelum menulis, Pram berolah raga kecil, kemudian membantu mengumpulkan kayu bakar untuk dapur. Kadang ia ditugasi mengangkut barang-barang ke gudang. Tak jauh dari situ terdapat klinik pengobatan. Mungkin juga ada tambahan bangunan lain karena selain Pram, petugas kemudian juga mengumpulkan tapol berkemampuan khusus untuk ikut tinggal di Mako, seperti ahli gambar, tukang kayu, pandai besi, ahli mesin, dan pemusik.

Saya mencoba menyusuri jejak Mako ke sekitar Polsek Waeapo. Hanya ada sebuah bangunan terbengkalai yang sudah tidak terurus. Sementara di samping pasar bersisa sebuah bangunan berdinding seng. Ukurannya cukup besar sebagai gudang logistik. Sebuah rumah pengawas gudang juga masih berdiri meskipun tinggal menunggu runtuh.

Berbagai situs memori pembuangan Pulau Buru memang hilang, dibiarkan hilang, atau mungkin sengaja dihilangkan. Kamar tempat Pramoedya Ananta Toer dulu menuliskan karya-karyanya juga tak lagi bersisa. Janet E. Steel dari Goerge University, ketika berkunjung ke Waeapo menyesalkan hilangnya situs-situs memorial itu. Sekelam apa pun, itu adalah milik sejarah yang mewarnai perjalanan suatu bangsa.

Sampai di sini saya teringat tempat penampungan manusia perahu dari Vietnam Selatan di Pulau Galang, Batam, yang pernah dua kali saya kunjungi. Di sana, bekas penampungan yang didirikan UNHCR (Badan PBB Urusan Pengungsian) masih lestari; sebagian ada yang runtuh juga. Pemerintah Kota Batam dan Pemda Provinsi Kepri mulai merevitalisasi lokasi itu sebagai situs kemanusiaan, seperti rumah-rumah, barak, markas komando, makam, tempat ibadah. Kapal-kapal kayu penangkap ikan yang telah menyelamatkan pengungsi dari ganasnya Laut Cina Selatan—demi menghindari serbuan dari utara—dipelihara dan dipajang. Tempat itu sekarang menjadi tempat wisata minat khusus di Batam. Pengunjungnya tidak hanya wisatawan dalam negeri, tetapi juga yang terbanyak adalah mantan pengungsi atau anak cucu pengungsi yang tersebar di berbagai negara di dunia. Awalnya, memang ada protes dari mantan pengungsi yang keberatan atas kebijakan Pemkot Batam mengabadikan bekas penampungan mereka sebagai objek turistik, tetapi dengan pendekatan yang baik persoalan itu bisa teratasi dan malah mereka balik mendukung.

Apa salahnya jika hal-hal yang berhubungan dengan kerja dan pengabdian tapol di Waeapo ikut diabadikan? Bukankah itu memuat semangat kerja keras yang dapat ditimba anak-cucu? Situs-situs itu bisa berupa bekas barak, gudang, jembatan rintisan, tempat menulis Pram, termasuk makam tapol, dan hal-hal lain yang saya kira masih cukup banyak berserak di sekitar Waeapo. Itu bisa dilakukan sebelum terlambat. Misalnya, merevitalisasi gudang-gudang yang masih bersisa di Sanleko, membangun ulang markas pemantau di muara Waeapo, dekat Kaki Air, yang saya bayangkan akan sangat cocok dengan rumah-rumah orang Bugis di atas air.

Sewaktu saya berkunjung ke dua pintu masuk Waeapo tempo dulu itu—Sanleko dan Kaki Air—saya merasakan bukan hanya nuansa nilai historis yang berhubungan dengan tapol, tetapi juga keindahan alam dan kearifan lokal. Secara administratif, Sanleko termasuk Kecamatan Namlea. Desa ini bisa dicapai melalui jalan lintas Namlea—Waeapo. Akan tetapi, jangan salah jika Anda terlalu menikmati jalan yang mulus dan lapang dan Anda dipastikan akan terlewat. Sanleko tidak persis di tepi jalan, tetapi lokasinya terletak ke arah pantai sejauh hampir 4 km. Simpangnya terletak di Desa Marloso.

Pantai Sanleko bisa dikatakan pantai serba ada, mulai rumputan hijau, pasir putih, hutan kayu putih, rumpun pandan, rawa, mangrove, hingga muara Sungai Waetele. Pemda Buru pernah membangun dermaga wisata dan sekarang dermaga tersebut sudah rusak terbengkalai, sebagaimana sebuah kafe kayu yang ditinggalkan di tengah hutan kayu putih. Sanleko sendiri berasal dari bahasa Portugis yang berarti ‘fajar’ karena matahari yang terbit di

Teluk Kayeli akan diawali bias fajar dari pantai yang indah ini. Selebihnya, Pantai Sanleko masih tampak tertinggal jika dibandingkan dengan desa tetangganya, padahal potensinya sangat besar.



Fajar terbit dari Sanleko

Saya juga bertemu dengan penduduk yang menjadi saksi mata pendaratan tapol di Sanleko, di antaranya La Putu yang sejak usia 8 tahun tinggal di desa pantai tersebut. Orang Buton memang banyak tinggal di Sanleko. Menurut La Putu, orang tuanya cukup akrab dengan sejumlah tapol yang bertugas membuat garam di pantai.

Jika Sanleko terletak di muara Sungai Waetele, sungai yang juga mengairi daratan Waeapo, Kaki Air terletak persis di muara Sungai Waeapo. Kaki Air merupakan sebuah desa tanpa daratan yang terletak di seberang Namlea dan hanya bisa dicapai dengan perahu motor sekitar 15 menit. Kampung ini unik karena didirikan di atas air dengan tiang-

tiang kayu seperti rumah orang Bajo. Namun, ini lebih komplis karena infrastrukturnya terbilang lengkap. Jalan dibuat dari papan, ada masjid, sekolah, dan rumah berlantai dua segala. Hanya masjid dan sekolah dasar yang terletak di atas rawa dengan ditimbun batuan dan pasir. Selebihnya, kampung tegak mengapit kedua muara dengan kaki-kaki kayunya, tetapi tidak pernah banjir. Maklum, kearifan lokal masyarakat Bugis yang membangunnya sudah teruji zaman.

Kaki Air atau dalam bahasa Bugis disebut *aje sallo*, sungguh nama yang puitis. Itulah salah satu hal yang mendorong saya berkunjung ke sana. Saya bertamu ke rumah Sekretaris Desa Nasri Bedu M. Menurutnya, Bapak Kepala Desa, Tahung Bugis, kebetulan sedang bepergian. Menurut Sekdes Nasri, Desa Kaki Air terdiri atas 3 RT yang didiami oleh 122 KK atau 527 jiwa. Sebagian besar penduduk hidup sebagai nelayan dengan mengandalkan alat tradisional seperti *rompong*, *bagang*, *sero*, atau *belle'* (jaring memakai tiang pancang).

“Kampung ini didirikan leluhur kami pada tahun 1955 saat Sulawesi Selatan dan Barat diguncang prahara Kahar Muzakar,” kata Pak Nasri. “Eh, ketika sampai di sini leluhur kami juga bertemu dengan mereka yang dikirim ke Waeapo setelah prahara ‘65 di Jakarta.”

Pak Nasri kemudian menunjuk sebuah pulau kecil di depan muara Sungai Waeapo. “Itu namanya Pulau Nusa Kapal, di sanalah dulu pos tentara pengawas tapol Waeapo didirikan. Saya masih sempat melihat sisa bangunannya,” kata lelaki berusia 45 tahun tersebut. Pulau Nusa Kapal, menurut cerita, berasal dari kapal yang terdampar dan oleh

raja Kayeli dibiarkan menjadi daratan pengaman muara sungai besar itu.

Demikianlah, berbagai tempat yang berhubungan dengan tapol dan Waeapo bisa menjadi titik-titik jelajah literasi. Untuk mengimbangnya, perlu pula dibangun atau diangkat situs-situs yang berhubungan dengan dunia transmigrasi. Misalnya, mendirikan monumen transmigrasi dengan patung pak tani dan bu tani di tempat transmigran pertama tiba. Jika perlu, dibuatkan museum tani atau museum transmigrasi yang memuat berbagai benda memorial dan kisah-kisah tentang pengolahan lahan. Ini akan melengkapi situs dan penanda yang sudah didirikan pemerintah sebelumnya. Untuk diketahui, pemerintah Orde Baru justru sengaja membangun patung, monumen, dan tugu di sejumlah titik, tetapi hanya berhubungan dengan pihak yang berkuasa saat itu.



Prasasti Savanajaya

Paling terkenal tentu saja Monumen Desa Savanajaya yang prasastinya ditandatangani, antara lain oleh Brigjen Wadly Prawirasupradja (Ketua Perencana Bapreru), Brigjen Wing Wirjawan (Ketua Pelaksana), dan Letkol A.S. Rangkuty (Dantefaat) serta Letkol Marjono (Wadantefaat). Itu merupakan monumen peresmian Desa Savanajaya sebagai unit yang menampung tapol yang berkeluarga. Pemerintah mempersilakan istri tapol dan keluarganya yang datang hendak bergabung dengan suaminya ke Buru. Pemerintah memfasilitasi keberangkatan mereka, bahkan mereka ditempatkan di unit dengan rumah-rumah sederhana yang memang lebih tepat disebut sebagai desa. Desa ini juga diperuntukkan bagi tapol yang kebetulan menikah, baik dengan penduduk setempat maupun yang berjodoh dengan keluarga sesama tapol.



Prasasti Savanajaya

Selain monumen, di tepi lapangan Savanajaya terdapat gedung memorial yang bernilai sejarah, yakni Gedung Kesenian Savanajaya. Ukurannya besar dan memanjang. Untuk ukuran sekarang, gedung itu sudah direnovasi setelah bertahun-tahun sebelumnya dibiarkan nyaris runtuh. Boleh dikatakan, di Savanajaya beberapa situs cukup utuh, bahkan lapangan desa pun bagian dari peninggalan tapol.



Gedung Kesenian Savanajaya

Di Desa Sanleko terdapat tugu pendaratan tapol dan bekas gudang. Ini belum termasuk sejumlah makam atau kompleks makam, baik yang bernisan maupun yang sudah tak dikenal, menyebar di setiap unit. Itu merupakan situs memorial yang layak dikenangkan.

Untuk mengenang semua itu, saya berkunjung ke rumah Pak Yadiono, mantan tapol yang tinggal persis di belakang Gedung Kesenian Savanajaya. Ia tinggal di rumah

sederhana model lama. Pintu utama rumah itu menghadap jalan tembus ke lapangan, sedangkan pintu belakang langsung berhadapan dengan lapangan. Bagian depan rumah itu ditempati anaknya, sedangkan bagian belakang ditempati Pak Yadiono.



Pak Yadiono

Sewaktu saya datang diantar oleh Pak Ahmad, Pak Yadiono sedang memainkan piano. Ia keluar dengan kaos dalam. Melihat Pak Ahmad datang bersama saya, ia kembali ke dalam mengenakan kemeja. Pak Ahmad adalah koleganya di SMA 3 Waeapo. Dia mengajar musik di sana. Ia menjadi tenaga honorer hampir sepuluh tahun. Hampir semua alat musik ia kuasai, setidaknya terlihat dari koleksi alat musiknya di kamarnya yang gelap. Ada piano, ada gitar, tifa, seruling dan, biola.

“Biola itu pemberian cucu Pram. Ia kirim dari Jakarta setelah sebelumnya ia mampir kemari,” katanya sambil memasang kancing kemeja. Karena agak gopoh, kancing itu terlihat salah pasang. Berbeda dengan Pak Dasipin yang meledak-ledak, Pak Yadiono relatif tenang. Suaranya juga tidak terlalu keras.

“Saya dulu satu unit dengan Pram, hanya beda barak. Kami bertugas membuka Jalan Transkop, yakni jalan antarkompleks atau antar-unit. Juga pernah menangani tempa besi. Ketika Pram dipindahkan ke Mako, saya menyusul karena sebagai pemusik dan tukang foto, saya terpilih bergabung dengan tapol yang punya keahlian khusus,” ia berhenti sebentar, lalu tertawa kecil kepada Pak Ahmad. “Jadi, begini-begini kita ini orang pilihan, Mad!”

Saya balas tersenyum dan duduk di kursi yang ia persilakan. Selanjutnya berbagai cerita mengalir pada petang itu di antara bunyi atap rumahnya yang berderak-derak dipukul angin santer Savanajaya. Yang jelas, dari cerita laki-laki asli Blitar itu, saya mendapat gambaran bahwa kecintaan pada Waeapo akhirnya muncul setelah beberapa lama mereka bekerja membuka lahan. Ia menyebutnya: visi!

“Semula memang merasa terpaksa, *tapi* lama-lama, kami sadar bahwa kalau memang ini jalan pengabdian kami kepada bangsa, *kenapa* tidak? Sejak itu kami bekerja dengan komitmen untuk berbuat yang terbaik bagi tanah Buru. Kami mengerjakan sawah, membuka jalan, dan membangun irigasi dengan satu visi bahwa hasilnya tak akan sia-sia. Kalau tanpa visi, meskipun dipaksa seperti apa pun, hasilnya tetap tak akan bagus. *Tapi* kalau visi sudah

kuat, meskipun dipaksa, kita tetap berpikir pada hasil yang baik.”

Selesai bertemu Pak Yadiono, saya mengunjungi patung Pelda Panita Umar di Unit V. Patung itu dibuat untuk memperingati gugurnya anggota tonwal, Panita Umar, konon karena berkelahi dengan seorang tapol. Patung tersebut dibuat setengah dada, bertopi koboi, ditaruh di atas tiang dengan pelataran berundak. Di tiang itu terdapat tulisan begini: *Telah gugur di tempat ini Pelda Panita Umar, Prajurit Sapta Margais Kodam XV Pattimura pada tanggal 6 Oktober 1972 jam 13.30 WIT di dalam menjalankan tugas pengabdianya kepada kemurnian dan keluhuran Pancasila.*”

Patung ini sangat populer karena selain terletak di tepi jalan utama, cerita di balik kematian Panita Umar juga membuat heboh. Menurut cerita, ia tewas dibunuh sehari sebelum pulang ke kampungnya. Seorang tapol yang dendam menghunus parang di jembatan yang ia lewati. Karena dibuat dalam bentuk patung setengah dada, kedua tangannya tidak disertakan. Rupanya dari bentuk patung itu, saya duga, masyarakat berkesimpulan sendiri bahwa Panita Umar tewas dengan kedua tangan dipotong oleh tapol!

Cerita tentang patung Panita Umar dan hal ihwal lain kehidupan tapol, saya kira perlu disosialisasikan supaya tidak *miskomunikasi*. Begitu pula kisah-kisah pertanian dan transmigrasi perlu dimunculkan dan dirawat supaya semangat berdikari bangsa terpelihara. Di Waeapo, masa lalu, masa kini, dan masa depan menyatu. Di sini, di haribaan Pulau Buru yang tak terlupakan!

Biodata Penulis

Raudal Tanjung Banua, lahir di Lansano, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, 19 Januari 1975. Pernah menjadi koresponden *Harian Haluan* dan *Harian Semangat*, Padang, kemudian merantau ke Denpasar, Bali, bergabung dengan Sanggar Minum Kopi Bali dan intens belajar pada Penyair Umbu Landu Paranggi.

Puisi, cerpen, dan esainya terbit di surat kabar di sejumlah kota di Indonesia, di samping terbit dalam antologi bersama dan pemenang lomba. Bukunya yang sudah terbit *Pulau Cinta di Peta Buta* (Jendela, 2003-kumpulan cerpen), *Ziarah bagi yang Hidup* (Mahatari, 2004, kumpulan cerpen), *Parang tak Berulu* (Gramedia, 2005, kumpulan cerpen), *Gugusan Mata Ibu* (Bentang Pustaka, 2005, kumpulan puisi) dan *Api Bawah Tanah* (Akar Indonesia, 2013). Sedang menyiapkan buku keenamnya, *Kota-Kota Kecil yang Diangan dan Kujumpai*.

Ia pernah mengelola sejumlah kegiatan sastra, seperti Kongres Cerpen Indonesia, Festival Kesenian Yogyakarta (FKY), dan Temu Sastrawan Indonesia. Ia juga diundang di berbagai kegiatan sastra, di antaranya Panggung Baru Sastra Indonesia, Festival Winternachten sesi Indonesia, Festival Puisi Internasional DKJ, Cakrawala Sastra Indonesia, Ubud Writers and Readers Festival, Aruh Sastra Kalsel dan KAPLF II di Pekanbaru. Ia memperoleh penghargaan, antara lain Anugrah Sastra Horison 2005, Sih Award, nomine KLA, dan Mastera 2007 di Kualalumpur.

Sejak tahun 1997 menetap di Yogyakarta, dengan menamatkan studi di Jurusan Teater ISI Yogyakarta, mengelola Komunitas Rumahlebah, Penerbit AKAR Indonesia dan Framepublishing—yang antara lain menerbitkan *Jurnal Cerpen Indonesia dan rumahlebah ruangpuisi*.